



BADAN NARKOTIKA NASIONAL



LAPORAN KINERJA 2024

DEPUTI BIDANG PEMBERANTASAN



JL. M.T. HARYONO NO. 11, CAWANG, KRAMAT
JATI, JAKARTA TIMUR 13630, INDONESIA

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan ridho-Nya, Laporan Kinerja Deputy Bidang Pemberantasan Tahun 2024 ini berhasil disusun dan dipublikasikan.

Penyusunan laporan ini merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Laporan Kinerja Deputy Bidang Pemberantasan bertujuan untuk memberikan informasi kepada pihak yang berkepentingan mengenai keberhasilan dan kegagalan Bidang Pemberantasan selama Tahun 2024, berkaitan dengan pelaksanaan P4GN Bidang Pemberantasan sesuai dengan program Kepala Badan Narkotika Nasional dalam bentuk slogan "**Indonesia Bersinar (Bersih Narkoba)**".

Melalui kerja keras serta dukungan seluruh personil, seluruh target yang direncanakan dapat terlaksana sesuai dengan target waktu yang tersedia. Namun demikian dengan beban tugas yang semakin meningkat, kami menyadari bahwa tantangan kedepan dalam upaya pelaksanaan program P4GN ini semakin memerlukan upaya-upaya kerja keras dan dukungan penuh dari seluruh personil Deputy Bidang Pemberantasan.

Kepada seluruh personil Deputy Bidang Pemberantasan yang telah melaporkan pelaksanaan kegiatan dan pertanggung jawaban anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, Januari 2025

DEPUTI PEMBERANTASAN BNN

I WAYAN SUGIRI, S.H., S.I.K., M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iv
BAB I PENDAHULUAN	7
<u>A.</u> LATAR BELAKANG	7
<u>B.</u> DASAR HUKUM	8
<u>C.</u> KEDUDUKANDANFUNGSI	8
<u>1.</u> KEDUDUKAN	8
<u>2.</u> FUNGSI	9
<u>D.</u> PERAN STRATEGIS	10
<u>E.</u> STRUKTUR ORGANISASI	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	12
<u>A.</u> PERENCANAAN STRATEGIS	12
<u>B.</u> PERJANJIAN KINERJA DEPUTI BIDANG PEMBERANTASAN TA 2024	13
<u>C.</u> SASARAN KINERJA DIREKTORAT DI DEPUTI BIDANG PEMBERANTASAN TAHUN 2024	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DEPUTI PEMBERANTASAN	15
<u>A.</u> CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024	15
<u>B.</u> ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TA 2024	15
BAB IV AKUNTABILITAS KEUANGAN	25
<u>A.</u> PENETAPAN ANGGARAN	25
<u>B.</u> REALISASI PENGGUNAAN ANGGARAN TAHUN 2024	26
BAB V PENUTUP	27
<u>A.</u> KESIMPULAN	27
<u>B.</u> SARAN	28
LAMPIRAN	29

IKHTISAR EKSEKUTIF

Deputi Bidang Pemberantasan BNN RI sebagai satuan kerja tingkat eselon I merupakan satuan kerja teknis dengan fokus pada aspek penegakan hukum, pemberantasan, atau upaya mengurangi *supply* penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Kedeputian ini terdiri dari tujuh direktorat dan mempunyai kepanjangan tangan pemenuhan target melalui bidang pemberantasan dan intelijen yang ada di 34 provinsi.

Deputi bidang pemberantasan memiliki target kinerja berupa jumlah jaringan sindikat tindak pidana narkoba yang diungkap (19 jaringan) dan persentase penyelesaian penyidikan aset (TPPU) tersangka tindak pidana narkoba hasil tindak pidana narkoba (20 berkas perkara). Untuk memenuhi target-target tersebut satuan kerja yang berada di bawah kedeputian melakukan aktivitas dimulai dari pengerjaan pemetaan yang dilakukan oleh unit intelijen, kegiatan penyelidikan lapangan dan penyelidikan secara intelijen teknologi, penindakan dan pengejaran, kemudian dilakukan penyidikan baik tindak pidana narkoba ataupun tindak pidana pencucian uang.

Persoalan kejahatan narkoba dan tindak pidana pencucian uang hasil kejahatan narkoba selalu mengalami penyesuaian terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintah. Karena itu, BNN juga terus menganalisa dan memahami bagaimana situasi kejahatan yang terjadi di lapangan misalnya perilaku para aktor jaringan dalam menyelundupan narkoba dengan pola-pola tertentu, dan perubahan perilaku dalam mengelabui petugas lapangan sehingga BNN tetap mampu mengungkap dan memutus jaringan kejahatan narkoba.

Dari target 14 jaringan sindikat tindak pidana narkoba yang diungkap, BNN mampu mengungkap 28 jaringan dengan komposisi 50% jaringan nasional dan 50% jaringan internasional. Jaringan nasional adalah kelompok pengedar narkoba lintas provinsi sementara jaringan internasional adalah kelompok jaringan penyelundupan dan peredaran narkoba lintas negara. Sedangkan persentase penyelesaian penyidikan aset (TPPU) tersangka tindak pidana narkoba hasil tindak pidana narkoba adalah 90% dari target 100% atau dari target 19 berkas, hanya satu yang belum diselesaikan hingga ke tahap penuntutan (P-21). Deputi Bidang Pemberantasan BNN tetap berupaya maksimal untuk dapat mengungkap kasus TPPU walaupun sistem transaksi

cenderung menghindari transaksi perbankan tradisional. Mereka banyak yang menggunakan *e-wallet* atau model transaksi lainnya yang membutuhkan upaya lebih bagi penegak hukum untuk dapat mengungkapkannya. Dengan kegigihan para penyidik dan penyidik dan kerja sama dari berbagai pihak, Deputi Bidang Pemberantasan dapat menyita aset dengan perkiraan aset sebanyak Rp. 93.148.391.170,40 pada tahun 2024 ini.

Tahun 2024 menjadi tahun yang penuh tantangan bagi sebagian besar K/L sebagai dampak dari situasi global dan pergantian kepemimpinan nasional, termasuk BNN. Renstra BNN Tahun 2020-2024 memasuki periode akhir dengan situasi yang jauh berbeda jika dibandingkan pada saat penyusunan Renstra tersebut. Karena itu, pergeseran target dan pencapaian adalah sesuatu yang pasti terjadi dan mau tidak mau BNN juga melakukan penyesuaian.

Deputi Bidang Pemberantasan dengan perangkat tujuh direktorat yang memiliki tugas dan fungsi masing-masing bahu membahu bersama Bidang Pemberantasan di BNNP dan jajaran melakukan upaya pengungkapan jaringan secara optimal sehingga target pengungkapan jaringan narkoba tercapai secara optimal. Di banyakungkap kasus, BNN berhasil mengamankan anggota jaringan dari hulu hingga hilir seperti di kasus Clandestine Laboratory pil PCC yang mengandung jenis narkoba carisoprodol. Di kasus tersebut, petugas berhasil mengamankan sepuluh tersangka yang memiliki peran berbeda yaitu pemodal/bandar, juru masak, pembeli, pengantar, dan pengelola keuangan. Mereka diamankan di beberapa tempat yang berbeda. Penyidikan juga tidak berhenti di kasus tindak pidana narkoba, namun juga tindak pidana pencucian uangnya.

Pada tahun 2024, pengungkapan kasus juga diwarnai dengan keragaman model atau jenis jaringan seperti jaringan penyelundup ganja dengan jalur Riau, Sumbar, dan Babel. Kemudian jaringan penyelundupan ganja yang berasal dari Thailand yang akan diedarkan ke Eropa dengan menjadikan Indonesia sebagai area transit. Selain penyelundupan sabu melalui jalur tradisional Selat Malaka, Laut Sulawesi, dan perlintasan antar negara di Kalimantan Barat, Deputi Bidang Pemberantasan juga berhasil mengungkap kelompok penyelundup heroin Kamboja dan Kokain Amerika Latin. Di tahun 2024 juga, BNN berhasil mengungkap pabrik narkoba yang baru pertama kali ditemukan yaitu jenis DMT di Bali. Pelaku adalah warga negara asing. Data tersebut menunjukkan jika kelompok jaringan narkoba

internasional menjadikan Indonesia sebagai area penjualan narkoba berbagai jenis (*poly drugs*).

Perubahan atau penyesuaian anggaran yang diberikan kepada Deputi Bidang Pemberantasan juga memberikan pengaruh terhadap kebijakan dan program termasuk target-target di tingkat eselon 2 seperti target berkas, terutama di satuan kerja vertikal (BNNP). Penyesuaian tersebut adalah keharusan karena berbagai situasi dan kondisi yang dialami Indonesia baik yang disebabkan situasi internal ataupun situasi internasional.

Laporan Kinerja Deputi Bidang Pemberantasan BNN tahun 2024 ini juga memberikan gambaran terkait target dan capaian kinerja tingkat eselon 1 dan didukung oleh data dukung laporan kinerja tingkat eselon 2 (sebagaimana data terlampir).

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Deputi Bidang Pemberantasan adalah salah satu satuan kerja tingkat eselon I pada Badan Narkotika Nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Presiden RI Nomor 47 tahun 2019 tentang Badan Narkotika Nasional. Sementara itu tugas dan fungsi Deputi Bidang Pemberantasan diatur dalam Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional, intinya adalah melaksanakan tugas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Bidang Pemberantasan. Dalam melaksanakan tugas P4GN tersebut, Deputi Bidang Pemberantasan menyelenggarakan fungsi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan nasional, penyusunan dan perumusan standar dan prosedur kegiatan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dengan instansi pemerintah terkait, pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana telah ditetapkan dalam program P4GN.

Arah kebijakan dan strategi BNN berdasarkan Renstra BNN periode 2020-2024 sebagai berikut :

1. Penanganan permasalahan narkotika secara seimbang antara *demand reduction* dan *supply reduction*.
2. Mengembangkan berbagai upaya dalam penanganan permasalahan narkotika secara holistik, integral dan berkelanjutan.
3. Mengedepankan profesionalisme, dedikasi dan tanggung jawab dalam penanganan permasalahan narkotika.

Sedangkan strategi yang akan dilaksanakan yaitu mengungkap jaringan sindikat narkotika dan menyita seluruh aset terkait kejahatan narkotika.

B. DASAR HUKUM

Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dilaksanakan berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Prekursor Narkotika;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
6. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : KEP/388/XII/2015/BNN tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja di lingkungan Badan Narkotika Nasional;
7. Rencana Kerja Bidang Pemberantasan T.A. 2024;
8. Perjanjian Kinerja Deputy Pemberantasan T.A 2024.

C. KEDUDUKAN DAN FUNGSI

1. KEDUDUKAN

Deputi Bidang Pemberantasan merupakan unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BNN di bidang pemberantasan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN dan dipimpin oleh seorang Deputi. Deputi Bidang Pemberantasan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional pasal 144 yaitu melaksanakan tugas Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Bidang Pemberantasan.

2. FUNGSI

Deputi Bidang Pemberantasan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional pasal 145, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang pemberantasan.
- b. Penyusunan dan perumusan norma, standar, kriteria, dan prosedur kegiatan intelijen, penyelidikan dan penyidikan, interdiksi, penindakan dan pengejaran, pengawasan tahanan, penyimpanan, pengawasan dan pemusnahan barang bukti serta penyitaan aset.
- c. Pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan instansi pemerintah terkait dalam pemberantasan dan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
- d. Pelaksanaan administrasi penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
- e. Pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang narkoba, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
- f. Pembinaan teknis kegiatan intelijen, penyelidikan dan penyidikan, interdiksi, penindakan dan pengejaran, pengawasan tahanan, penyimpanan, pengawasan, dan pemusnahan barang bukti serta penyitaan aset kepada instansi vertikal di lingkungan BNN.
- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN di bidang pemberantasan.

D. PERAN STRATEGIS

Sebagai representasi pemerintah dalam bidang P4GN sesuai dengan Tugas, Fungsi, dan Kewenangannya dalam hal penanganan permasalahan narkoba dan prekursor narkoba, peran strategis Deputy Bidang Pemberantasan adalah mengupayakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap Narkoba secara profesional.

Deputy Bidang Pemberantasan sebagai *focal point* dalam penanganan permasalahan narkoba dan prekursor narkoba khususnya di Bidang Pemberantasan mempunyai strategi-strategi yang ditempuh dalam melaksanakan kebijakan P4GN antara lain :

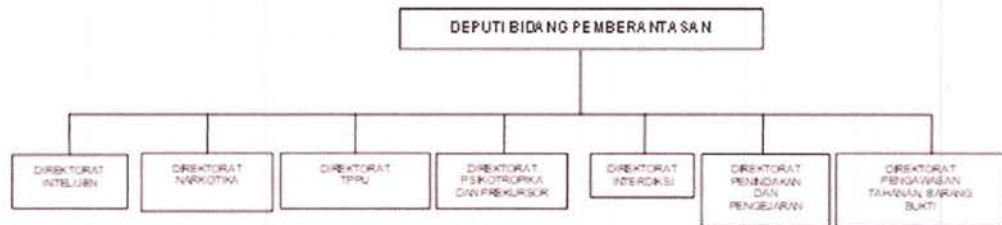
1. Melakukan pembangunan dan pengembangan kemampuan intelijen yang berbasis pada *human intelligence* dan teknologi intelijen.
2. Memberantas sindikat jaringan narkoba.
3. Melakukan pengawasan penggunaan prekursor narkoba secara ketat.
4. Melakukan Interdiksi Udara, Laut, dan Perbatasan.
5. Melakukan pengawasan tahanan, barang bukti, dan penyitaan aset jaringan sindikat narkoba.
6. Melakukan penelusuran aset.
7. Melakukan penindakan dan pengejaran.

Melalui penerapan strategi tersebut di atas diharapkan akan dapat menekan laju pertambahan angka prevalensi, menekan permintaan (*demand*), dan menghentikan penawaran (*supply*).

E. STRUKTUR ORGANISASI

1. Susunan Organisasi Deputy Bidang Pemberantasan terdiri atas :
 - a. Direktorat Intelijen
 - b. Direktorat Narkoba
 - c. Direktorat Prekursor Psikotropika
 - d. Direktorat Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
 - e. Direktorat Interdiksi
 - f. Direktorat Penindakan dan Pengejaran
 - g. Direktorat Pengawasan Tahanan, Barang Bukti, dan Aset

Struktur Organisasi
Deputi Bidang Pemberantasan



2. Tugas masing-masing Direktorat di bawah Deputi Bidang Pemberantasan adalah sebagai berikut :
- a. Direktorat Intelijen mempunyai tugas melaksanakan kegiatan intelijen dalam rangka P4GN di bidang pemberantasan.
 - b. Direktorat Narkotika mempunyai tugas melaksanakan penyelidikan dan penyidikan jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang berasal dari tanaman.
 - c. Direktorat Psikotropika dan Prekursor mempunyai tugas melaksanakan penyelidikan dan penyidikan jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika dan prekursor narkotika.
 - d. Direktorat Tindak Pidana Uang (TPPU) menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan administrasi penyidikan tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkotika yang merupakan jaringan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika; dan b. pelaksanaan pengumpulan data, penelusuran dan pemetaan aset yang berasal dari jaringan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.
 - e. Direktorat Interdiksi mempunyai tugas melaksanakan penyelidikan dan penyidikan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di wilayah udara, laut, perairan, darat, dan lintas batas.
 - f. Direktorat Penindakan dan Pengejaran mempunyai tugas melaksanakan penindakan dan pengejaran jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
 - g. Direktorat Pengawasan Tahanan, Barang Bukti, dan Aset mempunyai tugas melakukan pengawasan tahanan, barang bukti dan penyitaan aset.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan. Perencanaan Kinerja juga merupakan tahapan penting dalam melaksanakan rencana strategis (Renstra) yang akan menuntun manajemen dan seluruh anggota organisasi pada pencapaian kinerja yang diinginkan. Dengan berdasarkan pada perencanaan kinerja yang baik maka pelaksanaan Renstra juga dapat dipantau tingkat pencapaiannya secara lebih operasional. Manfaat Perencanaan Kinerja salah satunya adalah menghubungkan perencanaan strategis, perencanaan tindakan, maupun perencanaan operasional secara rinci.

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Rencana Strategis merupakan penjabaran yang memuat visi, misi tujuan, sasaran strategi, target, kebijakan, serta program dan kegiatan Kementerian/Lembaga untuk melaksanakan tugas dan fungsinya serta berpedoman pada RPJMN 2020 – 2024. Deputy Bidang Pemberantasan memiliki tugas, fungsi, dan wewenang di bidang pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN), bertujuan menurunkan tingkat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba secara nasional, tujuan tersebut salah satu sasaran strategis yang terkandung di dalam Rencana Strategis Deputy Bidang Pemberantasan T.A. 2020-2024.

Arah kebijakan pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024 untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut adalah dengan mengintensifkan upaya sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba (*demand side*), meningkatkan efektifitas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (*supply side*).

Strategi pembangunan untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut adalah melalui pelaksanaan P4GN di daerah dan pelaksanaan kegiatan Intelijen narkoba.

B. PERJANJIAN KINERJA DEPUTI BIDANG PEMBERANTASAN TAHUN 2024

Target kinerja eselon I atau tingkat kedeputan merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran strategis tingkat kelembagaan BNN. Indikator dan target kinerja pada tingkat eselon I atau kedeputan sebagaimana tugas dan fungsi masing-masing sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
Jumlah jaringan sindikat tindak pidana narkoba yang diungkap	19 Jaringan
Persentase penyelesaian penyidikan aset (TPPU) tersangka tindak pidana narkoba hasil tindak pidana narkoba	100%

Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Pemberantasan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya pengungkapan jaringan, penyitaan barang bukti dan aset sindikat peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba	Jumlah jaringan sindikat tindak pidana narkoba yang diungkap	19 Jaringan
	Persentase penyelesaian penyidikan aset (TPPU) tersangka tindak pidana narkoba hasil tindak pidana narkoba	100 %

C. SASARAN KINERJA DIREKTORAT DI DEPUTI BIDANG PEMBERANTASAN TAHUN 2024

Berikut adalah perjanjian kinerja Direktorat di Lingkungan Deputy Bidang Pemberantasan tahun 2024:

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya pemetaan jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba	Jumlah jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang berhasil dipetakan	19 Peta jaringan
2	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkoba dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba yang P-21	407 Berkas Perkara
		Jumlah titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	11 Titik lokasi
3	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkoba padawilayah entri point udara, laut, darat dan lintas batas wilayah Indonesia	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba dan prekursor di pintu masuk bandar udara, pelabuhan laut, perairan dan lintas batas wilayah indonesia yang P- 21	58 Berkas perkara
4	Meningkatnya penangkapan DPO dan TO kasus tindak pidana narkoba, prekursor narkoba dan TPPU	Persentase tersangka DPO kasus tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba serta TPPU yang tertangkap	100 %
		Persentase target operasi (TO) kasus tindak pidana narkoba, prekursor narkoba dan TPPU yang tertangkap	100 %
5	Meningkatnya pengawasan distribusi psikotropika dan prekursor narkoba	Jumlah berkas perkara tindak pidana prekursor narkoba yang P-21	5 Berkas Perkara
		Jumlah importir terdaftar dan pengguna akhir prekursor narkoba nonfarmasi yang diawasi	100%
		Jumlah pengungkapan kasus tindak pidana psikotropika	12 Laporan
6	Meningkatnya pengungkapan kasus pencucian uang hasil tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba	Jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P-21	20 Berkas perkara
7	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkoba	Nilai tingkat keamanan, ketertiban dan kesehatan tahanan	100
		Nilai tingkat keamanan barang bukti narkoba dan non narkoba	100

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA DEPUTI PEMBERANTASAN

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024

Sebagaimana telah ditetapkan dalam rencana kerja tahunan pada Tahun 2024 Deputy Bidang Pemberantasan. Capaian Indikator Kinerja Utama Deputy Bidang Pemberantasan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	REALISASI
Meningkatnya pengungkapan jaringan, penyitaan barang bukti dan aset sindikat peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba	Jumlah jaringan sindikat tindak pidana narkoba yang diungkap	28 Jaringan
	Persentase penyelesaian penyidikan asset (TPPU) tersangka tindak pidana narkoba hasil tindak pidana narkoba	18 Berkas

B. ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2024

1. Jumlah jaringan sindikat tindak pidana narkoba yang diungkap

Evaluasi capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi, selanjutnya capaiannya dipersentasikan, sehingga dapat diketahui bahwa target yang telah ditetapkan dapat dicapai atau tidak tercapai atau bahkan terlampaui.

Secara umum 2 (dua) sasaran strategis terjabarkan dalam 2 (dua) indikator kinerja utama Deputy Bidang Pemberantasan Tahun Anggaran 2024.

Capaian dari masing-masing Indikator Kinerja Deputy Bidang Pemberantasan BNN Tahun 2024 dapat dilihat pada uraian di bawah ini:

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Jumlah jaringan sindikat tindak pidana narkoba yang terungkap	19 Jaringan	28 Jaringan	147.37%

Jumlah Target Pengungkapan Jaringan Berdasarkan Renstra BNN Tahun 2020 - 2024.

Perbandingan dengan jumlah target Renstra BNN Tahun 2020-2024.

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah jaringan sindikat tindak pidana narkoba yang terungkap	29 Jaringan	35 Jaringan	37 Jaringan	39 Jaringan	41 Jaringan

Jumlah sindikat tindak pidana narkoba yang diungkap berdasarkan relisasi capaian kinerja pada tahun 2024 adalah 28 jaringan dari target 19 jaringan. Jumlah target capaian kinerja Deputi Pemberantasan tahun 2024 tersebut berbeda dengan target yang ditetapkan dalam Renstra BNN Tahun 2020 - 2024 yaitu untuk target tahun 2024 adalah 41 jaringan. Perbedaan antara target kinerja dan target kinerja tahun 2024 dan target Renstra BNN Tahun 2020-2024 dilakukan karena adanya penyesuaian terhadap kondisi internal BNN (SDM, sarana dan prasarana dan anggaran) dan kondisi eksternal (ketersediaan anggaran yang ditetapkan oleh stakeholder terkait seperti DPR dan Kemenkeu.

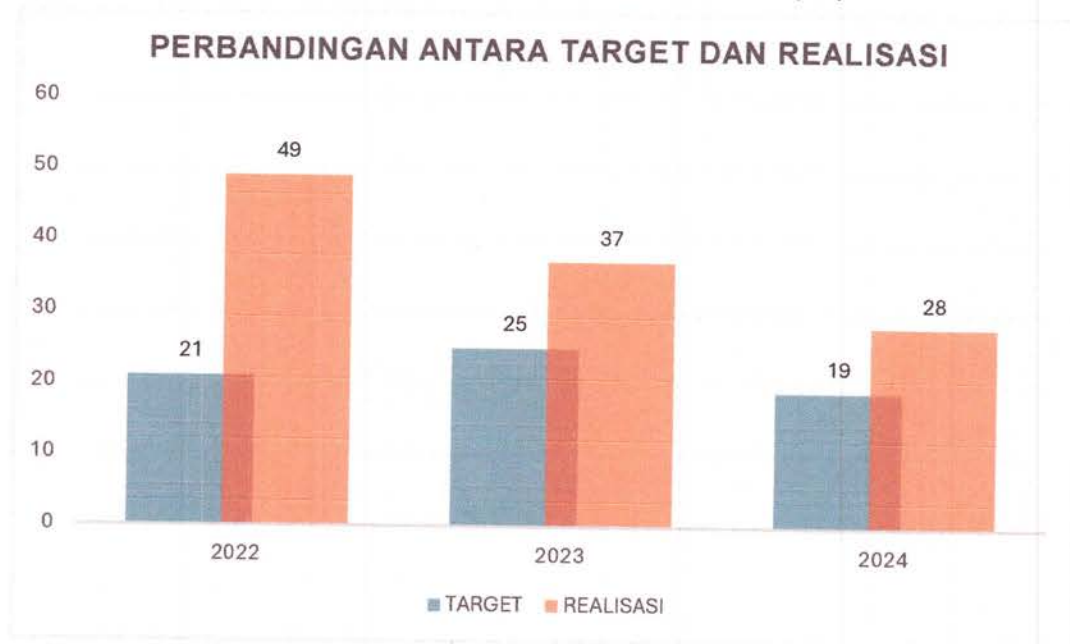
Tahun 2024 jumlah sindikat narkoba yang berhasil diungkap sebanyak 28 peta jaringan dari target capaian kinerja 19 jaringan. Dalam pengungkapan target jaringan tersebut ditemukannya hubungan dengan beberapa jaringan yang sudah dipetakan sehingga realisasi jaringan yang dapat diungkap sebanyak 28 peta jaringan yang terdiri dari 14 jaringan internasional dan 14 jaringan nasional. Dengan perincian sebagai berikut:

NO	JARINGAN NASIONAL		JARINGAN INTERNASIONAL
1	Rizal – Ganja Aceh	15	Tengku M. Shabu Aceh
2	Transporter Aceh -Jakarta	16	Paket Shabu Aris Malaysia
3	Pontianak – Madura	17	Paket Pos MDMB
4	Ganja Gayo Lues – Medan	18	Fariborz (Paket Pos Belanda)
5	Ganja Rasmi	19	Shabu India
6	Masa'it Shabu Kampung Boncos	20	Diego CL Bali
7	Oki Tulung Selapan	21	Ganja Mardiansyah Thailand
8	Shabu Padlah	22	Bang Lah Shabu Langsa
9	PCC Benny Setiawan	23	Atfan Heroin Kamboja
10	Amrizal Shabu Jabar	24	Ahmad Shabu Malaysia- Bengkalis-Dumai
11	Pay Shabu Palembang	25	Irfan Shabu Sumut - Jabar
12	Arif Shabu Lombok – Surabaya	26	Brighita Kokain (Amerika Latin – Indonesia – Thailand)
13	Muzakkir Kurir Terbang Aceh – Padang - Lombok	27	Hasan Shabu Sebatik, Kaltara – Palu, Sulawesi Tengah
14	Rusdi Shabu Medan - Tangerang	28	Paket Fedex Jakarta – Meksiko (Jaringan Kartel Narkoba)

Metode pengukuran jaringan sindikat kejahatan narkoba yang terungkap dengan kriteria sebagai berikut:

1. Jumlah tersangka dalam satu jaringan sindikat yang terungkap.
2. Peran dari masing-masing tersangka yang tertangkap dalam satu jaringan sindikat.
3. Modus operandi yang digunakan oleh jaringan.
4. Alur transaksi keuangan hasil tindak pidana narkoba.
5. Jenis narkoba yang berhasil disita.
6. Hubungan komunikasi antar aktor dalam jaringan.
7. Adanya anatomi jaringan sindikat narkoba.

8. Hasil pengungkapan jaringan sindikat narkoba direalisasikan dalam Laporan Kasus Narkoba (LKN) atau Laporan Polisi (LP).



Adapun faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan program adalah sebagai berikut:

1. Dukungan Teknologi Intelijen (TI) yang telah dimiliki oleh BNN.
2. Terjalannya kerjasama yang lebih baik antar penegak hukum baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dalam bentuk sharing informasi jaringan sindikat narkoba.
3. Komitmen yang kuat dari petugas pelaksana lapangan dalam pemberantasan narkoba yang dilakukan secara profesional.
4. Koordinasi yang semakin baik antara BNN Pusat dengan BNN Provinsi maupun aparat penegak hukum lainnya.
5. Laporan masyarakat yang langsung ditindaklanjuti oleh aparat BNN.
6. Kesigapan petugas dalam pengungkapan jaringan narkoba.

Sedangkan hambatan dan kendala dalam pelaksanaan program kegiatan adalah:

1. Dalam pemanfaatan peralatan teknologi intelijen, satuan kerja daerah masih sangat tergantung akan teknologi intelijen yang ada di pusat.
2. Terbatasnya SDM khususnya di BNNP dan BNN Kab./Kota yang mempunyai keahlian di bidang narkoba, khususnya punya kualifikasi

bidang analisis Intelijen dalam kegiatan pengumpulan data jaringan sindikat narkoba.

3. Untuk pelaksanaan kegiatan di wilayah, kurangnya persamaan pemahaman dalam pemetaan jaringan sindikat narkoba, sehingga capaian target kurang maksimal.
4. Peralatan Bantuan Teknologi Intelijen terbatas, sehingga tidak dapat memenuhi dalam semua kegiatan pengungkapan jaringan sindikat narkoba yang ada di daerah.
5. Pola komunikasi dari para pelaku yang menggunakan sarana media sosial (medsos) dan kemampuan peralatan di BNN belum mendukung terhadap pemantauan Media Sosial atau teknologi informasi yang berbasis internet yang mengakibatkan jaringan sindikat narkoba kurang termonitor dengan maksimal.
6. Standar Operasional Prosedur (SOP) belum dimanfaatkan secara maksimal.

Langkah antisipatif atau rekomendasi ke depan yang akan diambil adalah:

1. Perlu peningkatan sarana dan prasarana teknologi Intelijen yang ada untuk mendukung kegiatan BNNP dan BNN Kab/kota.
2. Perlu peningkatan jumlah personil yang bertugas dalam penanganan intelijen (analisis intelijen, petugas lapangan, dan sumber informasi intelijen).
3. Perlu peningkatan kemampuan tenaga analisis intelijen dengan memberikan pengarahan tugas, pelatihan teknis analisis atau bimbingan teknis (bimtek) dan pemetaan jaringan.
4. Perlu peningkatan kualitas sarana dan prasarana bidang intelijen.
5. Meningkatkan koordinasi antara penyelidik dan penyidik dan antar aparat penegak hukum lainnya di luar BNN.
6. Perlu optimalisasi Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada dalam setiap pelaksanaan tugas operasional.

Bentuk efisiensi dalam mewujudkan rekomendasi tersebut adalah dukungan berupa data hasil analisis jaringan narkoba yang ada di BNNP akan dikembangkan oleh personil di BNN. Kemudian, jika data hasil analisis jaringan sudah siap, maka dilanjutkan ke tahap penyelidikan guna pemutusan sel jaringan sindikat narkoba. Dengan demikian, keterbatasan sumber daya manusia terbantu dengan ketersediaan sarana teknologi intelijen sehingga mampu

mencapai target yang telah ditetapkan. Sebagian jaringan sindikat narkoba yang berhasil diungkap pada Tahun 2024 merupakan jaringan sindikat narkoba baru dan sebagiannya merupakan pengembangan hasil analisis data terhadap kasus atau jaringan yang berhasil diungkap pada tahun-tahun sebelumnya.

2. Persentase penyelesaian penyidikan asset (TPPU) tersangka tindak pidana narkoba hasil tindak pidana narkoba

Penyelesaian penyidikan asset (TPPU) tersangka tindak pidana narkoba hasil tindak pidana narkoba merupakan berkas tindak pidana pencucian uang yang terkait tindak pidana asal narkoba dan prekursor narkoba yang terungkap dan dilakukan penyidikan, setelah dinyatakan lengkap oleh Jaksa Peneliti yang kemudian penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum (Tahap II).

Pengukuran berkas perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P-21 adalah perbandingan kasus perkara dengan target berkas perkara tindak pidana pencucian uang hasil dari tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang masih dalam penyidikan.

Adapun hasil pengukuran berkas perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P-21, sebagai berikut:

1. Jumlah kasus TPPU yang ditangani selama Tahun 2024 adalah 18 berkas.
2. Kasus TPPU yang sudah P21 hingga berakhirnya Tahun 2024 adalah 18 berkas dari 20 berkas yang menjadi target Tahun 2024.

Data yang didapatkan terkait realisasi target pengungkapan TPPU Narkoba sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Persentase penyelesaian penyidikan asset (TPPU) tersangka tindak pidana narkoba hasil tindak pidana narkoba	20 Berkas	18 Berkas	90 %

Jumlah Penyelesaian Penyidikan Aset (TPPU) Tersangka Tindak Pidana Narkotika Hasil Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Renstra BNN Tahun 2020 – 2024.

Perbandingan dengan jumlah target Renstra BNN Tahun 2020-2024.

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase penyelesaian penyidikan aset (TPPU) tersangka tindak pidana narkotika hasil tindak pidana narkotika	100%	100%	100%	100%	100%

Perbedaan target Renstra BNN Tahun 2020 – 2024 dengan target kinerja tahun 2024 tersebut terjadi karena terdapat dua faktor yang secara signifikan mempengaruhi capaian kinerja Deputy Pemberantasan pada tahun 2024.

Dua faktor tersebut adalah situasi kompleksitas jaringan sindikat narkotika yang mengalami perubahan signifikan dalam upaya mengelabui petugas dengan menggunakan teknologi informasi sehingga capaian kinerja Deputy Pemberantasan diturunkan jumlahnya dari target yang ditetapkan di Renstra BNN Tahun 2020 – 2024 untuk tahun 2024. Faktor kedua adalah kondisi internal BNN (SDM dan anggaran) yang mempengaruhi target capaian kinerja Deputy Pemberantasan.

Perlu difahami bahwa jaringan sindikat narkotika merupakan kejahatan yang terorganisir (*organized crime*) baik individu maupun kelompok yang melakukan perencanaan dan aktivitas ilegal yang terjadi di lebih dari satu wilayah atau negara. Salah satu bentuk *organized crime* ini adalah perdagangan Narkoba (National Institute of justice, 2007). Perkembangan kejahatan narkotika selalu mengalami dinamisasi di setiap waktu dan tempat. Apa yang terjadi di suatu negara akan mempengaruhi situasi kejahatan narkotika di negara lain misalnya peningkatan produksi opium dan amphetamine type stimulant (sabu dan ekstasi) di Myanmar (UNODC, 2022) akan mempengaruhi peredaran dan penyalahgunaan narkotika di negara tujuan seperti Indonesia.

Dalam konteks indikator kinerja, yang dimaksud dengan jumlah jaringan sindikat kejahatan narkotika yang terungkap adalah kelompok pelaku tindak pidana peredaran gelap narkotika yang terhubung, terorganisir, dan terstruktur antara

aktor - aktor jaringan yang memiliki peran berbeda seperti penyandang dana, pemilik narkoba, produsen, pengendali, bandar besar, bandar, penjual/pengedar, dan kurir yang berhasil diungkap. Bentuk jaringan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya dipengaruhi oleh situasi wilayah peredaran atau penyelundupan. Bentuk jaringan penyelundupan narkoba di Sumatera bagian utara dan di Kalimantan Barat berbeda satu sama lainnya seperti hasil penelitian yang dilakukan oleh Fathurrohman dan Gisela Bichler (2021).



Adapun penjelasan pada grafik di atas adalah sebagai berikut:

Capaian target berkas perkara yang terselesaikan dan atau P-21 Tahun 2024 adalah 18 Berkas Perkara P21.

Sebagai tindak lanjut dalam memaksimalkan pencapaian target kinerja pada Tahun 2024 untuk melemahkan jaringan peredaran gelap narkoba Direktorat Tindak Pidana Pencucian Uang merekomendasikan sebagai berikut:

1. Memaksimalkan monitoring dan evaluasi terhadap penanganan kasus Tindak Pidana Pencucian Uang yang ada di kewilayahan;
2. Mengusulkan penambahan tenaga penyidik khususnya penyidik Polri dan penyidik ASN yang telah mempunyai kompetensi dalam penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang dan memaksimalkan penyidik BNN;
3. Perlu Pelatihan dan Pembinaan lanjutan kepada penyidik, baik yang berada di pusat maupun di kewilayahan tentang penanganan kasus Tindak Pidana Pencucian Uang secara berkala;
4. Penanganan kasus Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan penyidik di kewilayahan masih perlu pendampingan dari BNN Pusat;

5. Meningkatkan koordinasi dengan lembaga perbankan, non perbankan maupun instansi terkait lainnya guna menyatukan pemahaman dalam penanganan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari narkoba dan prekursor narkoba;
6. Dibutuhkannya sistem informasi yang terintegrasi terkait penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari narkoba dan prekursor narkoba.

Berdasarkan capaian IKK dalam pemetaan jaringan sindikat narkoba, BNN telah melakukan pemetaan jaringan sindikat narkoba dengan target 19 peta jaringan, BNN berhasil memetakan sebanyak 28 peta jaringan terungkap.

Capaian IKK dalam pengungkapan jaringan sindikat narkoba digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel Capaian IKK Direktorat di lingkungan Deputi Pemberantasan:

NO	SATKER	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Direktorat Intelijen	19 Jaringan	36 Jaringan	157,89%
2	Direktorat P2	5 Berkas	3 Berkas	60 %
3	Direktorat Interdiksi	58 Berkas	79 Berkas	136.21 %
4	Direktorat Penindakan dan Pengejaran	100% DPO/TO	100% DPO/TO	100,00%
5	Direktorat Wastahti	100%	99%	99,99%
6	Direktorat TPPU	20 Berkas	18 Berkas	90,00%
7	Direktorat Narkoba	422 Berkas	736 Berkas	174,41%

Tabel tersebut menunjukkan bahwa target Berkas Perkara Dit. Intelijen adalah 19 Jaringan dengan realisasi 30 Jaringan. Dit. P2 memiliki target 5 BP dengan realisasi 3 BP dengan persentase 60%. Output capaian Dit. P2 adalah 13 Berkas Perkara. Namun, baru 3 BP yang telah P-21 sedangkan sisanya masih proses penyidikan di tahun 2025 karena pengungkapan kasus terjadi pada akhir tahun (November 2024). Dit. Interdiksi 58 BP dengan realisasi 79 BP dengan

persentase 136.21 %. Adapun untuk Dit. Dakjar target berupa daftar pencarian orang (DPO) berupa persentase yaitu DPO 100% dan Target Operasi (TO) 100%. Dit. Wastahti target berupa nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan tahun 2024 memiliki target 100% dengan realisasi 99,99%. Hal ini terjadi karena adanya 1 orang tahanan yang meninggal pada BNNP Kalimantan Utara karena sakit.

Apa yang dipaparkan pada bagian sebelumnya merupakan bentuk keberhasilan tugas dari seluruh personil Deputy bidang Pemberantasan BNN. Oleh karena itu, besar harapan kami pada tahun berikutnya kegiatan yang telah dilaksanakan dapat terus dikembangkan secara terukur, terarah, dan terencana demi tercapainya cita-cita mulia Indonesia Bersinar.

BAB IV AKUNTABILITAS KEUANGAN

A. PENETAPAN ANGGARAN

Anggaran Unit Kerja Pusat adalah Rp. 139.553.036.000.- (Seratus Delapan Belas Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Rupiah) dengan komposisi sebagai berikut:

UNIT KERJA	PAGU ANGGARAN
Direktorat Intelijen	13.254.609.000
Direktroat Narkotika	30.840.043.000
Direktorat P2	3.980.043.000
Direktorat Interdiksi	10.315.536.000
Direktorat TPPU	10.565.001.000
Direktorat Penindakan dan Pengejaran	10.283.569.000
Direktorat Wastahti	10.319.614.000
Kegiatan Penyelenggaraan Ketatausahaan. Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana	49.994.621.000
TOTAL	139.553.036.000

Dari jumlah tersebut terdapat anggaran yang didistribusikan ke BNNP sejumlah Rp. 30.248.626.100 (Tiga Puluh Miliar Dua Ratus Empat Puluh Delapan Juta Enam Ratus Dua Puluh Enam Ribu Seratus Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

NO	DIREKTORAT	DISTRIBUSI BNNP	KETERANGAN
1	INTELIJEN	3.202.066.000	34 PROVINSI
2	NARKOTIKA	19.329.175.100	BERKAS PERKARA DI 34 PROVINSI DAN OPERASI LADANG GANJA DI 3 PROVINSI
3	WASTAHTI	7.717.385.000	LAYANAN TAHANAN BARANG BUKTI DAN TAT 34 PROVINSI
TOTAL		30.248.626.100	

B. REALISASI PENGGUNAAN ANGGARAN TAHUN 2024

Realisasi Penggunaan Anggaran Deputi Bidang Pemberantasan Tahun 2024

NO	SATUAN KERJA	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN TAMBAHAN DAN SETELAH AA	REALISASI	SISA	%
1	Direktorat Intelijen	13.254.609.000	21.431.016.000	21.285.715.276	145.300.724	99,32
2	Direktorat Narkotika	30.840.043.000	29.124.473.100	28.492.131.487	632.341.613	97,82
3	Direktorat Interdiksi	10.315.536.000	11.786.536.000	11.782.524.458	4.011.542	99,97
4	Direktorat Psikotropika dan Prekursor	3.980.043.000	4.406.952.000	4.400.699.000	6.253.000	99,86
5	Direktorat TPPU	10.565.001.000	10.901.371.000	10.825.064.067	76.306.933	99,30
6	Direktorat Penindakan dan Pengejaran	9.409.469.000	13.768.883.000	13.762.023.370	6.859.630	99,95
7	Direktorat Wastahti	10.347.614.000	3.046.414.000	3.029.007.067	17.406.933	99,43
8	Dukungan Manajemen	49.994.621.000	47.489.252.000	46.641.283.773	847,968,227	98,21
TOTAL		139.553.036.000	141.954.897.100	140.218.448.498	1.736.448.602	98,77

Dari tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp. 1.736.448.602 ,- atau anggaran terserap sebesar 98,77%.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari uraian tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja program berupa jumlah jaringan sindikat tindak pidana narkoba yang diungkap pada Tahun 2024 berhasil mengungkap 28 Jaringan sindikat narkoba dengan rincian 14 jaringan sindikat narkoba Internasional dan 14 jaringan sindikat narkoba nasional. Jumlah Narkoba yang berhasil disita pada Tahun 2024.
2. Indikator Kinerja program berupa persentase penyelesaian penyidikan aset (TPPU) tersangka tindak pidana narkoba hasil tindak pidana narkoba, Pada Tahun 2024 mengungkap aset TPPU sebesar Rp.93.148.391.170,40,-.
3. Walaupun akuntabilitas kinerja Deputy Bidang Pemberantasan secara umum berhasil mencapai target yang telah ditetapkan namun masih perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan capaian tersebut, antara lain:
 - a. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas penyelidik, penyidik, dan analis intelijen melalui pendidikan dan latihan di dalam maupun di luar negeri.
 - b. Menambah dan melengkapi peralatan intelijen untuk mengimbangi modus operandi yang berkembang.
 - c. Mengoptimalkan sistem analisa data intelijen yang sudah ada untuk mendukung keakurasian penentuan dan penetapan target operasi serta penentuan cara bertindak di lapangan.
 - d. Mengoptimalkan penelusuran dan penyitaan aset para pelaku kejahatan narkoba dan prekursor narkoba dalam rangka menghentikan aktivitas peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba dengan mengoptimalkan proses penyidikan tindak pidana asal (TPA).

B. SARAN

1. Untuk pelaksanaan program P4GN pada bidang pemberantasan dibutuhkan penambahan pegawai untuk mengisi jabatan fungsional penyidik, analis intelijen, dan petugas tahanan. Dalam rangka pembinaan karir dibutuhkan penyesuaian jabatan fungsional yang bersumber dari pegawai penugasan Polri.
2. Untuk pelaksanaan dukungan manajemen pada bidang pemberantasan dibutuhkan penambahan pegawai untuk mengisi jabatan pengelola keuangan, PPK, dan perencana yang berkompeten. Selain itu, juga dibutuhkan pengalokasian P3K yang bersumber kepada PPNP BNN yang telah ditetapkan dalam Keputusan Kepala BNN.
3. Untuk pelaksanaan tugas kewilayahan dibutuhkan penambahan anggaran pada bidang intelijen dan TAT sehingga pelayanan publik pada bidang pemberantasan kewilayahan lebih optimal.

**DEPUTI PEMBERANTASAN
BADAN NARKOTIKA NASIONAL**

I WAYAN SUGIRI, S.H.,S.I.K.,M.Si.

LAMPIRAN

1. Direktorat Intelijen

Unit Eselon II	:	Direktorat Intelijen
Kegiatan	:	Pelaksanaan Intelijen Berbasis Teknologi
Sasaran	:	Meningkatkan Pemetaan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Yang Berhasil Dipetakan
Indikator Kinerja Kegiatan	:	Jumlah Jaringan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika Yang Berhasil Dipetakan
Target Kegiatan	:	19 Peta Jaringan
Capaian Kegiatan	:	28 Peta Jaringan
Indikator Kinerja Output	:	Laporan Informasi Intelijen Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika
Capaian Kinerja Output	:	107 Laporan Informasi Intelijen
ANGGARAN		
Pagu Awal Anggaran	:	Rp. 13.254.609.000
Pagu Setelah AA	:	Rp. 21.431.016.000
Realisasi	:	Rp. 21.285.715.276
Pagu Dukungan Manajemen	:	Rp. 47.489.252.000
Realisasi Dukmen	:	Rp. 46.641.283.773

a. Penetapan Kinerja Direktorat Intelijen

Penetapan Kinerja Direktorat Intelijen Tahun Anggaran 2024 memiliki sasaran strategis meningkatnya pemetaan jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba dengan target total sebanyak 19 peta jaringan sindikat narkoba yang dipetakan. Adapun sasaran strategis dengan indikator utama yang menjadi target Direktorat Intelijen Tahun 2024 sebagai berikut:

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
Meningkatnya pemetaan jaringan sindikat peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.	Jumlah jaringan sindikat peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang berhasil dipetakan.	19 Peta Jaringan

Pagu awal anggaran Direktorat Intelijen Deputi Bidang Pemberantasan BNN Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan sebesar:

1. Kegiatan Pelaksanaan Intelijen Berbasis Teknologi. Rp. 13.254.609.000
2. Kegiatan Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga, dan Pengelolaan Sarana Prasarana Rp. 39.748.012.000

Selama tahun 2024, Anggaran Direktorat Intelijen mengalami pemblokiran *Automatic Adjustment* dalam rangka Pelaksanaan APBN Tahun 2024 dan penambahan anggaran pada semester kedua karena adanya pembukaan blokir *Automatic Adjustment*. Sehingga Anggaran Direktorat Intelijen menjadi:

1. Kegiatan Pelaksanaan Intelijen Berbasis Teknologi. Rp. 24.633.082.000
2. Kegiatan Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga, dan Pengelolaan Sarana Prasarana Rp. 47.489.252.000

b. Capaian Kinerja Direktorat Intelijen

Direktorat Intelijen Deputi Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional menjalankan Program Pelaksanaan Intelijen Berbasis Teknologi sebagaimana telah ditetapkan dalam rencana kerja tahunan pada tahun 2024. Adapun Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Dit. Intelijen Tahun 2024 sebagai berikut:

PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN	VOLUME OUTPUT
Pelaksanaan Intelijen Berbasis Teknologi	Meningkatkan pemetaan jaringan sindikat peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.	Jumlah jaringan sindikat peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang berhasil dipetakan.	19 peta jaringan	Laporan Informasi Intelijen Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika	Laporan Informasi	107 Laporan Informasi (47 BNN Pusat dan 60 BNNP)

Tabel Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Dit. Intelijen

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Direktur Intelijen bahwa Capaian Kinerja Direktorat Intelijen diukur dari satu indikator yaitu berupa target Peta Jaringan. Sedangkan Capaian Kinerja Output diukur dari Jumlah Laporan Informasi Intelijen Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika. Pada tahun berjalan, terdapat penambahan volume Indikator Kinerja Output pada Direktorat Intelijen yang semula sebanyak 35 laporan menjadi 47 laporan. Sehingga total IKK yang semula 95 laporan menjadi 107 laporan. Adapun Realiasi Capaian Kinerja sebagai berikut:

1. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2024

Sasaran strategis Direktorat Intelijen berupa meningkatkan pemetaan jaringan sindikat peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Pada tahun 2024 Target Indikator Kinerja sebanyak 19 peta jaringan sindikat peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang berhasil dipetakan. Definisi Pemetaan jaringan sindikat peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika adalah penggambaran yang didalamnya berisi fakta-fakta detail tentang aktivitas, pola komunikasi, dan peran dari sejumlah orang yang memiliki ikatan saling bekerja sama dalam kejahatan narkotika berdasarkan hasil penyelidikan berbasis IT baik yang berhasil diungkap dan yang belum diungkap.

Jika dibandingkan dalam lima tahun, target indikator mengalami penurunan.

Hal ini sejalan dengan adanya kebijakan pemerintah dalam penghematan anggaran. Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa pada tahun 2020 dan 2021 target capaian indikator kinerja BNN Pusat dan BNNP terpisah, Target BNN Pusat pada tahun 2020 sebanyak 23 peta jaringan dan BNNP sebanyak 46 peta jaringan, sehingga total target peta jaringan sindikat peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang berhasil dipetakan sebanyak 69 Jaringan. Sedangkan pada tahun 2021, terjadi penurunan jumlah target dari total 69 menjadi 47 peta jaringan. Komposisinya yaitu 20 target merupakan pemetaan jaringan pada BNN Pusat dan 27 pemetaan jaringan yang dilakukan oleh BNNP.

Skema target IKK ini mengalami perubahan mulai tahun 2022. Target IKK BNN Pusat dan BNNP menjadi satu. Adapun pada tahun 2022 target pemetaan jaringan mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu menjadi 28 Jaringan Sindikat Peredaran Gelap Narkoba yang berhasil dipetakan. Pada tahun ini, target Peta Jaringan adalah 25 Peta Jaringan. Di tahun 2023, Indikator Kinerja Kegiatan merupakan kegiatan yang penyelenggaraan dilakukan secara bersama oleh BNN Pusat dan BNNP. Sehingga untuk memudahkan pelaksanaan fungsi intelijen dalam pencapaian IKK tersebut BNN Pusat menargetkan 20 Peta Jaringan dan BNNP sebanyak 5 Peta Jaringan.

Pada tahun 2024, target IKK menjadi 19 Peta Jaringan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pemetaan jaringan yang sudah baik selama ini. Target ini sudah diselenggarakan secara bersama oleh Direktorat Intelijen bersama dengan BNNP. Dikaitkan dengan adanya penambahan anggaran bidang intelijen di semester, tidak mempengaruhi jumlah target IKK. Dimana sebelumnya direncanakan 19 jaringan yang terpetakan dan hingga di penghujung tahun target ini tetap 19 Peta Jaringan.

Berdasarkan Rencana Strategis Deputi Bidang Pemberantasan Tahun 2020-2024, terdapat perbedaan skema target Indikator Kinerja tersebut. Adapun skema target IKK pada Renstra tahun 2020 s.d. 2024 sebagai berikut:

Berdasarkan target dan dukungan anggaran Direktorat Intelijen maka Capaian Indikator Kinerja Direktorat Intelijen adalah sebagaimana tabel berikut:

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2024		
			TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya pemetaan jaringan sindikat peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.	Jumlah jaringan sindikat peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang berhasil dipetakan.	19 Jaringan	TOTAL 36 Jaringan	157,89%
				25 Jaringan (BNN Pusat)	
				11 Jaringan (BNNP)	

Tabel Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Intelijen Tahun 2024

Capaian Direktorat Intelijen berdasarkan IKK pada tahun 2024 adalah sebanyak 36 Peta Jaringan yang berhasil dipetakan. Sehingga persentasenya mencapai 157,89%. Capaian ini merupakan hasil capaian peta jaringan sindikat peredaran gelap narkoba yang berhasil dipetakan di BNN Pusat dan BNNP. Adapun Peta Jaringan yang berhasil dipetakan oleh BNN Pusat adalah 25 Peta Jaringan dan BNNP berhasil memetakan 11 Peta Jaringan.

Adapun jika dilihat dari skala jaringan sindikat narkoba yang dipetakan terdiri dari 14 Jaringan Internasional dan sisanya 15 Jaringan Lokal/Nasional. Hal ini digambarkan sebagaimana tabel berikut:

NO	KLASIFIKASI JARINGAN	
	NASIONAL	INTERNASIONAL
1	2	3
1	22 Peta Jaringan	14 Peta Jaringan

Tabel Klasifikasi Skala Jaringan Capaian IKK Tahun 2024

Dari tabel di atas terlihat bahwa jumlah jaringan nasional yang berhasil dipetakan lebih banyak dari Jaringan internasional. Dimana pada tahun 2024 terdapat 22 Jaringan Nasional dan 14 Jaringan Internasional.

2. Capaian Indikator Kinerja Output Tahun 2024

Dari Sasaran Kegiatan yang telah diuraikan sebelumnya, maka kegiatan Pemetaan Jaringan Berbasis IT yang dilakukan Direktorat Intelijen memiliki 1 (satu) Output yaitu Laporan Informasi Intelijen Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Terkait dengan penyelenggarannya, maka dukungan anggaran terhadap capaian output pada tahun 2024 juga disebarkan ke BNNP. Adapun rencana capaian output Direktorat Intelijen pada mulanya sebanyak 94 Laporan Informasi Intelijen (LII).

Pada pertengahan tahun, seiring dengan kebijakan penguatan fungsi intelijen di BNN, maka terdapat penambahan anggaran sehingga Indikator Kinerja Output di Direktorat Intelijen bertambah sebanyak 12 Laporan Informasi Intelijen (LII). Sehingga yang semula 35 LII menjadi 47 LII. Sehingga total Indikator Kinerja Output menjadi 107 Laporan Informasi Intelijen (LII). Adapun rinciannya sebagaimana berikut:

NO	OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT		TARGET 2024		
				TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE
1	2	3	4	5	6	7
1.	Laporan Informasi Intelijen Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	Laporan Informasi	Total	107 Laporan Informasi	157 Laporan Informasi	146,72%
			BNN Pusat	47 Laporan Informasi	98 Laporan Informasi	
			BNNP	60 Laporan Informasi	59 Laporan informasi	

Tabel Capaian Indikator Kinerja Output Tahun 2024

Pada tabel di atas diketahui bahwa total target Capaian Kinerja Output adalah 107 LII, dengan komposisi 47 LII merupakan target BNN Pusat dalam hal ini Direktorat Intelijen dan 60 LII merupakan target dari 34 BNNP seluruh Indonesia. Dimana anggarannya diambil dari Sebaran Anggaran Direktorat Intelijen sebagai pengampu fungsi intelijen di daerah. Pada tahun

2024 hasil capaian kinerja output Direktorat Intelijen adalah 157 Laporan Informasi Intelijen. Dengan presentase 146,72%. Adapun Hasil Rincian Capaian Kinerja Output Tahun 2024 pada BNN Pusat dan BNNP sebagai berikut:

a. Capaian Indikator Kinerja Output BNN Pusat

NO	OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT	TARGET 2023		
			TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE
1	2	3	4	5	6
1	Laporan Informasi Intelijen Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	Laporan Informasi	47 Laporan Informasi Intelijen	98 Laporan Informasi Intelijen	208,51%

Tabel Capaian Indikator Kinerja Output BNN Pusat Tahun 2024

Capaian Indikator Kinerja Direktorat Intelijen pada tahun 2024 adalah sebanyak 98 Laporan Informasi Intelijen dari 47 target LII yang ditetapkan. Sehingga persentase capaian yaitu 208,85%.

b. Capaian Indikator Kinerja Output BNNP

Capaian Kinerja Output BNNP didukung oleh anggaran yang didapatkan dari Direktorat Intelijen selaku Pembina fungsi di bidang Intelijen. Dengan target 60 LII, maka masing-masing BNNP mendapatkan target Laporan Informasi Intelijen yang berbeda-beda sesuai dengan hasil evaluasi dari capaian tahun sebelumnya. Adapun rincian target dan capaian Indikator Kinerja Output Bidang Intelijen pada BNNP tahun 2024 sebagai berikut:

NO	UNIT VERTIKAL	TARGET		CAPAIAN	
		KOMPONEN	TARGET OUTPUT	CAPAIAN OUTPUT	%
1	2	3	4	5	6
1	BNNP NANGGROE ACEH DARUSSALAM	053 Pengumpulan Informasi Intelijen	1	1	100%
2	BNNP SUMATERA UTARA		3	1	33,33%
3	BNNP SUMATERA BARAT		1	2	200%
4	BNNP RIAU		2	2	100%
5	BNNP JAMBI		1	1	100%
6	BNNP SUMATERA SELATAN		2	2	100%
7	BNNP LAMPUNG		2	2	100%
8	BNNP KEPULAUAN BANGKA BELITUNG		1	2	200%
9	BNNP KEPULAUAN RIAU		1	1	100%
10	BNNP BENGKULU		1	1	100%
11	BNNP DKI JAKARTA		3	3	100%
12	BNNP BANTEN		2	2	100%
13	BNNP JAWA BARAT		3	3	100%
14	BNNP JAWA TENGAH		3	3	100%
15	BNNP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA		2	2	100%
16	BNNP JAWA TIMUR		3	3	100%
17	BNNP KALIMANTAN BARAT		3	3	100%
18	BNNP KALIMANTAN TENGAH		2	2	100%
19	BNNP KALIMANTAN SELATAN		2	2	100%

NO	UNIT VERTIKAL	TARGET		CAPAIAN	
		KOMPONEN	TARGET OUTPUT	CAPAIAN OUTPUT	%
20	BNNP KALIMANTAN TIMUR		2	2	100%
21	BNNP KALIMANTAN UTARA		2	2	100%
22	BNNP SULAWESI UTARA		1	1	100%
23	BNNP SULAWESI TENGAH		1	1	100%
24	BNNP SULAWESI SELATAN		1	1	100%
25	BNNP SULAWESI TENGGARA		3	3	100%
26	BNNP SULAWESI BARAT		1	1	100%
27	BNNP MALUKU		1	0	0%
28	BNNP MALUKU UTARA		1	1	100%
29	BNNP BALI		3	3	100%
30	BNNP NUSA TENGGARA BARAT		1	1	100%
31	BNNP NUSA TENGGARA TIMUR		1	1	100%
32	BNNP GORONTALO		1	1	100%
33	BNNP PAPUA		1	1	100%
34	BNNP PAPUA BARAT		1	1	100%

Tabel Capaian Indikator Kinerja Output BNNP Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas, Capaian Kinerja Output BNNP adalah 59 Laporan Informasi Intelijen dari 60 LII yang ditargetkan. Adapun total persentase adalah 98,33%. Pada hasil capaian kinerja output terdapat dua BNNP yang nilai pencapaiannya di bawah target yang ditetapkan, sehingga persentase capaian di bawah 100%. Namun secara keseluruhan capaian kinerja output BNNP sudah memenuhi target.

Pelaporan data capaian ini merupakan pelaporan yang disampaikan oleh BNNP hingga 16 Januari 2025. Sesuai pelaporan tersebut dapat dilihat bahwa rata-rata BNNP sudah berhasil mencapai target dengan persentase capaian 100%.

Pada tahun 2024, capaian kinerja Direktorat Intelijen mencapai 36 Pemetaan Jaringan. Capaian ini berada di atas target PK yaitu 19 Pemetaan Jaringan nilai persentase capaian 157,89%. Adapun jika dibandingkan dengan target Renstra maka capaian berada di bawah target tahun 2024 sebanyak 88 pemetaan jaringan. Hal ini, tidak terlepas dari kebijakan penggunaan anggaran dimana, terdapat kebijakan optimalisasi anggaran sehingga terdapat upaya penyesuaian target kinerja dengan anggaran yang tersedia. Serta terdapat pergeseran orientasi pada kualitas jaringan yang dipetakan dibandingkan jumlah jaringan.

Adapun Capaian Kinerja Output Direktorat Intelijen dari tahun 2020 s.d. 2024 sebagaimana tabel berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA OUTPUT		TAHUN *)SATUAN LAPORAN									
			2020		2021		2022		2023		2024	
			TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Laporan Informasi Intelijen	Total	175	176	191	185	136	153	125	149	107	157
		BNN Pusat	84	85	75	84	69	76	60	77	47	98
		BNNP	91	91	116	101	67	77	65	72	60	59

Tabel Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2020 s.d. 2024

Secara keseluruhan, analisis capaian kinerja Direktorat Intelijen dari tahun 2020 hingga 2024 mencerminkan komitmen yang konsisten terhadap misi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Peningkatan kinerja, terutama pada tahun 2022 dan 2024, menunjukkan adaptabilitas dan efektivitas Direktorat Intelijen dalam menjawab tantangan yang terus berkembang di bidangnya. Meskipun terdapat fluktuasi, namun tetap memberikan keyakinan bahwa Direktorat Intelijen terus berupaya untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat dari ancaman narkotika.

c. Akuntabilitas Keuangan Direktorat Intelijen

1. Realisasi Direktorat Intelijen

Pagu Anggaran Direktorat Intelijen sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Direktorat Intelijen yang ditandatangani oleh Direktur Intelijen antara lain yang terdiri dari dua poin anggaran yaitu 1) Anggaran kegiatan pelaksanaan intelijen berbasis teknologi sebanyak Rp. 13.254.609.000,- dan 2) Anggaran kegiatan penyelenggaraan ketatausahaan, rumah tangga dan pengelolaan sarana dan prasarana sebanyak 39.748.012.000,-.

Pada periode Tahun Anggaran 2024, Anggaran Direktorat Intelijen mengalami pemblokiran *Automatic Adjustment*. Namun, pada 24 Agustus 2024, terdapat pengesahan pembukaan blokir terhadap *Automatic Adjustment*. Selanjutnya dilakukan pergeseran anggaran untuk Bidang Pencegahan yang diambilkan dari anggaran Direktorat Intelijen sebanyak Rp. 1.000.000.000,- demi mendukung kegiatan P4GN bidang Pencegahan. Sehingga Pagu Revisi Dit. Intel untuk mata anggaran 3251 menjadi Rp. 21.431.016.000,- dan mata anggaran 3239 menjadi Rp. 47.489.252.000,-. Berikut pagu dan realisasi Anggaran Direktorat Intelijen tahun 2024:

- a. Realisasi Anggaran Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Pada Kegiatan Pelaksanaan Intelijen Berbasis Teknologi (Mata Anggaran 3251).

NO	KOMPONEN	PAGU REVISI*	REALISASI*	SISA*)	DAYA SERAP
1	2	3	4	5	6
	Output ; BKA 001 Laporan Informasi Intelijen Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	21.431.016.000	21.285.715.276	145.300.724	99,32%
1.	051 Pembinaan Teknis Intelijen	322.955.000	306.265.338	16.689.662	94,83%
2.	053 Pengumpulan Informasi Intelijen	15.488.663.000	15.301.358.292	187.304.708	98,79%
3.	054 Analisa Pemetaan Informasi Intelijen	4.244.650.000	4.242.869.500	1.780.500	99,96%
4.	055 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Intelijen	26.520.000	26.520.000	0	100%
5.	056 Pelaksanaan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Bidang Pemberantasan	1.348.228.000	638.790.514	209.681.713	84,45%

Tabel Realisasi Anggaran Tahun 2024 Mata Anggaran 3251

Ket: *) Satuan dalam Rupiah

- b. Realisasi Anggaran Program Dukungan Manajemen Pada Kegiatan Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga, dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana (Mata Anggaran 3239)

NO	KOMPONEN	PAGU REVISI*	REALISASI*	SISA*	DAYA SERAP
1	2	3	4	5	6
	WA 3239 Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga, dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana	47.489.252.000	46.641.283.773	847.968.227	98,21%

NO	KOMPONEN	PAGU REVISI*	REALISASI*	SISA*	DAYA SERAP
1.	CCF.001 Pemeliharaan Alat Khusus Teknologi Intelijen	30.212.481.000	30.038.140.000	174.341.000	99,42%
2.	CCF.002 Pemeliharaan Sarana Operasi Direktorat Intelijen	3.928.981.000	3.903.746.915	25.234.085	99,36%
3.	CCF.003 Pemeliharaan Perawatan Unit K- 9 Satwa Pelacak	4.249.990.000	4.234.283.700	15.706.300	99,63%
4.	CCF.006 Pemeliharaan dan Perawatan Alat Incenerator	383.158.000	232.757.800	41.201.770	89,25%
5.	CCF.007 Pemeliharaan Sarana Operasi Direktorat Penindakan dan Pengejaran	2.033.680.000	1.908.360.000	125.320.000	93,84%
6.	EBA.994 Layanan Perkantoran	6.680.962.000	6.214.796.928	466.165.072	93,02%

Tabel 3.10 Realisasi Anggaran Tahun 2024 Mata Anggaran 3239

Ket: *) Satuan dalam Rupiah

2. Realisasi Sebaran Anggaran Ke BNNP

Disamping anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan Direktorat Intelijen pada BNN Pusat. Direktorat Intelijen juga mendistribusikan anggaran bidang intelijen pada BNNP di seluruh Indonesia. Adapun Direktorat Intelijen sebagai pembina fungsi Pelaksanaan Intelijen berbasis Teknologi mendistribusikan anggaran ke 34 BNNP sebanyak Rp. 3.600.000.000,- kemudian dilakukan revisi optimalisasi pemblokiran *Automatic Adjustment*. Sehingga Anggaran bidang Intelijen menjadi Rp. 3.202.066.000,-. Adapun rincian realisasi pada masing-masing BNNP adalah sebagai berikut:

NO.	UNIT VERTIKAL	PAGU REVISI*	REALISASI*	DAYA SERAP
1	2	3	4	6
1	BNNP NANGGROE ACEH DARUSSALAM	60.000.000	59.961.120	99,94%
2	BNNP SUMATERA UTARA	200.000.000	197.223.497	98,61%
3	BNNP SUMATERA BARAT	50.000.000	50.000.000	100%
4	BNNP RIAU	167.500.000	167.092.004	99,76%
5	BNNP JAMBI	50.000.000	50.000.000	100%
6	BNNP SUMATERA SELATAN	100.000.000	99.976.327	99,98%
7	BNNP LAMPUNG	90.000.000	90.000.000	100%
8	BNNP KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	50.000.000	49.565.515	99,13%
9	BNNP KEPULAUAN RIAU	50.000.000	50.000.000	100%
10	BNNP BENGKULU	43.259.000	43.259.000	100%
11	BNNP DKI JAKARTA	211.050.000	150.159.200	71,15%
12	BNNP BANTEN	125.000.000	125.000.000	100%
13	BNNP JAWA BARAT	149.000.000	149.000.000	100%
14	BNNP JAWA TENGAH	185.000.000	185.000.000	100%
15	BNNP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	66.000.000	65.475.100	99,20%
16	BNNP JAWA TIMUR	100.050.000	169.042.457	168,96%
17	BNNP KALIMANTAN BARAT	150.000.000	149.265.200	99,51%

NO.	UNIT VERTIKAL	PAGU REVISI*	REALISASI*	DAYA SERAP
18	BNNP KALIMANTAN TENGAH	100.000.000	99.992.864	99,99%
19	BNNP KALIMANTAN SELATAN	110.000.000	109.980.000	99,98%
20	BNNP KALIMANTAN TIMUR	130.000.000	129.934.121	99,95%
21	BNNP KALIMANTAN UTARA	110.000.000	98.910.700	89,92%
22	BNNP SULAWESI UTARA	50.000.000	49.874.270	99,75%
23	BNNP SULAWESI TENGAH	50.000.000	50.000.000	100%
24	BNNP SULAWESI SELATAN	50.000.000	49.877.471	99,75%
25	BNNP SULAWESI TENGGARA	165.000.000	130.912.360	79,34%
26	BNNP SULAWESI BARAT	50.000.000	49.953.500	99,91%
27	BNNP MALUKU	50.000.000	50.000.000	100%
28	BNNP MALUKU UTARA	60.000.000	60.000.000	100%
29	BNNP BALI	130.000.000	129.996.300	99,99%
30	BNNP NUSA TENGGARA BARAT	70.207.000	70.067.412	99,80%
31	BNNP NUSA TENGGARA TIMUR	75.000.000	75.000.000	100%
32	BNNP GORONTALO	30.000.000	30.000.000	100%
33	BNNP PAPUA	50.000.000	50.000.000	100%
34	BNNP PAPUA BARAT	75.000.000	74.985.780	99,98%

Tabel 3.8 Realisasi Anggaran Bidang Intelijen Pada BNNP Tahun 2024

Ket: *) Satuan dalam Rupiah

Secara keseluruhan, realisasi anggaran bidang intelijen yang disebar ke BNNP pada tahun 2024 sudah dapat dimanfaatkan secara maksimal. Sesuai dengan pelaporan yang dikirimkan BNNP pada aplikasi Monev Bappenas dan ke Direktorat Intelijen yang dilaporkan per tanggal 16 Januari 2024 total realisasi adalah RP. 3.159.504.198,- dengan persentase 98,67. Capaian ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu 93,38%. Berdasarkan realisasi anggaran output BNNP Bidang Intelijen komponen pengumpulan informasi intelijen hampir semua BNNP memiliki realisasi hampir dan mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat upaya untuk memenuhi capaian sebagaimana telah ditargetkan.

2. Direktorat Narkotika

Unit Eselon II	:	Direktorat Narkotika
Kegiatan	:	Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Narkotika
Sasaran	:	Meningkatnya Pengungkapan Tindak Pidana Narkotika Dan Lahan Tanaman Ganja Dan Tanaman Terlarang Lainnya
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. Jumlah Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika Yang P21
	:	2. Jumlah titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya yang dimusnahkan
Target Kegiatan	:	1. 412 Berkas Perkara P-21
	:	2. 11 Titik Lokasi Lahan Ganja
Capaian Kegiatan	:	1. 733 Berkas Perkara P-21
	:	2. 14 Titik Lokasi Lahan Ganja
ANGGARAN		
Pagu Awal Anggaran	:	Rp. 30.840.043.000
Pagu Setelah AA	:	Rp. 29.124.473.100
Realisasi	:	Rp. 28.492.131.487

a. Penetapan Kinerja Direktorat Narkotika

Penetapan Kinerja Direktorat Narkotika Deputi Bidang Pemberantasan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel Penetapan Kinerja Direktorat Narkotika/BNNP Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS (OUTCOME)	INDIKATOR OUTCOME	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan Tanaman terlarang lainnya	Jumlah Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika Yang P21	412 Berkas
	Direktorat Narkotika (Pusat)	Jumlah Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika Yang P21	30 Berkas
	34 BNNP	Jumlah Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika Yang P21	382 Berkas
2	Titik Lokasi Lahan Ganja dan Tanaman Terlarang Lainnya	Jumlah Titik Lahan Tanaman Ganja dan Tanaman Terlarang Lainnya yang dimusnahkan	11 Operasi

b. Capaian Kinerja Direktorat Narkotika

Sebagaimana telah ditetapkan dalam rencana kerja tahunan pada tahun 2024 dan setelah dilakukan 8 kali refocusing Direktorat Narkotika Deputi Bidang Pemberantasan mempunyai 2 Sasaran Strategis yang kemudian dijabarkan menjadi 3 Indikator Kinerja Utama (*output*). Ketiga indikator kinerja tersebut telah terealisasi dan bahkan capaiannya telah melebihi dari target yang telah ditetapkan. sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel Capaian Indikator Kinerja Utama Direktorat Narkotika Deputy Bidang
Pemberantasan Tahun 2024**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika Yang P21	412 Berkas	733 Berkas	177%
2.	Direktorat Narkotika (Pusat)	Jumlah Berkas Perkara Kasus Tindak Pidana Narkotika P21	30 Berkas	30 Berkas	100 %
3.	34 BNNP	Jumlah Berkas Perkara Kasus Tindak Pidana Narkotika P21	382 Berkas	703 Berkas	280%
4.	Titik Lokasi Lahan Ganja dan Tanaman Terlarang Lainnya	Jumlah Titik Lahan Tanaman Ganja dan Tanaman Terlarang Lainnya yang dimusnahkan	11 Operasi	14 Titik	127%
5.	Pusat/Direktorat Narkotika	Jumlah Titik Lahan Tanaman Ganja dan Tanaman Terlarang Lainnya	6 Titik Lokasi	9 Titik	150 %
6.	BNNP Nanggroe Aceh Darussalam	Jumlah Titik Lokasi Lahan Ganja dan Tanaman Terlarang Lainnya	2 Titik Lokasi	2 Titik	100 %
7.	BNNK Lhokseumawe	Jumlah Titik Lokasi Lahan Ganja dan Tanaman Terlarang Lainnya	1 Titik Lokasi	1 Titik	100 %
8.	BNNP Sumatera Utara	Jumlah Titik Lokasi Lahan Ganja dan Tanaman Terlarang Lainnya	2 Titik Lokasi	2 Titik	100 %

Berdasarkan capaian indikator Kinerja Utama Direktorat Narkotika Deputy Bidang Pemberantasan Tahun 2024, sebagaimana Tabel 2 tersebut diatas, realisasi capaian rata-rata melebihi target output.

c. Analisa Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024.

Evaluasi capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi, selanjutnya capaiannya dipersentasikan, sehingga dapat diketahui bahwa target yang telah ditetapkan dapat dicapai atau tidak tercapai atau bahkan terlampaui.

Secara umum 2 (dua) sasaran strategis yang terjabarkan dalam 2 (dua) indikator kinerja utama Direktorat Narkotika Deputy Bidang Pemberantasan BNN Tahun Anggaran 2024 seluruh target yang telah ditetapkan

realisasinya melebihi dari target yang telah ditetapkan.

Peningkatan tersebut disatu sisi dipengaruhi oleh semakin banyaknya orang yang berani mengambil risiko terlibat dalam peredaran gelap narkoba karena motivasi mendapatkan uang dalam jumlah besar dan masih lemahnya penegakan hukum terhadap para tersangka.

Untuk mempertahankan capaian kinerja tersebut di atas perlu dilakukan upaya-upaya menambah dan melengkapi peralatan IT, menambah atau meningkatkan alokasi anggaran untuk kegiatan penegakan hukum atau menekan supply narkoba dan prekursor narkoba ilegal yang masuk ke Indonesia dan terutama dengan penambahan tenaga penyidik di BNN.

Di sisi lain, BNN dihadapkan pada keterbatasan sarana prasarana pendukung seperti: ruang tahanan (sebagian besar BNNP belum mempunyai ruang tahanan karena kantor masih berstatus kontrak, sehingga harus menitipkan tahanan ke kantor kepolisian setempat), peralatan teknologi belum tersedia, terutama di wilayah pelabuhan tidak resmi dan tidak terjaga (masih banyak jalur tikus yang ditenggarai peredaran gelap narkoba).

d. Akuntabilitas Keuangan

Sesuai Dokumen Penetapan Kinerja BNN Tahun Anggaran 2024, Direktorat Narkoba Deputy Bidang Pemberantasan memiliki Pagu Anggaran Awal sebesar Rp. 30.840.043.000 (Tigapuluh Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Juta Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah) atas kebijakan Pemerintah dilakukan penghematan Anggaran (*Refocusing*) dan *Automatic Adjustment* (AA) sehingga mengalami perubahan Pagu Anggaran Akhir sebesar Rp. 29.124.473.100 (Duapuluh Sembilan Milyar Seratus Duapuluh Empat Juta Empat ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Seratus Rupiah).

Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung Kegiatan di Pusat/Direktorat Narkoba dan di Daerah/BNNP.

Direktorat Narkoba Deputy Bidang Pemberantasan BNN menerima anggaran sebesar Rp. 9.795.298.000,- (Sembilan Milyar Tujuh ratus sembilan puluh lima juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) anggaran tersebut digunakan untuk mendukung 2 (dua) kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Realisasi penggunaan anggaran Direktorat Narkotika
Deputi Pemberantasan BNN tahun 2024

No.	Program /Kegiatan /Output/Suboutput/ komponen/Akun	Anggaran	Realisasi	Sisa	%
1	2	3	4	5	6
1.	Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika	6.458.168.000	6.265.973.112	192.194.888	97 %
2.	Titik Lokasi Lahan Ganja dan Tanaman Terlarang Lainnya	3.337.130.000	3.336.520.513	609.487	100 %
Jumlah% rata-rata		9.795.298.000	9.602.493.625	192.804.375	98,03%

Berdasarkan Realisasi Anggaran sebagaimana Tabel 3 tersebut diatas, Direktorat Narkotika pada Tahun Anggaran 2024 terdapat sisa/optimalisasi anggaran yang tidak diserap sebesar Rp. 192.804.375,- (Seratus sembilan puluh dua juta delapan ratus empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) Kemudian Pagu Alokasi Anggaran untuk mendukung kegiatan Output (5354) berkas perkara tindak pidana narkotika dan titik lokasi lahan ganja dan tanaman terlarang lainnya di daerah sebesar Rp. 19.329.175.100,- (Sembilan belas milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta seratus tujuh puluh lima ribu seratus rupiah).

Adapun breakdown alokasi anggaran yang diberikan untuk Satker Daerah/ BNNP adalah sebagai berikut :

Tabel Realisasi penggunaan anggaran di Daerah/BNNP tahun 2024

No	Program /Kegiatan /Output/Suboutput/ komponen/Akun	Anggaran	Realisasi	Sisa	%
1	2	3	4	5	6
1	Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika				
1.	BNNP Aceh (Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika)	635.000.000	620..292.590	14.707.410	98 %
	Titik Lokasi Lahan Ganja dan Tanaman Terlarang Lainnya	436.290.000	432.474.000	3.816.000	99 %
	BNNK Lhokseumawe Titik Lokasi Lahan Ganja dan Tanaman Terlarang Lainnya	45.300.000	45.292.200	7.800	100 %
2.	BNNP Sumut (Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika)	1.316.020.000	1.099.073.000	216.947.000	96 %
	Titik Lokasi Lahan Ganja dan Tanaman Terlarang Lainnya	437.028.000	297.014.000	140.014.000	68 %

No	Program /Kegiatan /Output/Suboutput/ komponen/Akun	Anggaran	Realisasi	Sisa	%
1	2	3	4	5	6
3.	BNNP Sumatera Barat	433.996.000	431.041.683	2.954.317	99 %
4.	BNNP Riau	602.500.000	597.449.000	5.051.000	99 %
5.	BNNP Kepulauan Riau	635.416.000	635.340.550	75.450	100 %
6.	BNNP Bangka Belitung	293.177.000	292.291.885	885.135	100%
7.	BNNP Jambi	516.716.100	516.655.580	60.520	100%
8.	BNNP Bengkulu	427.630.000	427.630.000	0	100%
9.	BNNP Sumse	487.604.000	485.438.837	2.191.163	100%
10	BNNP Lampung	299.950.000	299.886.000	64.000	100%
11	BNNP Jabar	902.000.000	901.990.000	10.000	100%
12	BNNP DKI	461.973.000	461.632.350	340.650	100%
13	BNNP Banten	482.700.000	482.665.900	34.100	100%

No	Program /Kegiatan /Output/Suboutput/ komponen/Akun	Anggaran	Realisasi	Sisa	%
1	2	3	4	5	6
14	BNNP D.I.Yogyakarta	364.277.000	363.783.200	493.800	100%
15	BNNP Jawa Tengah	672.411.000	669.807.438	2.603.562	100%
16	BNNP Jawa Timur	823.680.000	823.424.488	255.512	100%
17	BNNP Kaltara	550.351.000	522.095.650	28.255.350	95%
18	BNNP Kaltim	619.701.000	619.647.221	53.779	100%
19	BNNP Kalbar	496.850.000	495.344.925	1.505.075	100%
20	BNNP Kalsel	745.000.000	737.573.501	7.427.499	99%
21	BNNP Kalteng	346.244.000	345.786.985	457.015	100%
22	BNNP Bali	610.000.000	609.914.000	86.000	100%
23	BNNP NTB	360.000.000	359.148.839	851.161	100%
24	BNNP NTT	243.190.000	240.794.641	2.395.359	99%
25	BNNP Sulawesi Utara	502.415.000	500.694.464	1.724.354	100%
26	BNNP Sultra	487.880.000	485.227.105	2.652.895	99%
27	BNNP Sulteng	599.683.000	598.390.014	1.292.986	100%

No	Program /Kegiatan /Output/Suboutput/ komponen/Akun	Anggaran	Realisasi	Sisa	%
1	2	3	4	5	6
28	BNNP Sulsel	506.932.000	506.314.275	617.725	100%
29	BNNP Gorontalo	300.000.000	299.510.700	489.300	100%
30	BNNP Sulbar	412.663.000	412.634.500	28.500	100%
31	BNNP Maluku	624.850.000	623.806.990	101.043.010	100%
32	BNNP Maluku Utara	477.050.000	477.050.000	0	100%
33	BNNP Papua	700.000.000	699.911.836	88.167	100%
34	Papua Barat	476.698.000	472.609.535	88.465	100%
Jumlah% rata-rata		19.329.175.100	18.889.637.862	439.537.238	97,72%

Berdasarkan Realisasi Anggaran sebagaimana Tabel 4 tersebut diatas, BNNP pada Tahun Anggaran 2024 terdapat sisa/optimalisasi anggaran yang tidak diserap sebesar Rp. 439.537.238 (Empat ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus tigapuluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah).

Beberapa hal yang mempengaruhi capaian tersebut di atas antara lain :

1. Setiap Rencana Anggaran Belanja (RAB) untuk mendukung kegiatan disusun sesuai dengan kebutuhan riil dilapangan sehingga tidak terjadi in-efisiensi penggunaan anggaran.
2. Penugasan personel diatur sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan dan ditunjuk sesuai dengan keahlian atau kompetensi masing-masing, sehingga penggunaan anggaran dapat lebih efisien.

3. Pemanfaatan peralatan teknologi intelijen yang dimiliki BNN mampu mempercepat waktu yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan penyelidikan, penyidikan, dan pengungkapan jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, sehingga anggaran yang digunakan untuk operasional lebih efisien.
4. Optimalisasi metode analisa data intelijen yang akurat dan efektifitas kerja anggota di lapangan terbukti berhasil meningkatkan kuantitas dan kualitas pengungkapan kejahatan narkoba.

Di tahun 2024 Anggaran sebesar Rp. 29,124,473,100 (*Duapuluh Sembilan Milyar Seratus Duapuluh Empat Juta Empat ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Seratus Rupiah*) dengan Realisasi Rp. 28.492.131.487,- (*Dua puluh Delapan Milyar Empat ratus sembilan puluh dua juta seratus tiga puluh satu ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah*) atau sebesar 97,82% dengan sisa anggaran yang tidak terserap Rp. 632.341.613 (*enam ratus tiga puluh dua juta tiga ratus empat puluh satu ribu enam ratus tiga belas rupiah*), dengan pencapaian kinerja ini menggambarkan tingkat akuntabilitas keuangan atau penggunaan anggaran pada Direktorat Narkoba Deputi Bidang Pemberantasan BNN dan BNNP baik. Keberhasilan ini tidak terlepas dari adanya inovasi dan terobosan yang dilaksanakan oleh Deputi Bidang Pemberantasan BNN, khususnya dalam hal efisiensi penggunaan anggaran melalui penyusunan RAB yang akurat, dengan mempertimbangkan dan memperhatikan kemampuan dan kompetensi anggota yang ditugaskan di lapangan, pemanfaatan peralatan teknologi intelijen secara tepat dan optimalisasi metode analisa data intelijen serta mengefektifkan cara kerja anggota di lapangan.

e. Perbandingan Capaian Perkara tahun 2022 s.d 2024

Direktorat Narkoba mendistribusikan alokasi anggaran ke satuan kerja wilayah berdasarkan pagu yang diterima tiap tahunnya. Dari tahun 2022 s.d 2024 Direktorat Narkoba dan jajaran BNNP mengalami penurunan dari segi anggaran. Pencapaian kinerja dari satuan kerja wilayah selalu melampaui target dari tahun 2022, dikarenakan adanya kegiatan-kegiatan

untuk menindaklanjuti laporan informasi, aduan masyarakat yang tidak terdukung anggaran. Dari data tersebut dapat disimpulkan selama tiga tahun terakhir (tahun 2022 s.d 2024) tidak ada penurunan maupun peningkatan dalam hal capaian perkara tersebut.

Adapun tabel perbandingan capaian selama 3 tahun terakhir dapat digambarkan sebagai berikut :

CAPAIAN OUTPUT DAN REALISASI ANGGARAN KEGIATAN PENGUNGKAPAN PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA TA. 2022 S/D 2024														
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

SATKER	TA. 2022					TA. 2023					TA. 2024				
	KEGIATAN			ANGGARAN		KEGIATAN			ANGGARAN		KEGIATAN			ANGGARAN	
	TARGET	REALISASI	P-21	PAGU	REALISASI	TARGET	REALISASI	P-21	PAGU	REALISASI	TARGET	REALISASI	P-21	PAGU	REALISASI
Pusat	25	27	22	3,503,540,000	3,361,851,664	30	31	30	5,000,300,000	5,629,378,617	30	40	30	6,438,168,000	6,265,972,112
Daerah	529	1,231	1,340	34,101,893,885	32,757,397,257	577	1,145	950	30,491,800,000	30,145,203,137	582	876	766	18,419,357,100	18,114,857,862
	554	1,258	1,062	37,671,233,885	36,119,248,941	607	1,176	980	36,171,900,000	35,774,581,754	412	916	736	24,898,725,100	24,380,830,774

CAPAIAN OUTPUT DAN REALISASI ANGGARAN KEGIATAN OPERASI PEMUSNAHAN TITIK LOKASI LADANG GANJA TA. 2022 S/D 2024														
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

SATKER	TA. 2022					TA. 2023					TA. 2024				
	KEGIATAN			ANGGARAN		KEGIATAN			ANGGARAN		KEGIATAN			ANGGARAN	
	TARGET	REALISASI	P-21	PAGU	REALISASI	TARGET	REALISASI	P-21	PAGU	REALISASI	TARGET	REALISASI	P-21	PAGU	REALISASI
Pusat	8	8	15	4,540,000,000	4,854,022,666	8	6	20	2,965,350,000	2,984,946,982	6	6	9	3,337,110,000	3,336,520,513
Daerah	6	7	8	1,371,971,000	1,354,472,500	5	7	7	681,896,000	676,462,500	5	5	5	918,818,000	774,780,200
	14	15	23	6,311,971,000	6,208,496,166	11	13	27	3,597,315,000	3,581,309,482	11	11	14	4,255,748,000	4,111,300,713

f. IMPLEMENTASI E-MINDIK

Sebagai bentuk Akuntabilitas kinerja khususnya penyidikan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan Tindak Pidana Pencucian Uang bersumber pada Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika. Direktorat Narkotika sebagai Pembina fungsi penyidikan berwenang untuk melakukan pembinaan terhadap seluruh penyidik BNN. Aplikasi E-Mindik merupakan bagian dari Sistem Informasi Interdiksi Terpadu hal ini merupakan terobosan dalam efisiensi anggaran dan kegiatan dimana dalam membangun system digunakan sarana prasarana yang sudah ada. Pada bagian ini akan ditampilkan resume yang bersumber dari aplikasi E-Mindik periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Tabel Data Tersangka Berdasarkan LKN

NO	JENIS LKN	JUMLAH TERSANGKA
1	Narkotika	1028
2	TPPU	13
Total		1041

Tabel Data Tersangka Berdasarkan Rentan Usia

NO	RENTAN USIA	JUMLAH TERSANGKA
1	<15	3
2	15-24	155
3	25-34	384
4	35-44	327
5	45-54	144
6	55-64	23
7	>64	2
Total		1038

Tabel Data Tersangka Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH TERSANGKA
1	Laki-Laki	962
2	Perempuan	79
Total		1041

Tabel Data Tersangka Berdasarkan Agama

NO	AGAMA	JUMLAH TERSANGKA
1	Islam	903
2	Kristen	89
3	Katolik	19
4	Hindu	15
5	Budha	12
6	Khonghucu	0
7	Penghayat Kepercayaan	0
8	Lainnya	3
Total		1041

Tabel Data Tersangka Berdasarkan Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH TERSANGKA
1	Tidak Sekolah	22
2	Sekolah Dasar / Sederajat	196
3	Sekolah Menengah Pertama / Sederajat	182
4	Sekolah Menengah Atas atau Sekolah Menengah Kejuruan / Sederajat	558
5	Akademi / Diploma	22
6	Diploma IV / Strata 1	57
7	Strata 2	4
Total		1041

Tabel Data Tersangka Berdasarkan Pekerjaan

NO	PEKERJAAN	JUMLAH TERSANGKA
1	Belum/Tidak Bekerja	218
2	Peternak	1
2	Nelayan/Perikanan	23
4	Industri	3
5	Konstruksi	1
6	Transportasi	1
7	Karyawan Swasta	222
8	Karyawan BUMN	1
9	Karyawan Honorer	3
10	Buruh Harian Lepas	70
11	Mengurus Rumah Tangga	32
12	Buruh Tani/Perkebunan	5
13	Buruh Nelayan/Perikanan	5
14	Tukang Cukur	1
15	Tukang Listrik	2
16	Tukang Batu	1
17	Tukang Kayu	1
18	Tukang Las /Pandai Besi	1
19	Pelajar/Mhasiswa	103
20	Mekanik	3

NO	PEKERJAAN	JUMLAH TERSANGKA
21	Pegawai Negeri Sipil	4
22	Konsultan	1
23	Tentara Nasional Indonesia	1
24	Pengacara	1
25	Kepolisian RI	10
26	Pelaut	2
27	Perdagangan	6
28	Sopir	34
29	Pedagang	15
30	Lainnya	232
31	Petani/Pekebun	38
Total		1041

Tabel Data Tersangka Berdasarkan Pekerjaan (Lainnya)

NO	PEKERJAAN	JUMLAH TERSANGKA
1	Berkebun	1
2	Buruh	3
3	Buruh Bangunan	1
4	Buruh Harian Lepas	2
5	EKs Polri	1
6	Freelance Surfer	1
7	Ibu Rumah Tangga	1
8	Jual Air Profil	1
9	Mekanik	1
10	SPG Freelance	1
11	Narapidana LAPas Klas I Lampung	1
12	Ojek	2
13	Narapidana (Narkotika)	2
14	Pedagang Ikan	1
15	Ojek Online	1
16	Pelath Surfing	1
17	Pelikis 1	1
18	Pemandu Wisata	1
19	Pensiunan Pegawai Negeri Sipil	1
20	Petugas Keamanan	1
21	Security	1

NO	PEKERJAAN	JUMLAH TERSANGKA
22	Makelar Travel	1
23	Mahasiswa	1
24	Swasta	14
25	Kerjasawit	1
26	Narapidana Lapas Klas II A Mataram	1
27	Tukang	1
28	Warga Binaa Pemasyarakatan	5
29	Warga Binaan Klas II A Bekasi	1
30	Warga Binaan Klas II A Pekalongan	1
31	Warga Binaan Lapas Narkotika	1
32	Warga Binaan Rutan Klas I Bandar Lampung	1
33	Tukang tato	1
34	wiraswasta	169
35	Wiraswasta (Freelance Desain Grafis)	1
36	Wirasastwa (Tani)	1
37	Wiraswasta/ Operator Alata Berat	2
38	Wiraswata / WB Lapas Tangerang	1
Total		232

Tabel Data Jumlah LKN berdasarkan Jenis

No	Jenis LKN	Jumlah LKN
1	Narkotika	653
2	TPPU	13
Total		666

Tabel Data Jumlah Berkas Perkara Berdasarkan Jenis LKN

NO	JENIS LKN	JUMLAH BERKAS PERKARA
1	Narkotika	963
2	TPPU	13
Total		976

Tabel Data Barang Bukti Berdasarkan Kategori

NO	KATEGORI	JUMLAH (GRAM)	KETERANGAN
1	Ganja	2.191.527,09	-
2	Ganja-Sintetic	1.077,69	-
3	Shabu	721.637,05	-
4	Ekstasy	139.150,03	292.748 Butir
5	Heroin	2.760,00	-
6	Cocain	4.348,33	-
7	Lain lain	176.177,30	-
Total		3.236.677,49	292.748 Butir

Tabel Lokasi Kejadian Per daerah

NO	WILAYAH	JUMLAH
1	BSumatera Utara	71
2	Jawa barat	61
3	Bali	59
4	DKI Jakarta	51
5	Jawa Timur	49
6	Sulawesi Selatan	47
7	Kalimantan Timur	41
8	Riau	40
9	Aceh	33
10	Sulawesi Tengah	32
11	Sumatera Selatan	32
12	Banten	32
13	Jambi	26
14	Jawa tengah	25
15	Nusa Tenggara Barat	24
16	Kep.Riau	23
17	Kalimantan Selatan	20
18	DIY	20
19	Kalimantan Barat	19
20	Kalimantan Tengah	19

NO	WILAYAH	JUMLAH
21	Kalimantan Utara	16
22	Sumatera Barat	14
23	Kep. Bangka Belitung	13
24	Sulawesi barat	11
25	Mauluku	11
26	Sulawesi tenggara	11
27	Papua	10
28	Sulawesi Utara	10
29	Bengkulu	10
30	Lampung	8
31	Papua Barat	7
32	Maluku Utara	5
33	Nusa Tenggara Timur	3
34	Gorontalo	1
Total		858

Tabel Data Jumlah LKN Berdasarkan Kategori Barang Bukti

NO	KATEGORI	JUMLAH LKN	JUMLAH (GRAM)
1	Ganja	182	2.191.527,09
2	Ganja-Sintetic	8	1.077,69
3	Shabu	389	721.637,05
4	Ekstasy	63	139.150,03
5	Heroin	1	2.760,00
6	Cocain	4	4.348,33
7	Lain lain	14	176.177,30
Total			3.236.677,49

3. Direktorat P2

Unit Eselon II	:	Direktorat Psikotropika dan Prekursor
Kegiatan	:	Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Psikotropika dan Prekursor Narkotika
Sasaran	:	Meningkatnya pengawasan jalur distribusi psikotropika dan prekursor narkotika
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. Jumlah berkas perkara tindak pidana prekursor narkotika yang (P21)
	:	2. Nilai kepatuhan importir terdaftar dan pengguna akhir dalam distribusi atau peredaran prekursor non farmasi
	:	3. Jumlah pengungkapan kasus tindak pidana Psikotropika
Target Kegiatan	:	1. Jumlah berkas perkara tindak pidana prekursor narkotika yang (P21) = 5 Berkas Perkara
	:	2. Nilai kepatuhan importir terdaftar dan pengguna akhir dalam distribusi atau peredaran prekursor non farmasi = 100 %
	:	3. Jumlah pengungkapan kasus tindak pidana Psikotropika = 12 Laporan
Capaian Kegiatan	:	1. Jumlah berkas perkara tindak pidana prekursor narkotika yang (P21) = 3 Berkas Perkara
	:	2. Nilai kepatuhan importir terdaftar dan pengguna akhir dalam distribusi atau peredaran prekursor non farmasi = 100 %
	:	3. Jumlah pengungkapan kasus tindak pidana Psikotropika = 12 Laporan
ANGGARAN		
Pagu Anggaran	:	Rp. 3.980.043.000
Pagu Setelah AA	:	Rp. 4.406.952.000
Realisasi	:	Rp. 4.400.699.000

a. Penetapan Kinerja Direktorat P2

Penetapan Kinerja Direktorat Psikotropika dan Prekursor Deputy Bidang Pemberantasan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Tabel Penetapan Kinerja Direktur Psikotropika dan Prekursor Tahun 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkat nya pengungkapan tindak pidana prekursor narkoba, pengawasan distribusi prekursor non farmasi dan farmasi serta penyelidikan penyalahgunaan psikotropika	Jumlah berkas perkara tindak pidana prekursor narkoba yang (P21)	5 Berkas Perkara
		Nilai kepatuhan importir terdaftar dan pengguna akhir dalam distribusi atau peredaran prekursor non farmasi	100 % 54 IT dan end user
		Jumlah pengungkapan kasus tindak pidana Psikotropika	10 Laporan

Dari Indikator kinerja tersebut di atas di implementasikan ke dalam kinerja berbasis anggaran dengan penjelasan sebagai berikut :

KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT	RINCIAN OUTPUT	VOLUME
3262 Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Psikotropika dan Prekursor	3262.BCA.001 Berkas Perkara Tindak Pidana Prekursor Narkoba	5 Berkas
	3262.BKA.001 Laporan Hasil Penyelidikan Penyalahgunaan Psikotropika	10 Laporan
	3262.BKC.001 Laporan Hasil Pengawasan Importir dan Pengguna Akhir Prekursor Narkoba	12 Laporan

Jumlah Anggaran :

Anggaran Direktorat Psikotropika dan Prekursor Deputi Bidang Pemberantasan BNN telah ditetapkan sebesar Rp 4.406.952.000 (Empat Milyar Empat Ratus Enam Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah)

b. Rencana Kinerja dan Anggaran Tahun 2024

Rencana Kinerja dan Anggaran Direktorat Psikotropika dan Prekursor Deputi Bidang Pemberantasan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

PROGRAM	KRO/RO/KOMPONEN	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)
Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)			
	3262.BCA	Perkara Hukum Perseorangan	
	3262.BCA.001	Berkas Perkara Tindak Pidana Prekursor Narkotika	3.186.785.000
	051	Pembinaan Teknis Pengawasan Distribusi dan Penggunaan Prekursor Narkotika Non Farmasi	-
	052	Penyelidikan Kasus Tindak Pidana Prekursor Narkotika	2.569.651.000
	053	Penyidikan kasus tindak pidana prekursor narkotika	612.984.000
	054	Monitoring dan evaluasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana prekursor narkotika	4.150.000
	3262.BKA	Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat	
	3262.BKA.001	Laporan Hasil Penyelidikan Penyalahgunaan Psikotropika	1.057.200.000
	051	Penyelidikan Penyalahgunaan Psikotropika	1.057.200.000
	3262.BKC	Pemantauan lembaga	
	3262.BKC.001	Laporan Hasil Pengawasan Importir dan Pengguna Akhir Prekursor narkotika	162.967.000
	051	Pengawasan ketat atas distribusi dan penggunaan prekursor	162.967.000
	051.A	Pengawasan ketat atas distribusi dan penggunaan prekursor	74.070.000

PROGRAM	KRO/RO/ KOMPONEN	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)
	051.B	Pengawasan ketat atas distribusi dan penggunaan prekursor	88.897.000
	052	Rekomendasi Ekspor dan Import Prekursor Narkotika	88.897.000
	052.A	Rekomendasi Ekspor dan Impor Prekursor Narkotika Non Farmasi	62.607.000
	052.B	Rekomendasi Ekspor dan Impor Prekursor Narkotika Non Farmasi Dalam Kota	23.760.000
	052.C	Rekomendasi Ekspor dan Impor Prekursor Narkotika Non Farmasi Tanpa Kunjungan	2.530.000
	TOTAL ANGGARAN		4.406.952.000

c. Capaian Kinerja Direktorat P2

Pada tahun 2024 Direktorat Psikotropika dan Prekursor Deputi Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional telah melakukan Pengawasan Jalur Distribusi Psikotropika dan Prekursor Narkotika dengan capaian sebagai berikut:

1. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Psikotropika dan Prekursor Deputi Bidang Pemberantasan Tahun 2024

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian	%
Meningkatnya pengawasan jalur distribusi psikotropika dan prekursor narkotika	Jumlah berkas perkara tindak pidana prekursor narkotika yang (P21)	5 BP	3 BP	60%
	Nilai kepatuhan importir terdaftar dan pengguna akhir dalam distribusi atau peredaran prekursor non farmasi	100 %	100 %	100%
	Jumlah pengungkapan kasus tindak pidana Psikotropika	12 Laporan	12 Laporan	100%

2. Capaian Output Direktorat Psikotropika dan Prekursor Deputi Bidang Pemberantasan Tahun 2024

KEGIATAN	OUTPUT	TARGET	CAPAIAN	%
Penyidikan Jaringan Peredaran Psikotropika dan Prekursor	Berkas Perkara Tindak Pidana Prekursor Narkotika	5 BP	13 BP	260%
	Laporan Hasil Penyelidikan Penyalahgunaan Psikotropika	12 Laporan	12 Laporan	100%
	Laporan Hasil Pengawasan Importir dan Pengguna Akhir Prekursor narkotika	10 Laporan	15 Laporan	150%

Sebagaimana tabel di atas dijelaskan bahwa Capaian Direktorat Psikotropika dan Prekursor dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja Kegiatan yang menjadi ukuran capaian kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja :

1. Jumlah berkas perkara tindak pidana prekursor narkotika yang (P21)
2. Nilai kepatuhan importir terdaftar dan pengguna akhir dalam distribusi atau peredaran prekursor non farmasi
3. Jumlah hasil penyelidikan penyalahgunaan Psikotropika

Untuk mencapai 3 Indikator Kinerja Kegiatan diatas, Direktorat Psikotropika dan Prekursor melakukan kegiatan sebagai berikut

1. Jumlah berkas perkara tindak pidana prekursor narkotika yang (P21)
 - a. Pembinaan teknis pengawasan distribusi dan penggunaan prekursor narkotika non farmasi
 - b. Penyelidikan kasus tindak pidana prekursor narkotika
 - c. Penyidikan kasus tindak pidana prekursor narkotika
 - d. Monitoring dan evaluasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana prekursor narkotika

2. Nilai kepatuhan importir terdaftar dan pengguna akhir dalam distribusi atau peredaran prekursor non farmasi
 - a. Pengawasan ketat atas distribusi dan penggunaan prekursor narkotika
3. Jumlah hasil penyelidikan penyalahgunaan Psikotropika
 - a. Penyelidikan penyalahgunaan psikotropika
 - b. Monitoring dan evaluasi penyelidikan psikotropika

d. Realisasi Penggunaan Anggaran Tahun 2024

NO	KODE	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI ANGGARAN (RP)	SISA ANGGARAN (%)	CAPAIAN ANGGARAN (%)
1.	3262.B CA	Perkara Hukum Perseorangan				
	3262.BC A.001	Berkas Perkara Tindak Pidana Prekursor Narkotika	3.186.785.000	3.185.870.175	914.825	99,97
	051	Pembinaan Teknis Pengawasan Distribusi dan Penggunaan Prekursor Narkotika Non Farmasi	-	-	-	-
	052	Penyelidikan Kasus Tindak Pidana Prekursor Narkotika	2.569.651.000	2.568.738.675	912.325	99,96
	053	Penyidikan kasus Tindak Pidana Prekursor Narkotika	612.984.000	612.981.500	2.500	100
	054	Monitoring dan Evaluasi Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Prekursor Narkotika	31.150.000	31.150.000	0	100
2.	3262.BK A	Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat				
	3262.BK A.001	Laporan Hasil Penyelidikan Penyalahgunaan Psikotropika	1.057.200.000	1.054.944.775	431.453.600	99,79
	051	Penyelidikan Penyalahgunaan Psikotropika	1.057.200.000	1.054.944.775	431.453.600	99,79
3.	3262.BK C	Pemantauan lembaga				

NO	KODE	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI ANGGARAN (RP)	SISA ANGGARAN (%)	CAPAIAN ANGGARAN (%)
	3262.BK C.001	Laporan Hasil Pengawasan Importir dan Pengguna Akhir Prekursor narkotika	162.967.000	159.884.050	3.082.950	98,11
	051. A	Pengawasan Ketat Atas Distribusi dan Penggunaan Prekursor	74.070.000	73.441.500	628.500	99,15
	051. B	Rekomendasi Ekspor dan Import Prekursor Narkotika Non Farmasi PNB	88.897.000	86.442.550	2.454.450	97,24
	TOTAL ANGGARAN		4.406.952.000	4.400.699.000	6.253.000	99,86

e. Akuntabilitas Keuangan Tahun 2024

Sesuai Dokumen Penetapan Kinerja Direktur Psikotropika Tahun Anggaran 2024, Direktorat Psikotropika dan Prekursor Deputy Bidang Pemberantasan memiliki Pagu Anggaran sebesar Rp. 3.980.043.000,- (Tiga Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Juta Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah), namun dengan adanya penambahan anggaran dari Relaksasi *Automatic Adjustment* dan penambahan anggaran dari Direktorat Intelijen maka total Pagu Anggaran menjadi Rp. 4.406.952.000 (Lima Milyar Seratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung 3 (tiga) output dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja Kegiatan , dengan rincian sebagai berikut:

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
1	2	3	4	5	7
1.	Meningkatnya pengawasan jalur distribusi psikotropika dan prekursor narkotika	Jumlah berkas perkara tindak pidana prekursor narkotika yang (P21)	3.186.785.000	3.185.870.175	99,97
		Nilai kepatuhan importir terdaftar dan pengguna akhir dalam distribusi atau peredaran prekursor non farmasi	162.967.000	159.884.050	98,11
		Jumlah hasil	1.057.200.000	1.054.944.775	99,79

		penyelidikan penyalahgunaan Psikotropika			
TOTAL REALISASI			4.406.952.000	4.400.699.000	99,86

Sampai dengan akhir Tahun Anggaran berakhir Direktorat Psikotropika dan Prekursor berhasil menyerap Anggaran sebesar 99,86 % dengan capaian IKK :

1. Jumlah berkas perkara tindak pidana prekursor narkotika yang (P21) 3 Berkas Perkara atau 60 %;
2. Nilai kepatuhan importir terdaftar dan pengguna akhir dalam distribusi atau peredaran prekursor non farmasi 100%;
3. Jumlah hasil penyelidikan penyalahgunaan Psikotropika 12 Laporan atau 100%.
4. Jumlah Surat Rekomendasi yang diterbitkan sebanyak 74 dari target sebesar 60 Surat dengan pendapatan negara sebesar Rp. 146.187.000. (Seratus Empat Puluh Enam Juta Seratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

Berdasarkan Surat Putusan Menteri Keuangan bahwa pendapatan negara bukan pajak dari rekomendasi prekursor dapat digunakan kembali oleh BNN guna kepentingan Operasional BNN khususnya dalam melakukan pengaawasan Distribusi Prekursor Non Farmasi Perusahaan IT dan end user. Selama ini kegiatan tersebut sudah berjalan dengan baik dan bermanfaat kembali untuk BNN khususnya Direktorat Psikotropika dan Prekursor BNN.

f. **Laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Penerbitan Rekomendasi Ekspor dan Impor Prekursor Tahun 2024 (PNBP)**

NO	NAMA WAJIB SETOR/WAJIB BAYAR	JENIS PENERIMAAN	NILAI SETORAN		
			TARIF	VOLUME	JUMLAH SETORAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PT. EDF System Integration	Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Impor Prekursor Narkotika Non Farmasi	Rp1,975,500	1.00	Rp1,975,500
2	PT. Langgeng Lestari Jaya	Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Impor Prekursor Narkotika Non Farmasi	Rp1,975,500	1.00	Rp1,975,500
3	PT. Nagase Impor - Ekspor Indonesia	Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Impor Prekursor Narkotika Non Farmasi	Rp1,975,500	1.00	Rp1,975,500
4	PT. PKG Lautan Indonesia	Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Impor Prekursor Narkotika Non Farmasi	Rp1,975,500	1.00	Rp1,975,500
5	PT. Formula Alchemy Resources	Penerbitan Rekomendasi Penunjukan Importir Terdaftar Prekursor Narkotika Non Farmasi	Rp1,975,500	1.00	Rp1,975,500
6	PT. Indusair Electronics Indonesia	Penerbitan Rekomendasi Penunjukan Importir Terdaftar Prekursor Narkotika Non Farmasi	Rp1,975,500	1.00	Rp1,975,500
				JAN	Rp11,853,000

NO	NAMA WAJIB SETOR/WAJIB BAYAR	JENIS PENERIMAAN	NILAI SETORAN		
			TARIF	VOLUME	JUMLAH SETORAN
7	PT. Indochemical Citra Kimia	Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Impor Prekursor Narkotika Non Farmasi	Rp1,975,500	1.00	Rp1,975,500
8	PT. Tirta Surya Raya	Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Impor Prekursor Narkotika Non Farmasi	Rp1,975,500	1.00	Rp1,975,500
9	PT. Mulya Adhi Paramita	Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Impor Prekursor Narkotika Non Farmasi	Rp1,975,500	1.00	Rp1,975,500
10	PT. Nagase Impor-Ekspor Indonesia	Penerbitan perpanjangan rekomendasi penunjukan importir terdaftar prekursor narkotika non farmasi	Rp1,975,500	1.00	Rp1,975,500
11	PT. Jatika Nusa	Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Impor Prekursor Narkotika Non Farmasi	Rp1,975,500	1.00	Rp1,975,500
12	PT. Alkimia Niaga Jaya	Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Impor Prekursor Narkotika Non Farmasi	Rp1,975,500	1.00	Rp1,975,500
				FEB	Rp11,853,000
13	PT. Indusair Electronics Indonesia	Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Impor Prekursor Narkotika Non Farmasi	Rp1,975,500	1.00	Rp1,975,500
14	PT. Merck Chemicals and Life Sciences	Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Impor Prekursor Narkotika Non Farmasi	Rp1,975,500	1.00	Rp1,975,500

NO	NAMA WAJIB SETOR/WAJIB BAYAR	JENIS PENERIMAAN	NILAI SETORAN		
			TARIF	VOLUME	JUMLAH SETORAN
15	PT. Prochem Tritama	Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Impor Prekursor Narkotika Non Farmasi	Rp1,975,500	1.00	Rp1,975,500
16	PT. Purytek Tunggal Prima	Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Impor Prekursor Narkotika Non Farmasi	Rp1,975,500	1.00	Rp1,975,500
17	PT. Karunia Jasindo	Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Impor Prekursor Narkotika Non Farmasi	Rp1,975,500	1.00	Rp1,975,500
18	PT. Nagase Impor - Ekspor Indonesia	Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Impor Prekursor Narkotika Non Farmasi	Rp1,975,500	1.00	Rp1,975,500
19	PT. Multiredjeki Kita	Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Impor Prekursor Narkotika Non Farmasi	Rp1,975,500	1.00	Rp1,975,500
				MARET	Rp13,828,500
20	PT. Formula Alchemy Resources	Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Impor Prekursor Narkotika Non Farmasi		1.00	Rp1,975,500
21	PT. Rukun Persada Makmur	Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Impor Prekursor Narkotika Non Farmasi	Rp1,975,500	1.00	Rp1,975,500
22	PT. Itochu	Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Impor Prekursor Narkotika Non Farmasi	Rp1,975,500	1.00	Rp1,975,500

NO	NAMA WAJIB SETOR/WAJIB BAYAR	JENIS PENERIMAAN	NILAI SETORAN		
			TARIF	VOLUME	JUMLAH SETORAN
23	PT. EDF System Integration	Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Impor Prekursor Narkotika Non Farmasi	Rp1,975,500	1.00	Rp1,975,500
24	PT. PDI Waris	Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Impor Prekursor Narkotika Non Farmasi	Rp1,975,500	1.00	Rp1,975,500
25	PT. Sinar Berkas Anugrah	Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Impor Prekursor Narkotika Non Farmasi	Rp1,975,500	1.00	Rp1,975,500
				APRIL	Rp11,853,000
26	PT. Jia Hua Hua Gong	Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Impor Prekursor Narkotika Non Farmasi	Rp1,975,500	1.00	Rp1,975,500
27	PT. Samchem Prasandha	Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Impor Prekursor Narkotika Non Farmasi	Rp1,975,500	1.00	Rp1,975,500
28	PT. Sari Sarana Kimiata	Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Impor Prekursor Narkotika Non Farmasi	Rp1,975,500	1.00	Rp1,975,500
				MEI	Rp. 5.926.000

NO	NAMA WAJIB SETOR/WAJIB BAYAR	JENIS PENERIMAAN	NILAI SETORAN		
			TARIF	VOLUME	JUMLAH SETORAN
29	PT. Nagase Impor-Ekspor Indonesia	Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Impor Prekursor Narkotika Non Farmasi	Rp1,975,500	1.00	Rp1,975,500
30	PT. Udaya Anugerah Abadi	Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Impor Prekursor Narkotika Non Farmasi	Rp1,975,500	1.00	Rp1,975,500
31	PT. Jatika Nusa	Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Impor Prekursor Narkotika Non Farmasi	Rp1,975,500	1.00	Rp1,975,500
32	PT. Multiredjeki Kita	Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Impor Prekursor Narkotika Non Farmasi	Rp1,975,500	1.00	Rp1,975,500
33	PT. Panda Mas Kimia Abadi	Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Impor Prekursor Narkotika Non Farmasi	Rp1,975,500	1.00	Rp1,975,500

NO	NAMA WAJIB SETOR/WAJIB BAYAR	JENIS PENERIMAAN	NILAI SETORAN		
			TARIF	VOLUME	JUMLAH SETORAN
34	PT. EDF System Integration	Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Impor Prekursor Narkotika Non Farmasi	Rp1,975,500	1.00	Rp1,975,500
35	PT. Tirta Surya Raya	Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Impor Prekursor Narkotika Non Farmasi	Rp1,975,500	1.00	Rp1,975,500
				JUNI	Rp.13.828.500
36	PT. Indofa Utama Multi Core	Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Impor Prekursor Narkotika Non Farmasi	Rp1,975,500	1.00	Rp1,975,500
37	PT. Merck Chemicals and Life Sciences	Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Impor Prekursor Narkotika Non Farmasi	Rp1,975,500	1.00	Rp1,975,500
38	PT. Langgeng Lestari Jaya	Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Impor Prekursor Narkotika Non Farmasi	Rp1,975,500	1.00	Rp1,975,500

NO	NAMA WAJIB SETOR/WAJIB BAYAR	JENIS PENERIMAAN	NILAI SETORAN		
			TARIF	VOLUME	JUMLAH SETORAN
39	PT. Karunia Jasindo	Penerbitan perpanjangan rekomendasi penunjukan importir terdaftar prekursor narkotika non farmasi	Rp1,975,500	1.00	Rp1,975,500
				JULI	Rp. 7.902.000
40	PT. Indochemical Citra Kimia	Penerbitan perpanjangan rekomendasi penunjukan importir terdaftar prekursor narkotika non farmasi	Rp1,975,500	1.00	Rp1,975,500
41	PT. Karunia Jasindo	Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Impor Prekursor Narkotika Non Farmasi	Rp1,975,500	1.00	Rp1,975,500
42	PT. Nagase Impor - Ekspor Indonesia	Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Impor Prekursor Narkotika Non Farmasi	Rp1,975,500	1.00	Rp1,975,500
43	PT. PKG Lautan Indonesia	Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Impor Prekursor Narkotika Non Farmasi	Rp1,975,500	1.00	Rp1,975,500
44	PT. Tirta Surya Raya	Penerbitan perpanjangan rekomendasi penunjukan importir terdaftar prekursor	Rp1,975,500	1.00	Rp1,975,500

NO	NAMA WAJIB SETOR/WAJIB BAYAR	JENIS PENERIMAAN	NILAI SETORAN		
			TARIF	VOLUME	JUMLAH SETORAN
		narkotika non farmasi			
45	PT. Mulya Adhi Paramita	Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Impor Prekursor Narkotika Non Farmasi	Rp1,975,500	1.00	Rp1,975,500
46	PT. Multi Eka Chemicalindo	Penerbitan perpanjangan rekomendasi penunjukan importir terdaftar prekursor narkotika non farmasi	Rp1,975,500	1.00	Rp1,975,500
47	PT. Rukun Persada Makmur	Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Impor Prekursor Narkotika Non Farmasi	Rp1,975,500	1.00	Rp1,975,500
48	PT. Tirta Surya Raya	Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Impor Prekursor Narkotika Non Farmasi	Rp1,975,500	1.00	Rp1,975,500
				AGUSTUS	Rp.17.779.500
49	PT. Purytek Tunggal Prima	Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Impor Prekursor Narkotika Non Farmasi	Rp1,975,500	1.00	Rp1,975,500
50	PT. Alkimia	Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Impor	Rp1,975,500	1.00	Rp1,975,500

NO	NAMA WAJIB SETOR/WAJIB BAYAR	JENIS PENERIMAAN	NILAI SETORAN		
			TARIF	VOLUME	JUMLAH SETORAN
	Niaga Jaya	Prekursor Narkotika Non Farmasi			
51	PT. Brenntag	Penerbitan Rekomendasi Penunjukan Importir Terdaftar Prekursor Narkotika Non Farmasi	Rp1,975,500	1.00	Rp1,975,500
52	PT. Sinar Kimia Utama	Penerbitan perpanjangan rekomendasi penunjukan importir terdaftar prekursor narkotika non farmasi	Rp1,975,500	1.00	Rp1,975,500
53	PT. Indochemical Citra Kimia	Penerbitan perpanjangan rekomendasi penunjukan importir terdaftar prekursor narkotika non farmasi	Rp1,975,500	1.00	Rp1,975,500
54	PT. Pyramida Kimia Semesta	Penerbitan Rekomendasi Penunjukan Importir Terdaftar Prekursor Narkotika Non Farmasi	Rp1,975,500	1.00	Rp1,975,500
55	PT. Printechnindo Raya Utama	Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Impor Prekursor Narkotika Non Farmasi	Rp1,975,500	1.00	Rp1,975,500
56	PT. Sinar	Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Impor	Rp1,975,500	1.00	Rp1,975,500

NO	NAMA WAJIB SETOR/WAJIB BAYAR	JENIS PENERIMAAN	NILAI SETORAN		
			TARIF	VOLUME	JUMLAH SETORAN
	Berkat Anugrah	Prekursor Narkotika Non Farmasi			
				SEPTEMBER	Rp.15.804.000
57	PT. Multiredjeki Kita	Penerbitan perpanjangan rekomendasi penunjukan importir terdaftar prekursor narkotika non farmasi	Rp1,975,500	1.00	Rp1,975,500
58	PT. Samchem Prasandha	Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Impor Prekursor Narkotika Non Farmasi	Rp1,975,500	1.00	Rp1,975,500
59	PT. Rukun Persada Makmur	Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Impor Prekursor Narkotika Non Farmasi	Rp1,975,500	1.00	Rp1,975,500
60	PT. Pyramida Kimia Semesta	Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Impor Prekursor Narkotika Non Farmasi	Rp1,975,500	1.00	Rp1,975,500
61	PT. Merck Chemicals and Life	Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Impor Prekursor Narkotika Non Farmasi	Rp1,975,500	1.00	Rp1,975,500

NO	NAMA WAJIB SETOR/WAJIB BAYAR	JENIS PENERIMAAN	NILAI SETORAN		
			TARIF	VOLUME	JUMLAH SETORAN
	Sciences				
62	PT. Aik Moh Chemicals Indonesia	Penerbitan Rekomendasi Penunjukan Importir Terdaftar Prekursor Narkotika Non Farmasi	Rp1,975,500	1.00	Rp1,975,500
				OKTOBER	Rp.11.853.000
63	PT. Jatika Nusa	Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Impor Prekursor Narkotika Non Farmasi	Rp1,975,500	1.00	Rp1,975,500
64	PT. Itochu Indonesia	Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Impor Prekursor Narkotika Non Farmasi	Rp1,975,500	1.00	Rp1,975,500
65	PT. Multi Eka Chemicalindo	Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Impor Prekursor Narkotika Non Farmasi	Rp1,975,500	1.00	Rp1,975,500
66	PT. Formula Alchemy Resources	Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Impor Prekursor Narkotika Non Farmasi	Rp1,975,500	1.00	Rp1,975,500
				NOVEMBER	Rp. 7.902.000
67	PT. Sari Sarana	Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Impor Prekursor Narkotika Non Farmasi	Rp1,975,500	1.00	Rp1,975,500

NO	NAMA WAJIB SETOR/WAJIB BAYAR	JENIS PENERIMAAN	NILAI SETORAN		
			TARIF	VOLUME	JUMLAH SETORAN
	Kimiatama				
68	PT. AEM Kimia Utama	Penerbitan Rekomendasi Penunjukan Importir Terdaftar Prekursor Narkotika Non Farmasi	Rp1,975,500	1.00	Rp1,975,500
69	PT. Istanindo	Penerbitan Rekomendasi Penunjukan	Rp1,975,500	1.00	Rp1,975,500
	Anugraha Mulia	Importir Terdaftar Prekursor Narkotika Non Farmasi			
70	PT. Rukun Persada Makmur	Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Impor Prekursor Narkotika Non Farmasi	Rp1,975,500	1.00	Rp1,975,500
71	PT. Nagase Impor - Ekspor Indonesia	Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Impor Prekursor Narkotika Non Farmasi	Rp1,975,500	1.00	Rp1,975,500
72	PT. Indusair Electronics Ind	Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Impor Prekursor Narkotika Non Farmasi	Rp1,975,500	1.00	Rp1,975,500
73	PT. Mulya	Penerbitan perpanjangan rekomendasi	Rp1,975,500	1.00	Rp1,975,500

NO	NAMA WAJIB SETOR/WAJIB BAYAR	JENIS PENERIMAAN	NILAI SETORAN		
			TARIF	VOLUME	JUMLAH SETORAN
	Adhi Paramita	penunjukan importir terdaftar prekursor narkotika non farmasi			
74	PT. Tirta Surya Raya	Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Impor Prekursor Narkotika Non Farmasi	Rp1,975,500	1.00	Rp1,975,500
				DESEMBER	Rp.15.804.000
TOTAL REALISASI					Rp. 146.187.000

4. Direktorat TPPU

Unit Eselon II	:	Direktorat Tindak Pidana Pencucian Uang
Kegiatan	:	Penyelidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tidak Pidana Narkotika
Sasaran	:	Meningkatnya Pengungkapan Kasus Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika
Indikator Kinerja Kegiatan	:	Jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P- 21
Target Kegiatan	:	Berkas perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P21. Dengan tareget 20 Berkas Perkara
Capaian Kegiatan	:	18 Berkas Perkara P-21
Indikator Kinerja Output	:	Berkas perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. Dengan target 20 Berkas Perkara
Capaian Kinerja Output	:	15 Berkas Perkara
ANGGARAN		
Pagu Awal Anggaran	:	Rp. 10.755.791.000
Pagu Setelah AA	:	Rp. 10.901.371.000
Realisasi	:	Rp. 10.825.064.067

a. Penetapan Kinerja Direktorat TPPU

Penetapan Kinerja Direktorat Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2024 menetapkan 1 (satu) sasaran strategis yang akan dicapai, dengan indikator kinerja utama sebanyak 1 (satu) indikator kinerja. Dari 1 (satu) sasaran strategis tersebut target indikator kinerja yang telah ditentukan mempunyai capaian melebihi target yang telah ditentukan (*one Prestasi*). Disamping itu Direktorat Tindak Pidana Pencucian Uang juga melakukan berbagai kegiatan pendukung dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja, antara lain operasional layanan perkantoran, perangkat olah data dan komunikasi, melakukan koordinasi dengan instansi terkait yang berada di dalam negeri maupun yang berada di luar negeri, pelatihan tindak pidana pencucian Uang secara berjenjang dan perbaikan sistem manajemen organisasi dan manajemen perencanaan yang lebih baik.

Pada tahun 2024 Direktorat Tindak Pidana Pencucian Uang telah melaksanakan kegiatan sebagaimana target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja (PK) serta penjelasan hasil capaian 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU), yang diuraikan sebagai berikut :

Tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PENCAPAIAN TARGET %
% Jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) hasil tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P21	100 %	90 %	90 %

Seluruh capaian diatas dilakukan melalui berbagai tahapan kegiatan yang dilakukan secara simultan.

b. Capaian Kinerja Tahun 2024

Guna mengetahui lebih jauh tentang capaian kinerja yang telah dilakukan Direktorat Tindak Pidana Pencucian Uang selama kurun waktu tahun 2024, perlu dilakukan evaluasi dengan cara melakukan analisis yang berkaitan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan. Analisis dilakukan dengan menyajikan perkembangan capaian, baik dalam bentuk narasi maupun tabel atau grafik. Capaian kinerja tahun 2024 merupakan kelanjutan capaian periode tahun sebelumnya, dan capaian ini merupakan arah untuk capaian pada periode selanjutnya, sebagaimana yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Direktorat Tindak Pidana Pencucian Uang.

Tahun 2024, Direktorat Tindak Pidana Pencucian Uang telah berhasil melaksanakan tugas utama di bidang P4GN khususnya administrasi penyidikan tindak pidana pencucian Uang yang berasal dari narkoba dan prekursor narkoba dan penyitaan aset dan harta kekayaan tersangka tindak pidana narkoba yang menjadi tugas dan tanggung jawab Direktorat Tindak Pidana Pencucian Uang. Berikut ini diuraikan capaian kinerja Direktorat Tindak Pidana Pencucian Uang tahun 2024 :

1. Sasaran : Penyidikan tindak pidana pencucian Uang terhadap tersangka tindak pidana narkoba

Kegiatan penyidikan hasil tindak pidana pencucian Uang hasil tindak pidana narkoba dilakukan melalui pengembangan dan analisis informasi yang didapat, serta ditindaklanjuti dengan operasi penyelidikan data mutasi rekening bank, jasa keuangan tersangka dengan pihak PPATK, Perbank dan penyedia jasa keuangan lainnya non perbankan. Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan pengungkapan tindak pidana pencucian Uang hasil narkoba dan perampasan aset dan harta tersangka tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba serta pemutusan jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mengetahui keberhasilan sasaran 1 tersebut, di bawah ini disajikan ukuran-ukuran keberhasilan sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1.	Jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) hasil tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P21	20 berkas	18 Berkas	90 %

Capaian Kinerja Direktorat Tindak Pidana Pencucian Uang untuk kegiatan penyidikan jumlah tersangka Tindak Pidana narkoba yang disidik asetnya terkait hasil kejahatan narkoba mencapai 18 berkas perkara sekitar 90 % dari jumlah target 20 berkas perkara. Dalam penyidikan tersangka tindak pidana narkoba yang disidik asetnya terkait hasil kejahatan narkoba kegiatan diawali dengan melakukan Penelusuran aset dan Pemetaan Aset tersangka narkoba bekerjasama dengan instansi terkait, aparat penegak hukum dan masyarakat untuk mendapatkan informasi dan analisis pengembangan yang akan menjadi target operasi penyelidikan.

Sehingga perencanaan penyidikan yang dapat dijadikan sebagai pedoman didalam melakukan kegiatan penyidikan tindak pidana pencucian uang tersangka jaringan narkoba selama 1 (satu) tahun kedepan agar supaya dalam pelaksanaan tugas dapat terarah, efektif dan tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Sedangkan Laporan Hasil Evaluasi penyidikan tersangka tindak pidana narkoba yang disidik asetnya terkait hasil kejahatan narkoba merupakan gambaran pencapaian hasil kinerja pada Satker Direktorat Tindak Pidana Pencucian Uang selama 1 (satu) Tahun Anggaran.

Pencapaian realisasi target berkas perkara sebanyak 16 berkas, adanya penambahan anggaran APBN-P dan Revisi anggaran karena adanya tersangka narkoba yang telah diduga melakukan tindak pidana pencucian uang sehingga harus dilakukan penyelidikan dan penyidikan.

Sedangkan permasalahan yang dihadapi dalam penyitaan aset tersangka lamanya proses dan birokrasi untuk dilakukan pembekuan dan pemblokiran aset dan harta kekayaan tersangka untuk dilakukan penetapan sita dari

penegadilan negeri dan panjangnya birokrasi untuk melakukannya penelusuran aset dana set tersangka yang berada di luar negeri. Beberapa berkas TPPU hasil tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tahun 2024 masih dalam proses penyidikan, belum dinyatakan lengkap oleh kejaksaan karena adanya perbedaan persepsi dengan jaksa sehingga perlu adanya penelusuran lebih lanjut terkait kepemilikan aset. Sehingga untuk mengatasi masalah tersebut diperlukan koordinasi secara baik terhadap instansi pemerintah yang terkait.

c. Akuntabilitas Keuangan Tahun 2024.

Direktorat Tindak Pidana Pencucian Uang Deputy Bidang Pemberantasan Tahun Anggaran 2024 mempunyai alokasi pagu sebesar Rp. 10.755.791.000,- (sepuluh milyar tujuh ratus lima puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) pada awal Tahun Anggaran 2024. Pada Bulan November Direktorat Tindak Pidana Pencucian Uang mendapatkan tambahan anggaran Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) menjadi Rp. 10.965.001.000,- (sepuluh milyar sembilan ratus enam puluh lima juta satu ribu rupiah) dan ada blokir penghematan jaldis 50% senilai Rp. 63.630.000,- (enam puluh tiga juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) menjadi Rp. 10.901.371.000,- (sepuluh milyar sembilan ratus satu juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Realisasi anggaran Direktorat Tindak Pidana Pencucian uang (TPPU) TA. 2024 yaitu Rp. 10.825.064.067,- (sepuluh milyar delapan ratus dua puluh lima juta enam puluh empat ribu enam puluh tujuh rupiah) atau sebesar 99,30 % (sembilan puluh sembilan koma tiga puluh persen) yang digunakan untuk mendukung kegiatan pada Direktorat Tindak Pidana Pencucian Uang. Dengan rincian sebagaimana tabel berikut :

**Tabel Realisasi Anggaran Direktorat Tindak Pidana Pencucian
Uang Tahun Anggaran 2024**

NO	URAIAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	SISA PAGU (RP)	%
1	Pembinaan Teknis Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika, Kegiatan Koordinasi Criminal Justice System dan Kegiatan Koordinasi dengan Penyedia Jasa Keuangan	0	0	0	0 %
2	Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika	10.657.341.000	10.581.125.904	76.215.096	99,28%
3	Monitoring, Evaluasi, Pemetaan dan Penelusuran Jaringan Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika	244.030.000	243.938.163	91.830	91,37%
JUMLAH		10.901.371.000	10.825.064.067	76.306.933	99,30 %

Berdasarkan Realisasi Anggaran sebagaimana tabel 4 tersebut diatas, Direktorat Tindak Pidana Pencucian Uang pada Tahun Anggaran 2024 terdapat sisa anggaran yang tidak diserap sebesar Rp. 76.306.933 (tujuh puluh enam juta tiga ratus enam ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah). dengan rincian sebagai berikut :

1. Pembinaan Teknis Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika, Kegiatan Koordinasi Criminal Justice System dan Kegiatan Koordinasi dengan

Penyedia Jasa Keuangan, telah dilakukan blokir pagu anggaran / *Automotic Adjustment* (AA).

2. Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika pagu sebesar Rp. 10.657.341.000,- (sepuluh milyar enam ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) dengan realisasi 99,28 % (sembilan puluh sembilan koma dua puluh delapan persen) sebesar Rp. 10.581.125.904,- (sepuluh milyar lima ratus delapan puluh satu juta seratus dua puluh lima ribu sembilan ratus empat rupiah), sisa pagu Rp. 76.215.096,- (tujuh puluh enam juta dua ratus lima belas ribu sembilan puluh enam rupiah). Kegiatan Penyidikan Wilayah Udara, Laut dan Perairan yang juga merupakan bagian output dari Penyusunan berkas Perkara kasus Kejadian Narkotika (LKN) Subdit Tindak Pidana Pencucian Uang. Anggaran tidak dapat terserap seratus persen, karena dalam proses penyerapan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan sesuai rincian anggaran belanja (RAB) diusulkan oleh masing-masing Ketua Tim Penyidikan sampai dengan kegiatan menghadirkan saksi dipersidangan.
3. Monitoring, Evaluasi, Pemetaan dan Penelusuran Jaringan Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika mempunyai pagu Rp. 244.030.000,- (dua ratus empat puluh empat juta tiga puluh ribu rupiah) dengan realisasi 91,37 % (Sembilan satu koma tiga puluh tujuh persen) sebesar Rp. 243.938.163,- (dua ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh delapan juta seratus enam puluh tiga rupiah) dan sisa pagu anggaran sebesar Rp. 91.830,-(sembilan puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh ribu rupiah), adapun sisa anggaran yang tidak terserap merupakan sisa belanja barang operasional lainnya dan belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota dan berkas perkara kegiatan rapat di luar jam kantor.

**Tabel Total Perolehan Asset Kinerja Direktorat Tindak Pidana
Pencucian Uang Tahun 2024**

KEGIATAN	TARGET	REALISASI	TOTAL ASET (RP.)	CAPAIAN TARGET %
Jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) hasil tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P-21	20 Berkas Perkara	18 Berkas Perkara	93.148.391.170,40	90%

Dimana Penyelidikan dan penyidikan TPPU Tahun Anggaran 2024 target kinerjanya 20 (dua puluh) berkas Perkara P21 dengan realisasi 18 (delapan belas) berkas perkara P21 dengan persentase 90 % (*sembilan puluh persen*) dengan total asset tersita Rp. 93.148.391.170,40,- (*sembilan puluh tiga milyar seratus empat puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu seratus tujuh puluh koma empat puluh rupiah*).

**Tabel Total Perolehan Asset Output Direktorat Tindak Pidana Pencucian
Uang Tahun 2024**

KEGIATAN	TARGET	REALISASI	TOTAL ASET (RP.)	CAPAIAN TARGET %
Berkas perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) hasil tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba	20 Berkas Perkara	15 Berkas Perkara	111.535.843.866.170,40	70%

Dimana Penyelidikan dan penyidikan TPPU Tahun Anggaran 2024 target outputnya 20 (dua puluh) berkas Perkara dengan realisasi 15 (lima belas) berkas perkara dengan persentase 70% (*tujuh puluh persen*) dengan total asset tersita Rp. 111.535.843.866,26,- (*seratus sebelas milyar lima ratus tiga puluh lima juta delapan ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh enam koma dua puluh enam rupiah*).

5. Direktorat Dakjar

Unit Eselon II	:	Direktorat Penindakan Dan Pengejaran
Kegiatan	:	Penangkapan DPO Dan TO Kasus Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika Serta TPPU
Sasaran	:	Meningkatnya Penangkapan DPO Dan TO Kasus Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika Serta TPPU
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. Persentase Tersangka DPO kasus tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika serta TPPU yang tertangkap
	:	2. Persentase Target Operasi (TO) kasus tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika serta TPPU yang tertangkap
Capaian Kinerja Output	:	1. Persentase Tersangka DPO kasus tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika serta TPPU yang tertangkap tercapai 100%
	:	2. Persentase Target Operasi (TO) kasus tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika serta TPPU yang tertangkap tercapai 100%
ANGGARAN		
Pagu Awal Anggaran	:	Rp. 10.283.569.000
Pagu Setelah AA	:	Rp. 9.409.469.000
Realisasi	:	Rp. 2.855.479.672

a. Penetapan Kinerja Direktorat Dakjar

Penetapan kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kerja/perjanjian kinerja secara berjenjang untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi dan disusun sendiri oleh pimpinan instansi pemerintah/unit kerja atau penerima amanah dan disetujui oleh pejabat atasannya. Dokumen Penetapan Kinerja dimanfaatkan oleh setiap pimpinan *instansi* pemerintah untuk; a) memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, b) melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; c) menilai keberhasilan organisasi. Format pernyataan dan lampiran dokumen Penetapan Kinerja berisikan Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, Target, Program dan Anggaran. Dapat di lihat sebagaimana tabel di bawah ini :

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
Meningkatnya penangkapan DPO dan TO kasus tindak pidana narkoba, prekursor narkoba dan TPPU	Persentase DPO kasus tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba serta TPPU yang tertangkap	100%
	Persentase TO kasus tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba serta TPPU yang tertangkap	100%

Dari Indikator kinerja tersebut di atas di implementasikan ke dalam kinerja berbasis *anggaran* dengan penjelasan sebagai berikut :

KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT	RINCIAN OUTPUT	VOLUME
3261.BHB	3261.BHB.001 Operasi Penangkapan DPO Kasus Tindak Pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba serta TPPU	11 DPO
	3261.BHB.002 Operasi Penangkapan TO Kasus Tindak Pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba serta TPPU	11 TO

b. Capaian Kinerja Direktorat Dakjar

Pada Tahun 2024 Direktorat Penindakan dan Pengejaran Deputi Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional telah melaksanakan penindakan dan pengejaran kepada Target Operasi (TO) serta Daftar Pencarian Orang (DPO) dengan capaian sebagai berikut :

1. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Penindakan dan Pengejaran Deputi Bidang Pemberantasan Tahun 2024

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	CAPAIAN
Meningkatnya Penangkapan DPO dan TO Kasus Tindak Pidana Narkotika Prekursor Narkotika dan TPPU	Persentase DPO kasus tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika serta TPPU yang tertangkap	100 %	100 %
	Persentase Target Operasi (TO) kasus tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika serta TPPU yang tertangkap	100 %	100 %

2. Capaian Output Direktorat Penindakan dan Pengejaran Deputi Bidang Pemberantasan Triwulan III TA 2024

SASARAN KEGIATAN	OUTPUT	TARGET	REALISASI	%
Meningkatnya Penangkapan DPO dan TO Kasus Tindak Pidana Narkotika Prekursor Narkotika dan TPPU	DPO kasus tindak pidana narkotika, prekursor narkotika dan TPPU yang tertangkap	11	11	100 %
	TO kasus tindak pidana narkotika, prekursor narkotika dan TPPU yang tertangkap	11	19	100 %

3. Perbandingan Capaian Output Direktorat Penindakan dan Pengejaran Deputi Bidang Pemberantasan periode 2020-2024

SASARAN KEGIATAN	OUTPUT	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Penangkapan DPO dan TO Kasus Tindak Pidana Narkotika Prekursor Narkotika dan TPPU	DPO kasus tindak pidana narkotika, prekursor narkotika dan TPPU yang tertangkap	15	18	15	12	11
	TO kasus tindak pidana narkotika, prekursor	31	34	29	19	19

SASARAN KEGIATAN	OUTPUT	2020	2021	2022	2023	2024
	narkotika dan TPPU yang tertangkap					

c. Pengelolaan Kelompok Kerja K-9

Tugas Pokok Pengelolaan Unit K-9 Satwa Pelacak mencakup Persiapan Bahan Operasi K-9 dan pelaksanaan Operasi K-9 dengan penjabaran sebagai berikut:

1. Operasional K-9

Memberikan *tactical support* pada pelaksanaan kegiatan pengungkapan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) pada lingkungan Deputi Bidang Pemberantasan dengan melaksanakan tugas penyelidikan disertai penggeledahan dengan menggunakan anjing pelacak (Unit K-9) serta penyitaan barang yang diduga narkotika, prekursor narkotika, dan barang-barang yang ada kaitannya dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika.

2. Peningkatan Kemampuan K-9

Kegiatan Peningkatan Kemampuan Satwa K-9 dilakukan baik di dalam fasilitas Mako K-9 sudah dalam bentuk pelatihan rutin serta dilakukan di luar Mako K-9 untuk mengasah keterampilan dalam menghadapi kondisi operasional di lapangan.

a. Pelatihan Rutin di dalam Fasilitas K-9 BNN

- 1) Menyediakan dan melaksanakan kegiatan latihan pelacakan rutin selama 2-3 kali seminggu dengan pembagian waktu latihan pagi (08.00 s.d 12.00) dan sore (13.00 s.d 16.00)
- 2) Menyusun materi pelacakan yang telah disesuaikan dengan tugas operasional lapangan dan terbagi menjadi 7 jenis kegiatan pelacakan, meliputi: Pelacakan Barang, Pelacakan bangunan, Pelacakan kendaraan, Pelacakan orang, Pelacakan kargo, Pelacakan bagasi, dan Pelacakan lapangan
- 3) Mendokumentasikan dan melaporkan seluruh kegiatan latihan pelacakan kepada Pejabat/ Pimpinan Unit Deteksi K9 BNN setiap hari.

3. Pemeliharaan dan Perawatan Satwa K-9

Satwa K-9 BNN yang berada di Mako K-9 BNN sejumlah 54 (lima puluh empat) satwa dan yang tersebar di 15 (lima belas) BNN Provinsi sejumlah 24 (dua puluh empat) satwa, dengan perincian data kondisi dan riwayat kesehatan sebagai berikut :

NO	PENUGASAN	NAMA SATWA	RAS	RIWAYAT PENYAKIT	KONDISI SAAT INI	USIA
1	Mako K-9 BNN RI	Agnez	Labrador	Gangguan kulit/ dermatitis, infeksi parasit darah, endoparasit, dan tumor pada vagina	Tumor pada vagina (observasi dan maintenance suplemen)	5 Tahun 0 Bulan 15 Hari
2	Mako K-9 BNN RI	Alto	Malinois (Mix)	Gangguan alat gerak/ pincang, gangguan kulit/ dermatitis, monorchid, endoparasit, dan alopecia	Pincang (pemberian suplemen tulang dan sendi)	4 Tahun 8 Bulan 25 Hari
3	Mako K-9 BNN RI	Black	Malinois (Mix)	Gastroenteritis, gangguan alat gerak/ pincang, dan vulnus scissum	Baik dan Sehat	5 Tahun 3 Bulan 29

NO	PENUGASAN	NAMA SATWA	RAS	RIWAYAT PENYAKIT	KONDISI SAAT INI	USIA
						Hari
4	Mako K-9 BNN RI	Happy	Beagle	Infeksi parasit darah, endoparasit, discharge putih pada mata, dan abses scapula	Positif antibodi parasit darah Ehrlichia (observasi)	9 Tahun 9 Bulan 18 Hari
5	Mako K-9 BNN RI	Hilo	Malinois (Mix)	Gangguan saluran pencernaan/ gastritis, gangguan alat gerak/ pincang, monorchid, dan infeksi parasit darah	Pincang (pemberian suplemen tulang dan sendi)	4 Tahun 8 Bulan 25 Hari
6	Mako K-9 BNN RI	Polka	Malinois	Radang ambing, gangguan saluran pencernaan/ gastritis, gangguan alat gerak/ pincang, dan endoparasit	Pincang (pemberian suplemen tulang dan sendi)	5 Tahun 11 Bulan 7 Hari
7	Mako K-9 BNN RI	Tara 2	GSD	Infeksi parasit darah, gangguan kulit/ dermatitis, dan gastroenteritis	Baik dan Sehat	9 Tahun 11 Bulan 14 Hari
8	Mako K-9 BNN RI	Ziko	Dutch Shepherd	Gastroenteritis, gangguan jantung, radang kantung empedu/ cholecystitis, nefritis, kristaluria, prostatitis, infeksi parasit darah, endoparasit, dan edema pada elbow	Positif antibodi parasit darah Ehrlichia (observasi)	8 Tahun 1 Bulan 26 Hari
9	Mako K-9 BNN RI	Aba	GSD	Otitis media, gangguan kulit/ dermatitis, dan endoparasit	Perawatan telinga dan maintenance suplemen	5 Tahun 8 Bulan

NO	PENUGASAN	NAMA SATWA	RAS	RIWAYAT PENYAKIT	KONDISI SAAT INI	USIA
					kulit	2 Hari
10	Mako K-9 BNN RI	Agis	Malinois (Mix)	Gastroenteritis, gangguan kulit/ dermatitis, dan otitis externa dextra et sinistra	Perawatan telinga	4 Tahun 8 Bulan 25 Hari
11	Mako K-9 BNN RI	Alpha	Labrador	Gangguan kulit/ dermatitis dan infeksi parasit darah	Positif antibodi parasit darah Ehrlichia (observasi),	5 Tahun 0 Bulan 15 Hari
12	Mako K-9 BNN RI	Amy	Malinois (Mix)	Gangguan kulit/ dermatitis	Baik dan Sehat	5 Tahun 0 Bulan 0 Hari
13	Mako K-9 BNN RI	Beby	Malinois (Mix)	Gangguan alat gerak/ pincang, gastroenteritis, vulnus scissum, dan endoparasit	Baik dan Sehat	5 Tahun 3 Bulan 29 Hari
14	Mako K-9 BNN RI	Gerti	Malinois	Gastroenteritis dan endoparasit	Baik dan Sehat	5 Tahun 9 Bulan 16 Hari
15	Mako K-9 BNN RI	Katci	GSD	Gangguan alat gerak/ pincang, gangguan kulit/ dermatitis, dan infeksi parasit darah	Positif antibodi parasit darah Ehrlichia (observasi) dan maintenance suplemen tulang serta sendi	9 Tahun 10 Bulan 21 Hari
16	Mako K-9 BNN RI	Santi	GSD	Gangguan alat gerak/ pincang, gangguan kulit/ dermatitis, dan infeksi parasit darah	Baik dan Sehat	9 Tahun 8 Bulan 0 Hari
17	Mako K-9 BNN RI	Sjors	Malinois	Gangguan alat gerak/ pincang,	Baik dan Sehat	5 Tahun

NO	PENUGASAN	NAMA SATWA	RAS	RIWAYAT PENYAKIT	KONDISI SAAT INI	USIA
				endoparasit, dan abses pada caudal ekor		9 Bulan 8 Hari
18	Mako K-9 BNN RI	Adellaide	Labrador	Gangguan kulit/ dermatitis dan infeksi parasit darah	Baik dan Sehat	5 Tahun 0 Bulan 15 Hari
19	Mako K-9 BNN RI	Artist	Malinois (Mix)	Hygroma pada siku kaki, infeksi parasit darah, gastroenteritis, dan endoparasit	Baik dan Sehat	5 Tahun 0 Bulan 0 Hari
20	Mako K-9 BNN RI	Chance	Malinois	Vulnus scissum, gangguan alat gerak/ pincang, gastroenteritis, vulnus morsum, tumor pada glandula mammae, endoparasit, dan infeksi heartworm	Baik dan Sehat (observasi berkala infeksi heartworm)	5 Tahun 10 Bulan 24 Hari
21	Mako K-9 BNN RI	Maja	Labrador	Infeksi parasit darah, gangguan alat gerak/ pincang, gangguan kulit/ dermatitis, gingivitis, tumor mammae, gastroenteritis/ konstipasi, cholecystitis, Dilated cardiomyopathy (DCM), uretritis, dan hematuria	Perawatan harian intensif	9 Tahun 11 Bulan 19 Hari
22	Mako K-9 BNN RI	Moshi	Malinois (Mix)	Gangguan kulit/ dermatitis, gastroenteritis, dan infeksi mata	Baik dan Sehat	5 Tahun 3 Bulan 29 Hari
23	Mako K-9 BNN RI	Pepa	Malinois	Gastroenteritis, vulnus scissum, gangguan alat	Baik dan Sehat (maintenance)	10 Tahun 6

NO	PENUGASAN	NAMA SATWA	RAS	RIWAYAT PENYAKIT	KONDISI SAAT INI	USIA
				gerak/ pincang, cystitis, gangguan kulit/ dermatitis, hygroma pada siku kaki, infeksi mata, dan endoparasit	suplemen kulit)	Bulan 28 Hari
24	Mako K-9 BNN RI	Thanos	Malinois (Mix)	Gangguan alat gerak/ pincang dan gastroenteritis	Pincang (pemberian suplemen tulang dan sendi)	5 Tahun 3 Bulan 29 Hari
25	Mako K-9 BNN RI	Tyngy	Pointer	Infeksi pada telinga dan infeksi parasit darah	Positif antibodi parasit darah Lyme, Anaplasma, dan Ehrlichia (observasi)	5 Tahun 10 Bulan 12 Hari
26	Mako K-9 BNN RI	Dexo	GSD	Infeksi parasit darah, gangguan alat gerak/ pincang, gastroenteritis, otitis media, gingivitis, dan vulnus scissum	Perawatan telinga, pincang (pemberian suplemen tulang dan sendi), serta positif antibodi parasit darah Ehrlichia (observasi)	10 Tahun 0 Bulan 26 Hari
27	Mako K-9 BNN RI	Anita	Malinois (Mix)	Hygroma pada siku kaki, gangguan alat gerak/ pincang, vulnus scissum, vulnus morsum, dan endoparasit	Baik dan Sehat	5 Tahun 0 Bulan 0 Hari
28	Mako K-9 BNN RI	Anubis	Malinois (Mix)	Gangguan alat gerak/ pincang, gastroenteritis, gangguan kulit/ dermatitis, dan otitis externa	Perawatan telinga	4 Tahun 8 Bulan 25 Hari
29	Mako K-9 BNN RI	Boltik	GSD	Otitis externa, gangguan kulit/ dermatitis,	Perawatan telinga dan observasi	5 Tahun 10

NO	PENUGASAN	NAMA SATWA	RAS	RIWAYAT PENYAKIT	KONDISI SAAT INI	USIA
				vulnus laceratum, endoparasit, dan urolithiasis	pasca operasi urolithiasis	Bulan 4 Hari
30	Mako K-9 BNN RI	Floris	Beagle	Gangguan alat gerak/ pincang, vulnus laceratum, infeksi parasit darah, dan endoparasit	Baik dan Sehat	10 Tahun 5 Bulan 26 Hari
31	Mako K-9 BNN RI	Fred	Belgian Shepherd	Infeksi parasit darah, vulnus scissum, vulnus laceratum, gangguan alat gerak/ pincang, vulnus morsum, endoparasit, dan gangguan kulit/ dermatitis	Pincang (pemberian suplemen tulang dan sendi) serta maintenance suplemen kulit	9 Tahun 10 Bulan 24 Hari
32	Mako K-9 BNN RI	Lola	Malinois	Vulnus scissum, gangguan alat gerak/ pincang, endoparasit, infeksi parasit darah, gangguan kulit/ dermatitis, dan anemia	Baik dan Sehat	5 Tahun 11 Bulan 0 Hari
33	Mako K-9 BNN RI	Marley	Malinois	Vulnus scissum, vulnus morsum, endoparasit, dan infeksi parasit darah	Baik dan Sehat	5 Tahun 11 Bulan 8 Hari
34	Mako K-9 BNN RI	Mosha	Malinois (Mix)	Infeksi pada mata, vulnus laceratum, vulnus scissum, gangguan alat gerak/ pincang, dan endoparasit	Baik dan Sehat (maintenance suplemen tulang dan sendi)	5 Tahun 3 Bulan 29 Hari
35	Mako K-9 BNN RI	Nara	Malinois (Mix)	Gangguan kulit/ dermatitis, vulnus scissum, dan endoparasit	Baik dan Sehat (maintenance suplemen kulit)	4 Tahun 8 Bulan 25 Hari

NO	PENUGASAN	NAMA SATWA	RAS	RIWAYAT PENYAKIT	KONDISI SAAT INI	USIA
36	Mako K-9 BNN RI	Zonora	Dutch Shepherd	Gangguan alat gerak/ pincang, vulnus scissum, gangguan kulit/ dermatitis, tumor pada glandula mammae, dan endoparasit	Baik dan Sehat	5 Tahun 9 Bulan 27 Hari
37	Mako K-9 BNN RI	Almo	Malinois (Mix)	Gangguan alat gerak/ pincang dan gangguan kulit/ dermatitis	Baik dan Sehat	5 Tahun 0 Bulan 0 Hari
38	Mako K-9 BNN RI	Amber	GSD	Gangguan alat gerak/ pincang, gangguan saluran pencernaan, dan endoparasit	Pincang (pemberian suplemen tulang dan sendi)	5 Tahun 9 Bulan 0 Hari
39	Mako K-9 BNN RI	Anty	Malinois (Mix)	Gangguan kulit/ dermatitis dan hygroma pada siku kaki	Baik dan Sehat	5 Tahun 0 Bulan 0 Hari
40	Mako K-9 BNN RI	Aragon	Labrador	Gangguan kulit/ dermatitis dan infeksi parasit darah	Positif antibodi parasit darah Lyme, Anaplasma, dan Ehrlichia (observasi)	5 Tahun 0 Bulan 15 Hari
41	Mako K-9 BNN RI	Boy	Beagle	Abses femur dextra	Baik dan Sehat (observasi berkala abses femur dextra)	10 Tahun 6 Bulan 2 Hari
42	Mako K-9 BNN RI	Chibi	Malinois (Mix)	Gangguan alat gerak/ pincang, gastroenteritis, auricular hematoma, dan endoparasit	Baik dan Sehat	5 Tahun 3 Bulan 29 Hari
43	Mako K-9 BNN RI	Csipi	Malinois	Gangguan kulit/ dermatitis, gangguan alat gerak/ pincang, infeksi parasit	Baik dan Sehat	5 Tahun 6 Bulan 8 Hari

NO	PENUGASAN	NAMA SATWA	RAS	RIWAYAT PENYAKIT	KONDISI SAAT INI	USIA
				darah, vulnus laceratum, gastroenteritis, dan endoparasit		
44	Mako K-9 BNN RI	Greenty	Malinois (Mix)	Gastroenteritis, tumor lymphoma pada pangkal ekor, gangguan kulit/ dermatitis, gangguan alat gerak/ pincang, dan penurunan fungsi hati	Penurunan fungsi hati (observasi dan maintenance suplemen)	5 Tahun 3 Bulan 29 Hari
45	Mako K-9 BNN RI	Max	Labrador	Gangguan kulit/ dermatitis, gangguan pada kuku, endoparasit, penurunan fungsi ginjal, dan anemia	Penurunan fungsi ginjal dan anemia (perawatan intensif dan maintenance suplemen)	5 Tahun 7 Bulan 29 Hari
46	Mako K-9 BNN RI	Ali	GSD	Infeksi parasit darah, gangguan alat gerak/ pincang, dan endoparasit	Pincang (pemberian suplemen tulang dan sendi) serta positif antibodi parasit darah Ehrlichia (obsevasi)	9 Tahun 10 Bulan 25 Hari
47	Mako K-9 BNN RI	Arash	Malinois (Mix)	Gangguan alat gerak/ pincang, gangguan kulit/ dermatitis, monorchid, dan odema pada kaki	Baik dan Sehat (maintenance suplemen kulit)	4 Tahun 8 Bulan 25 Hari
48	Mako K-9 BNN RI	Aztec	Labrador	Vulnus scissum dan endoparasit	Baik dan Sehat	5 Tahun 0 Bulan 15 Hari
49	Mako K-9 BNN RI	Erika	GSD	Gangguan alat gerak/ pincang, gangguan kulit/ dermatitis, dan endoparasit	Baik dan Sehat (maintenance suplemen kulit)	5 Tahun 10 Bulan 27 Hari

NO	PENUGASAN	NAMA SATWA	RAS	RIWAYAT PENYAKIT	KONDISI SAAT INI	USIA
						Hari
50	Mako K-9 BNN RI	Hugo	Malinois (Mix)	Gastroenteritis, infeksi parasit darah, gangguan kulit/ dermatitis, gangguan alat gerak/ pincang, dan endoparasit	Baik dan Sehat (maintenance suplemen kulit)	5 Tahun 3 Bulan 29 Hari
51	Mako K-9 BNN RI	James	Malinois	Gastroenteritis, vulnus morsum, dan vulnus scissum	Baik dan Sehat	5 Tahun 8 Bulan 7 Hari
52	Mako K-9 BNN RI	Judo	Malinois (Mix)	Gastroenteritis, vulnus scissum, vulnus laceratum, endoparasit, gangguan alat gerak/ pincang, dan gangguan kulit/ dermatitis	Pemberian probiotik dan maintenance suplemen kulit	5 Tahun 3 Bulan 29 Hari
53	Mako K-9 BNN RI	Lady	Beagle	Infeksi parasit darah, vulnus scissum, dan gastroenteritis	Positif antibodi parasit darah Ehrlichia (obsevasi)	10 Tahun 2 Bulan 24 Hari
54	Mako K-9 BNN RI	Milla	GSD	Gastroenteritis, vulnus morsum, gangguan alat gerak/ pincang, infeksi parasit darah, dan vulnus scissum	Baik dan Sehat	5 Tahun 10 Bulan 25 Hari
55	BNNP Aceh	Rex 1	GSD	Infeksi parasit darah, gangguan kulit/ dermatitis, dan hygroma pada siku kanan depan	Baik dan Sehat	9 Tahun 10 Bulan 11 Hari
56	BNNP Bali	Baru	Labrador	Infeksi parasit darah dan gastroenteritis	Baik dan Sehat	10 Tahun 0 Bulan 3 Hari

NO	PENUGASAN	NAMA SATWA	RAS	RIWAYAT PENYAKIT	KONDISI SAAT INI	USIA
57	BNNP Bali	Willem	Malinois	Gastroenteritis	Baik dan Sehat	5 Tahun 9 Bulan 22 Hari
58	BNNP Banten	Dina	Malinois	Gastroenteritis, gangguan kulit/ dermatitis, dan tumor glandula mammae	Baik dan Sehat	5 Tahun 11 Bulan 15 Hari
59	BNNP Jambi	Kees	GSD	Gangguan alat gerak/ pincang	Baik dan Sehat	5 Tahun 11 Bulan 2 Hari
60	BNNP Jambi	Sa'mi	GSD	Gangguan alat gerak/ pincang dan infeksi parasit darah	Baik dan Sehat	9 Tahun 11 Bulan 29 Hari
61	BNNP Jawa Barat	Axel	Malinois	Infeksi parasit darah, hygroma pada siku kanan depan, gangguan kulit/ dermatitis, dan gastroenteritis	Observasi dan maintenance penyakit berulang	10 Tahun 0 Bulan 20 Hari
62	BNNP Jawa Tengah	Charlie	Malinois	Infeksi parasit darah	Baik dan Sehat	9 Tahun 11 Bulan 2 Hari
63	BNNP Jawa Tengah	Semir	GSD	Infeksi parasit darah dan tumor pada area kulit	Observasi dan maintenance penyakit berulang	10 Tahun 4 Bulan 12 Hari
64	BNNP Jawa Timur	Pongky	Labrador	Infeksi parasit darah	Baik dan Sehat	10 Tahun 3 Bulan 4 Hari
65	BNNP Jawa Timur	Rony	GSD	Infeksi parasit darah	Baik dan Sehat	10 Tahun

NO	PENUGASAN	NAMA SATWA	RAS	RIWAYAT PENYAKIT	KONDISI SAAT INI	USIA
						0 Bulan 3 Hari
66	BNNP Kalimantan Timur	Mac	GSD	Gangguan alat gerak/ pincang	Baik dan Sehat	6 Tahun 10 Bulan 1 Hari
67	BNNP Kalimantan Timur	Tara 1	GSD	Infeksi parasit darah	Baik dan Sehat	10 Tahun 0 Bulan 28 Hari
68	BNNP Kepulauan Riau	Purga	GSD	Gangguan alat gerak/ pincang dan gangguan kulit/ dermatitis	Baik dan Sehat	5 Tahun 9 Bulan 0 Hari
69	BNNP Kepulauan Riau	Thor	Labrador	Gangguan alat gerak/ pincang	Observasi dan maintenance penyakit berulang	10 Tahun 4 Bulan 22 Hari
70	BNNP Lampung	Jesy	Belgian Malinois Mix	Infeksi parasit darah	Baik dan Sehat	9 Tahun 10 Bulan 2 Hari
71	BNNP Lampung	Tina	Malinois	Infeksi parasit darah	Baik dan Sehat	10 Tahun 3 Bulan 28 Hari
72	BNNP Riau	Bigi	GSD	Infeksi parasit darah	Observasi dan maintenance penyakit berulang	9 Tahun 10 Bulan 24 Hari
73	BNNP Sulawesi Selatan	Ben (Rexo)	GSD	Gangguan alat gerak/ pincang dan infeksi parasit darah	Baik dan Sehat	9 Tahun 10 Bulan 27 Hari

NO	PENUGASAN	NAMA SATWA	RAS	RIWAYAT PENYAKIT	KONDISI SAAT INI	USIA
74	BNNP Sulawesi Utara	Solin	Labrador	Infeksi parasit darah	Observasi dan maintenance penyakit berulang	10 Tahun 0 Bulan 12 Hari
75	BNNP Sumatera Selatan	Dagi	Malinois	Infeksi parasit darah, gangguan mata, penurunan fungsi mata, dan penurunan fungsi ginjal	Penurunan fungsi ginjal	10 Tahun 0 Bulan 21 Hari
76	BNNP Sumatera Selatan	Carina	GSD	Gangguan kulit/ dermatitis	Tumor pada kaki belakang	5 Tahun 11 Bulan 1 Hari
77	BNNP Sumatera Utara	Billy	Labrador	Infeksi parasit darah dan gangguan pada tulang punggung	Gangguan pada tulang punggung	10 Tahun 2 Bulan 6 Hari
78	BNNP Sumatera Utara	Morgan	Labrador	Infeksi parasit darah dan gangguan fungsi ginjal	Observasi dan maintenance penyakit berulang	9 Tahun 11 Bulan 21 Hari

d. Realisasi Penggunaan Anggaran Tahun Anggaran 2024

RINCIAN OUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMPONEN/ DETAIL	PAGU REV	REALISASI	%
3261.BHB.001 Operasi Penangkapan DPO Kasus Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika serta TPPU	6.451.914.000	6.450.418.061	99,98
051. Operasi Penangkapan DPO Kasus Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika serta TPPU	6.451.914.000	6.450.418.061	99,98
A. <i>Pengejaran Daftar Pencarian Orang</i>	5.996.600.000	5.996.452.981	100
B. <i>Koordinasi ke Luar Negeri dalam Rangka Penyelidikan</i>	172.614.000	172.610.438	100
C. <i>Penggalangan Informasi DPO</i>	282.700.000	281.354.642	99,52
3261.BHB.002 Operasi Penangkapan TO Kasus Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika serta TPPU	7,316,969,000	7,311,605,309	99,93
052. Operasi Penangkapan TO Kasus Tindak Pidana Narkotika, Prekursor Narkotika serta TPPU	5.915.000.000	5.914.811.203	100
053. Pengelolaan Unit K-9 Satwa Pelacak	1.353.569.000	1.348.704.506	99,64
A. <i>Operasi Kegiatan penyelidikan K9</i>	600.000.000	599.374.931	99,90
B. <i>Operasi Peningkatan Kemampuan K-9</i>	325.000.000	321.883.895	99,04
C. <i>Sarana Perlengkapan Operasi Pelacakan K9</i>	428.569.000	427.445.680	99,74
054. Monitoring dan evaluasi	48.400.000	48.089.600	99,36
TOTAL	13.768.883.000	13.762.023.370	99,95 %

6. Direktorat Wastahti

Unit Eselon II	:	Direktorat Wastahti
Kegiatan	:	Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti
Sasaran	:	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkoba
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. Nilai Tingkat keamanan, Ketertiban dan Kesehatan Tahanan 2. Nilai Tingkat Keamanan Barang Bukti Narkoba dan Non-Narkoba
Capaian Kegiatan	:	1. Tingkat Keamanan, Ketertiban dan Kesehatan Tahanan = 100 % 2. Tingkat Keamanan, Barang Bukti Narkoba dan Non Narkoba = 100%
ANGGARAN		
Pagu Awal Anggaran	:	Rp. 10.347.614.000
Pagu Setelah AA	:	
Realisasi	:	Rp. 4.183.110.311

a. Penetapan Kinerja Direktorat Wastahti

Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kerja/perjanjian kinerja secara berjenjang untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi dan disusun sendiri oleh pimpinan instansi pemerintah/unit kerja atau penerima amanah dan disetujui oleh pejabat atasannya.

Adapun Perjanjian Kinerja Direktorat Wastahti Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel Perjanjian Kinerja Direktorat Wastahti T.A. 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Nilai Tingkat Keamanan, Ketertiban dan Kesehatan Tahanan	100
		Nilai Tingkat Keamanan Barang Bukti Narkotika dan Non-Narkotika	100

b. Capaian Kinerja Direktorat Wastahti

Dari sasaran tersebut dapat disimpulkan bahwa semua sasaran yang telah ditetapkan terhadap Direktorat Wastahti telah memenuhi target dari yang telah ditentukan. Pada Tahun 2024 Direktorat Wastahti telah melaksanakan kegiatan sebagaimana target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja (PK) serta penjelasan hasil capaian yang diuraikan sebagai berikut :

Tabel Realisasi Kinerja Direktorat Wastahti T.A. 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Nilai Tingkat Keamanan, Ketertiban dan Kesehatan Tahanan	100	100
		Nilai Tingkat Keamanan Barang Bukti Narkotika dan Non-Narkotika	100	100

c. Evaluasi Capaian Kinerja

Guna mengetahui lebih jauh tentang capaian kinerja yang telah dilakukan Direktorat Wastahti selama kurun waktu Tahun 2024, perlu dilakukan evaluasi dengan cara melakukan analisis yang berkaitan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan. Analisis dilakukan dengan menyajikan perkembangan capaian, baik dalam bentuk narasi maupun tabel atau grafik. Capaian kinerja Tahun 2024 merupakan kelanjutan capaian periode tahun sebelumnya, dan capaian ini merupakan arah untuk capaian pada periode selanjutnya, sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Direktorat Wastahti.

Tabel Perbandingan Capaian Kinerja Direktorat Wastahti
2022,2023,2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	2022	2023	2024
1	Meningkatnya Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Nilai Tingkat Keamanan, Ketertibandan Kesehatan Tahanan	100	100	100
		Nilai Tingkat Keamanan Barang Bukti Narkotika dan Non-Narkotika	100	100	100

Sasaran strategis di atas, diimplementasikan melalui 2 (dua) indikator kinerja sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIA N (%)
Nilai tingkat Kemanan, Ketertiban, dan Kesehatan Tahanan	100	100	100%
Nilai tingkat Keamanan Barang Bukti Narkotika dan Non Narkotika	100	100	100 %
Jumlah			

Secara umum sasaran strategis pada Direktorat Wastahti adalah Kualitas layanan pengawasan dan perawatan tahanan dan barang bukti tindak pidana narkotika.

1. Layanan Pengawasan Dan Perawatan Tahanan

Pada Tahun 2024, Penyidik BNN dan BNNP telah menahan orang sebanyak 987 orang yang terdiri dari:

- a. Laki- laki 913 orang
- b. Perempuan 74 orang

Adapun tahanan yang ditangkap dan ditahan di:

NO	SATKER	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	BNN RI	130	7	137
2	Aceh	23	1	24
3	Sumatera Utara	60	5	65
4	Sumatera Barat	13	1	14
5	Riau	39	0	39
6	Kepulauan Riau	41	2	43
7	Jambi	46	2	48
8	Bangka Belitung	17	1	18
9	Sumatera Selatan	19	1	20
10	Bengkulu	12	1	13
11	Lampung	9	1	10
12	BANTEN	13	0	13
13	DKI Jakarta	20	1	21
14	Jawa Barat	34	2	36
15	Jawa Tengah	20	0	20
16	DI Yogyakarta	19	2	21
17	Jawa Timur	51	5	56
18	Kalimantan Barat	9	1	10
19	Kalimantan Selatan	26	1	27
20	Kalimantan Timur	45	2	47
21	Kalimantan Tengah	22	2	24
22	Kalimantan Utara	31	3	34
23	Sulawesi Selatan	40	3	43
24	Sulawesi Barat	13	3	16
25	Sulawesi Tengah	19	2	21
26	Sulawesi Tenggara	6	4	10
27	Sulawesi Utara	14	3	17
28	Maluku	18	1	19

NO	SATKER	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
29	Maluku Utara	10	0	10
30	Gorontalo	8	2	10
31	Bali	45	11	56
32	NTB	30	5	35
33	NTT	2	0	2
34	Papua	13	0	13
35	Papua Barat	6	0	6
TOTAL		913	74	987

Untuk Kegiatan tahanan di BNNP DKI dan ditempatkan di Rutan BNN, di mana tahanan yang ditangkap dan ditahan di Rutan BNN sebanyak 21 orang terdiri dari 20 laki-laki 1 perempuan.

BNN mempunyai cabang rutan Adapun cabang rutan yang dimaksud adalah:

1. Rutan BNN cabang Rutan Klas I Cipinang
2. Rutan BNNP NAD cabang Rutan Klas II B Janto
3. Rutan BNNP Sumatera Utara cabang Rutan Klas I Medan
4. Rutan BNNP Kepulauan Riau cabang Rutan Klas I Siak Indrapura
5. Rutan BNNP Sumatera Selatan cabang Rutan Klas I Palembang
6. Rutan BNNP Kepulauan Babel cabang Rutan Sungai Liat di Muntok
7. Rutan BNNP Banten cabang Rutan Klas II B Serang
8. Rutan BNNP DIY cabang Rutan Klas II B Wonosari
9. Rutan BNNP Kaltim cabang Rutan Klas II B Samarinda
10. Rutan BNNP Kalteng cabang Rutan Klas II B Kuala Kapuas
11. Rutan BNNP Sulawesi Selatan cabang Rutan Klas I Makassar
12. Rutan BNNP Sulawesi Tengah cabang Rutan Klas II A Palu
13. Rutan BNNP Sulawesi Tenggara cabang Rutan Klas II A Kendari

14. Rutan BNNP Bali cabang Rutan Klas II B Bangli
15. Rutan BNNP NTB cabang Rutan Klas II B Selong
16. Rutan BNNP Maluku cabang Rutan Klas II A Ambon
17. Rutan BNNP Maluku Utara cabang Rutan Klas II B Ternate
18. Rutan BNNP Jawa Barat cabang Rutan Klas I Bandung
19. Rutan BNNP Jawa Tengah cabang Rutan Klas I Semarang
20. Rutan BNNP Jawa Timur cabang Rutan Klas I Surabaya.

2. Layanan Pengawasan Dan Perawatan Barang Bukti

Dalam pelaksanaan pengawasan dan perawatan barang bukti pada Tahun 2024, Direktorat Wastahti melaksanakan kegiatan pemusnahan barang bukti dan barang sitaan BNNP di sajikan pada table berikut :

Barang Bukti BNN RI Tahun 2024

NARKOTIKA											PREKURSOR NARKOTIKA										
SABU (gram)	EKSTASI (butir)	GANJA (gram)	HEROIN (gram)	KOKAIN (gram)	MDMB-Inaca (Syntetich Cannabinoid) (gram)	Mefedron (Butir)	Dimetiltriptamina (DMT) (gram)	Dimetiltriptamina (DMT) (ml)	PCC (gram)	PCC (butir)	Calium Carbonat (gram)	Bahan Kimia Padat (gram)	Bahan Kimia Cair (ml)	Paracetamol (gram)	Magnesium Stearat (gram)	Sodium Starch Glycolate (gram)	Cellulose (gram)	Caffeine (gram)	Metanol (ml)	Lactose (gram)	Providone (gram)
397.213,89	114.651	689.238,30	2.407,00	4.326,00	621,98	38.060	20,50	491,50	2.430,00	970.864	501,60	17.843,73	77.997,50	1.400.200,00	208.800,00	309.300,00	309.800,00	426.800,00	39.950,00	24.900,00	25.000,00

Barang Bukti BNNP Tahun 2024

DATA PENERIMAAN BARANG BUKTI NARKOTIKA BNN PROVINSI PERIODE JANUARI - 31 DESEMBER 2024											
NAMA PROVINSI	SABU (GRAM)	GANJA (GRAM)	EKSTASI (BUTIR)	EKSTASI (GRAM)	TEBPAKAU SINTETIS (GRAM)	SABU CAIR (ML)	COOKIES GANJA (BUAH)	POHON GANJA (GRAM)	GANJA SINTETIK (GRAM)	HASIS (GRAM)	TABLET NARKOTIKA (BUTIR)
BNNP ACEH	3.591,84	254.459,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BNNP SUMATERA UTARA	43.282,78	9.563,20	7.784,00	0	0	0	0	0	0	0	0
BNNP SUMATERA BARAT	990,42	140.699,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BNNP SUMATERA SELATAN	29.918,46	49.572,38	14	0	25	0	0	0	0	0	0
BNNP BENGKULU	2,34	415,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BNNP JAMBI	5.117,70	0	0	34,92	0	0	0	0	0	0	0
BNNP RIAU	31.962,18	803,4	86.058,50	0	0	0	0	0	0	0	0
BNNP KEPULAUAN RIAU	293.626,83	2.361,96	40.054,00	0	0	42.540,00	0	0	0	0	0
BNNP BANGKA BELITUNG	570,88	54.940,00	173	0	0	0	0	0	0	0	0
BNNP LAMPUNG	1.108,80	8.180,08	0	2,48	0	0	0	0	0	0	0
BNNP BANTEN	21.477,03	119.202,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BNNP JAWA BARAT	8.570,19	59.842,39	0	0	20,93	0	0	0	0	0	0
BNNP JAWA TENGAH	1.507,70	6.988,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BNNP D.I YOGYAKARTA	1.738,58	995,97	0	0	0	0	0	0	0	0	10
BNNP JAWA TIMUR	12.475,76	3.899,85	4.024,00	0	0	0	0	0	0	0	0
BNNP BALI	1.458,85	27.345,62	363	0	0	0	0	0	0	651,69	0
BNNP NUSA TENGGARA TIMUR	1,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BNNP NUSA TENGGARA BARAT	86,63	4.738,95	7	0	0	0	0	8115,98	0	0	0
BNNP KALIMANTAN SELATAN	433,57	2.009,40	20	0	0	0	0	0	0	0	0
BNNP KALIMANTAN BARAT	21.116,58	18.883,72	6,16	0	0	0	0	0	0	0	0
BNNP KALIMANTAN TIMUR	134,99	3.668,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BNNP KALIMANTAN TENGAH	945,97	848,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BNNP KALIMANTAN UTARA	5.134,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BNNP SULAWESI SELATAN	1.120,53	28.929,59	0	0	0	0	464,47	0	325,2572	0	0
BNNP SULAWESI TENGAH	90,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BNNP SULAWESI TENGGARA	5.453,11	2.108,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BNNP SULAWESI BARAT	763,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BNNP SULAWESI UTARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BNNP GORONTALO	8,4	199,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BNNP MALUKU	122,29	648,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BNNP MALUKU UTARA	168,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BNNP PAPUA	7,39	1.405,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BNNP PAPUA BARAT	19,84	1.994,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	493.006,14	802.503,07	138.503,66	37,38	45,93	42.540,00	464,47	8.115,98	325,26	651,69	10,00

3. Layanan Asesmen Terpadu

Berdasarkan Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Asesmen Terpadu Tahun Anggaran 2024, bahwa pelaksanaan Layanan Asesmen terhadap Pecandu Narkotika atau Korban Penyalahgunaan Narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum sebagai Tersangka maka dibentuk dan ditunjuk Tim Asesmen Terpadu dilaksanakan oleh Deputi Pemberantasan BNN cq Direktorat Pengawasan Tahanan sebagai pelaksana Layanan Asesmen Terpadu, selanjutnya dalam pelaksanaan kegiatan TAT ditunjuk Direktur Wastahti sebagai ketua TAT tingkat Nasional, Kepala BNNP sebagai ketua TAT tingkat Provinsi dan Kepala BNN Kab/Kota sebagai ketua TAT Tingkat Kab/Kota.

CAPAIAN LAYANAN TAT PER DESEMBER 2024

NO	SATUAN KERJA	TOTAL TARGET	CAPAIAN (ORANG)	REKOMENDASI (ORANG)		
				REHAB DI LEMBAGA REHAB	REHAB DI LAPAS/ RUTAN/ (PROSES HUKUM LANJUT)	TIDAK REHAB (PROSES HUKUM)
1	DIREKTORAT WASTAHTI DEPUTI BIDANG PEMBERANTASAN	35	35	35	0	0
2	BNN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM	4	27	23	4	0
3	BNN KAB PIDIE JAYA	1	0	0	0	0
4	BNN KAB BIREUEN	8	10	3	7	0
5	BNN KAB ACEH SELATAN	0	12	10	2	0
6	BNN PROVINSI SUMATERA UTARA	45	144	133	11	0
7	BNN KAB KARO	4	46	0	46	0
8	BNN KOTA BINJAI	4	68	66	0	2
9	BNN KOTA TANJUNG BALAI	8	17	3	0	14
10	BNN KOTA GUNUNGSITOLI	7	22	0	22	0
11	BNN KAB LANGKAT	8	79	78	1	0
12	BNN KAB ASAHAN	4	112	107	5	0
13	BNN KAB MANDAILING NATAL	4	35	33	2	0
14	BNN KAB TAPANULI SELATAN	8	26	15	9	2
15	BNN KAB SERDANG BEDAGAI	6	154	0	154	0
16	BNN KOTA TEBING TINGGI	9	15	15	0	0
17	BNN KAB LABUHANBATU UTARA	32	53	0	27	26
18	BNN KAB SIMALUNGUN	22	29	0	4	25
19	BNN KAB DELI SERDANG	0	203	0	203	0

NO	SATUAN KERJA	TOTAL TARGET	CAPAIAN (ORANG)	REKOMENDASI (ORANG)		
				REHAB DI LEMBAGA REHAB	REHAB DI LAPAS/ RUTAN/ (PROSES HUKUM LANJUT)	TIDAK REHAB (PROSES HUKUM)
20	BNN KAB BATU BARA	0	149	0	148	1
21	BNN KOTA PEMATANG SIANTAR	30	108	90	6	12
22	BNN PROVINSI SUMATERA BARAT	40	80	71	9	0
23	BNN KOTA SAWAHLUNTO	12	17	10	5	2
24	BNN KOTA PAYAKUMBUH	50	101	35	0	66
25	BNN KAB SOLOK	8	1	1	0	0
26	BNN KAB PASAMAN BARAT	25	23	1	22	0
27	BNN PROVINSI RIAU	247	231	215	14	2
28	BNN KAB KUANTAN SINGINGI	1	1	1	0	0
29	BNN KAB PELALAWAN	18	17	8	9	0
30	BNN KOTA PEKANBARU	18	15	15	0	0
31	BNN PROVINSI JAMBI	15	40	36	4	0
32	BNN KAB TANJUNG JABUNG TIMUR	19	0	0	0	0
33	BNN KAB BATANGHARI	2	2	2	0	0
34	BNN PROVINSI SUMATERA SELATAN	36	40	34	0	6
35	BNN KOTA PAGARALAM	0	6	6	0	0
36	BNN KAB EMPAT LAWANG	0	0	0	0	0
37	BNN PROVINSI LAMPUNG	100	349	303	43	3
38	BNN KAB TANGGAMUS	1	15	15	0	0
39	BNN KAB LAMPUNG SELATAN	35	84	36	48	0
40	BNN KOTA METRO	13	33	14	19	0

NO	SATUAN KERJA	TOTAL TARGET	CAPAIAN (ORANG)	REKOMENDASI (ORANG)		
				REHAB DI LEMBAGA REHAB	REHAB DI LAPAS/ RUTAN/ (PROSES HUKUM LANJUT)	TIDAK REHAB (PROSES HUKUM)
41	BNN KAB WAY KANAN	20	42	35	7	0
42	BNN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	2	13	9	4	0
43	BNN KAB BANGKA	2	6	5	0	1
44	BNN KAB BELITUNG	2	1	1	0	0
45	BNN KOTA PANGKALPINANG	0	0	0	0	0
46	BNN KAB BANGKA SELATAN	0	0	0	0	0
47	BNN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	13	19	2	17	0
48	BNN KOTA BATAM	0	0	0	0	0
49	BNN PROVINSI BENGKULU	12	16	5	11	0
50	BNN KOTA BENGKULU	1	1	1	0	0
51	BNN KAB BENGKULU SELATAN	0	0	0	0	0
52	BNN PROVINSI DKI JAKARTA	40	74	0	74	0
53	BNN KOTA JAKARTA SELATAN	315	1460	1464	3	0
54	BNN KOTA JAKARTA TIMUR	18	312	305	7	0
55	BNN KOTA JAKARTA UTARA	144	184	157	24	3
56	BNN PROVINSI BANTEN	97	85	58	24	3
57	BNN KOTA CILEGON	3	2	0	2	0
58	BNN PROVINSI JAWA BARAT	20	44	44	0	0
59	BNN KAB CIAMIS	0	41	38	3	0
60	BNN KAB BOGOR	1	52	52	0	0
61	BNN KAB CIANJUR	2	11	11	0	0
62	BNN KOTA CIREBON	20	74	74	0	0

NO	SATUAN KERJA	TOTAL TARGET	CAPAIAN (ORANG)	REKOMENDASI (ORANG)		
				REHAB DI LEMBAGA REHAB	REHAB DI LAPAS/ RUTAN/ (PROSES HUKUM LANJUT)	TIDAK REHAB (PROSES HUKUM)
63	BNN KAB KUNINGAN	0	34	29	5	0
64	BNN KOTA CIMAHI	30	102	102	0	0
65	BNN KAB SUKABUMI	5	42	38	4	0
66	BNN KAB GARUT	2	14	14	0	0
67	BNN KOTA DEPOK	0	0	0	0	0
68	BNN KAB KARAWANG	3	68	66	2	0
69	BNN KOTA TASIKMALAYA	6	36	26	8	2
70	BNN KAB SUMEDANG	4	22	22	0	0
71	BNN PROVINSI JAWA TENGAH	40	172	0	164	8
72	BNN KAB TEMANGGUNG	20	33	4	29	0
73	BNN KOTA TEGAL	15	15	4	10	1
74	BNN KAB BANYUMAS	13	12	3	8	1
75	BNN KAB CILACAP	2	49	0	49	0
76	BNN KAB KENDAL	9	19	0	19	0
77	BNN KAB BATANG	10	9	0	9	0
78	BNN KAB PURBALINGGA	10	19	0	19	0
79	BNN KAB MAGELANG	6	14	1	13	0
80	BNN KOTA SURAKARTA	20	88	0	80	8
81	BNN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	35	65	16	49	0
82	BNN KAB SLEMAN	15	27	1	25	1
83	BNN KAB BANTUL	5	10	0	9	1
84	BNN PROVINSI JAWA TIMUR	340	911	881	27	3

NO	SATUAN KERJA	TOTAL TARGET	CAPAIAN (ORANG)	REKOMENDASI (ORANG)		
				REHAB DI LEMBAGA REHAB	REHAB DI LAPAS/ RUTAN/ (PROSES HUKUM LANJUT)	TIDAK REHAB (PROSES HUKUM)
85	BNN KOTA SURABAYA	5	348	340	8	0
86	BNN KAB SUMENEP	13	20	9	11	0
87	BNN KOTA MOJOKERTO	20	85	80	5	0
88	BNN KOTA MALANG	12	12	11	1	0
89	BNN KOTA BATU	36	36	32	4	0
90	BNN KAB PASURUAN	62	72	71	1	0
91	BNN KAB TULUNGAGUNG	10	26	18	6	2
92	BNN KAB NGANJUK	46	50	48	2	0
93	BNN KOTA KEDIRI	30	29	22	7	0
94	BNN KAB MALANG	13	24	17	7	0
95	BNN KAB GRESIK	30	50	41	3	6
96	BNN KAB SIDOARJO	83	80	80	0	0
97	BNN KAB TRENGGALEK	16	27	23	1	3
98	BNN KAB LUMAJANG	10	25	23	2	0
99	BNN KAB BLITAR	40	40	18	22	0
100	BNN KAB KEDIRI	25	56	49	7	0
101	BNN KAB TUBAN	22	33	15	17	1
102	BNN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	4	16	9	5	2
103	BNN KAB BENGKAYANG	3	9	1	8	0
104	BNN KAB SINTANG	0	0	0	0	0
105	BNN KOTA PONTIANAK	15	28	9	19	0
106	BNN KOTA SINGKAWANG	5	4	0	4	0
107	BNN KAB SANGGAU	0	0	0	0	0

NO	SATUAN KERJA	TOTAL TARGET	CAPAIAN (ORANG)	REKOMENDASI (ORANG)		
				REHAB DI LEMBAGA REHAB	REHAB DI LAPAS/ RUTAN/ (PROSES HUKUM LANJUT)	TIDAK REHAB (PROSES HUKUM)
108	BNN KAB MEMPAWAH	0	0	0	0	0
109	BNN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	15	18	8	9	1
110	BNN KOTA PALANGKARAYA	10	8	6	2	0
111	BNN KAB KOTAWARINGIN BARAT	0	0	0	0	0
112	BNN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	20	30	4	25	1
113	BNN KOTA BANJARMASIN	4	5	3	2	0
114	BNN KOTA BANJARBARU	6	10	10	0	0
115	BNN KAB TABALONG	0	12	12	0	0
116	BNN KAB TANAH LAUT	12	7	4	0	3
117	BNN KAB HULU SUNGAI SELATAN	0	2	2	0	0
118	BNN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	20	31	29	2	0
119	BNN KOTA BALIKPAPAN	19	20	0	20	0
120	BNN KOTA SAMARINDA	8	31	17	14	0
121	BNN KOTA BONTANG	0	2	2	0	0
122	BNN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	0	0	0	0	0
123	BNN KOTA TARAkan	2	9	5	4	0
124	BNN KAB NUNUKAN	10	25	10	15	0
125	BNN PROVINSI SULAWESI UTARA	20	18	2	15	1
126	BNN KAB BOLAANG MONGONDOW	3	2	0	2	0

NO	SATUAN KERJA	TOTAL TARGET	CAPAIAN (ORANG)	REKOMENDASI (ORANG)		
				REHAB DI LEMBAGA REHAB	REHAB DI LAPAS/ RUTAN/ (PROSES HUKUM LANJUT)	TIDAK REHAB (PROSES HUKUM)
127	BNN KOTA BITUNG	1	0	0	0	0
128	BNN KOTA MANADO	12	12	2	10	0
129	BNN PROVINSI SULAWESI TENGAH	18	28	0	28	0
130	BNN KAB MOROWALI	2	0	0	0	0
131	BNN KOTA PALU	20	24	15	2	7
132	BNN KAB DONGGALA	3	13	9	4	0
133	BNN KAB POSO	3	13	10	0	3
134	BNN KAB BANGGAI KEPULAUAN	0	4	0	0	4
135	BNN PROVINSI SULAWESI SELATAN	300	693	0	693	0
136	BNN KAB TANA TORAJA	25	28	10	15	3
137	BNN KAB BONE	65	227	168	59	2
138	BNN KOTA PALOPO	61	199	130	69	0
139	BNN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	30	54	45	8	1
140	BNN KAB MUNA	6	13	3	10	0
141	BNN KAB KOLAKA	6	10	6	3	1
142	BNN KOTA KENDARI	13	16	14	2	0
143	BNN KOTA BAU-BAU	5	4	4	0	0
144	BNN PROVINSI SULAWESI BARAT	83	94	6	49	39
145	BNN KAB POLEWALI MANDAR	42	35	0	35	0
146	BNN PROVINSI MALUKU	80	84	42	41	1
147	BNN KOTA TUAL	7	6	0	2	4

NO	SATUAN KERJA	TOTAL TARGET	CAPAIAN (ORANG)	REKOMENDASI (ORANG)		
				REHAB DI LEMBAGA REHAB	REHAB DI LAPAS/ RUTAN/ (PROSES HUKUM LANJUT)	TIDAK REHAB (PROSES HUKUM)
148	BNN PROVINSI MALUKU UTARA	38	54	52	2	0
149	BNN KOTA TIDORE KEPULAUAN	0	0	0	0	0
150	BNN PROVINSI BALI	172	178	65	113	0
151	BNN KAB BADUNG	20	80	79	1	0
152	BNN KAB GIANYAR	15	16	0	16	0
153	BNN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	40	102	41	61	0
154	BNN KOTA MATARAM	5	7	2	3	2
155	BNN KAB SUMBAWA BARAT	0	1	0	1	0
156	BNN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	40	32	4	15	13
157	BNN KAB BELU	0	0	0	0	0
158	BNN PROVINSI GORONTALO	20	26	0	26	0
159	BNN KAB GORONTALO UTARA	3	3	1	2	0
160	BNN KAB BOALEMO	30	44	3	40	1
161	BNN PROVINSI PAPUA	20	21	19	2	0
162	BNN KAB MIMIKA	8	11	0	8	3
163	BNN KAB JAYAPURA	4	2	2	0	0
164	BNN PROVINSI PAPUA BARAT	8	8	7	1	0
TOTAL		4.426	10.369	6.873	3.199	297

d. Akuntabilitas Keuangan

Direktorat Wastahti Deputi Bidang Pemberantasan Tahun anggaran 2024 pada Output 3258.001 mempunyai alokasi pagu sebesar Rp. 3.046.414.000,-(tiga milyar empat puluh enam juta empat ratus empat belas ribu rupiah) dan terserap sebesar Rp. 3.029.007.067,-(tiga milyar dua puluh sembilan juta tujuh ribu enam puluh tujuh rupiah) atau 99,43 %. pada unit kerja BNN/BNNP/BNNK yang terdiri:

1. Layanan Pengawasan Dan Perawatan Tahanan Tindak Pidana Narkotika, Prekursor Narkotika dan TPPU dengan anggaran 966.624.000 dan realisasi sebesar 949.318.355 dengan capaian 98,21%
2. Layanan pengawasan dan pengelolaan barang bukti narkotika dan non-narkotika dengan anggaran Rp 1.800.250.000.- dan realisasi anggaran Rp. 1.800.167.690,- dengan capain 100%
3. Layanan Asesmen Terpadu Pelaku Tindak Pidana Narkotika dengan anggaran Rp. 279.540.000 dan realisasi anggaran Rp. 279.521.022,- dengan capain 99,99% dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel Realisasi Anggaran Direktorat Wastahti Tahun 2024
Layanan Pengawasan Dan Perawatan Tahanan Tindak Pidana Narkotika,
Prekursor Narkotika Dan TPPU

NO	SATUAN KERJA	ANGGARAN	REALISASI
1	DIREKTORAT WASTAHTI	966.624.000,00	949.318.355
2	DKI JAKARTA	68.225.000,00	64.149.350
3	JAWA BARAT	144.800.000,00	116.830.000
4	JAWA TENGAH	130.985.000,00	130.351.755
5	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	89.710.000,00	82.646.000
6	JAWA TIMUR	166.200.000,00	108.016.300
7	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	120.815.000,00	119.173.000
8	SUMATERA UTARA	152.205.000,00	151.879.370

NO	SATUAN KERJA	ANGGARAN	REALISASI
9	SUMATERA BARAT	78.900.000,00	72.801.825
10	RIAU	36.347.000,00	30.870.000
11	JAMBI	92.735.000,00	92.716.650
12	SUMATERA SELATAN	72.400.000,00	61.857.200
13	LAMPUNG	42.294.000,00	39.534.000
14	KALIMANTAN BARAT	57.183.000,00	56.235.000
15	KALIMANTAN TENGAH	64.860.000,00	51.934.000
16	KALIMANTAN SELATAN	116.328.000,00	111.099.900
17	KALIMANTAN TIMUR	132.980.000,00	134.428.618
18	SULAWESI UTARA	58.250.000,00	40.900.796
19	SULAWESI TENGAH	102.115.000,00	101.968.639
20	SULAWESI SELATAN	118.825.000,00	111.765.500
21	SULAWESI TENGGARA	67.475.000,00	36.262.600
22	MALUKU	76.290.000,00	76.290.000
23	BALI	115.939.000,00	115.871.000
24	NUSA TENGGARA BARAT	87.590.000,00	87.516.000
25	NUSA TENGGARA TIMUR	44.300.000,00	40.050.000
26	PAPUA	57.950.000,00	57.950.000
27	BENGKULU	43.205.000,00	39.122.000
28	MALUKU UTARA	75.085.000,00	75.085.000
29	BANTEN	33.450.000,00	31.390.000
30	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	46.074.000,00	26.266.000
31	GORONTALO	48.370.000,00	20.009.876
32	KEPULAUAN RIAU	128.780.000,00	119.070.000
33	PAPUA BARAT	30.524.000,00	30.524.000
34	SULAWESI BARAT	68.700.000,00	0

NO	SATUAN KERJA	ANGGARAN	REALISASI
35	KALIMANTAN UTARA	121.762.000,00	56.848.000
JUMLAH		3.858.275.000	3.440.730.734

Tabel Realisasi Pengawasan Dan Pengelolaan Barang Bukti Narkotika
Dan Non-Narkotika

NO	NAMA SATKER	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI
1	DIREKTORAT WASTAHTI	1.554.298.000	1.468.168.670
2	JAWA BARAT	18.750.000	18.750.000
3	JAWA TENGAH	13.685.000	16.645.100
4	JAWA TIMUR	13.850.000	9.478.100
5	DAERAH Istimewa YOGYAKARTA	17.525.000	17.524.500
6	GORONTALO	910.000	0
7	NANGGROE Aceh DARUSSALAM	12.950.000	8.679.000
8	SUMATERA UTARA	33.930.000	33.929.694
9	SUMATERA BARAT	26.425.000	26.229.800
10	RIAU	13.600.000	9.668.599
11	JAMBI	10.800.000	10.800.000
12	SUMATERA SELATAN	28.771.000	28.770.400
13	LAMPUNG	10.033.000	10.021.000
14	KALIMANTAN BARAT	47.267.000	47.165.800
15	KALIMANTAN TENGAH	22.200.000	22.200.000
16	KALIMANTAN SELATAN	11.115.000	11.115.000
17	KALIMANTAN TIMUR	20.010.000	18.693.000
18	SULAWESI UTARA	9.065.000	9.065.000
19	SULAWESI TENGAH	5.840.000	5.589.000
20	SULAWESI SELATAN	20.438.000	3.880.000
21	SULAWESI TENGGARA	16.320.000	16.320.000
22	BALI	19.700.000	19.700.000

NO	NAMA SATKER	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI
23	NUSA TENGGARA BARAT	6.750.000	6.750.000
24	NUSA TENGGARA TIMUR	3.000.000	3.000.000
25	PAPUA	39.000.000	39.000.000
26	BENGKULU	19.700.000	19.700.000
27	MALUKU UTARA	3.110.000	3.110.000
28	BANTEN	43.545.000	42.795.000
29	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	13.000.000	6.500.000
30	KEPULAUAN RIAU	19.395.000	19.395.000
31	PAPUA BARAT	50.000.000	50.000.000
32	SULAWESI BARAT	4.480.000	0
33	KALIMANTAN UTARA	17.682.000	9.760.000
34	DKI JAKARTA	38.100.000	16.426.050
TOTAL		2.185.244.000	2.028.828.713

Tabel Layanan Asesmen Terpadu Pelaku Tindak Pidana Narkotika 2024

NO	NAMA SATKER	ANGGARAN	
		ALOKASI	REALISASI (KUMULATIF)
1	DIREKTORAT WASTAHTI	279.540.000	279.521.022
2	BNN KAB BANGGAI KEPULAUAN	0	0
3	BNN KOTA JAKARTA UTARA	71.600.000	71.600.000
4	BNN KOTA JAKARTA SELATAN	246.350.000	246.350.000
5	BNN KOTA JAKARTA TIMUR	42.900.000	38.450.000
6	BNN PROVINSI DKI JAKARTA	60.350.000	40.651.500
7	BNN KAB BOGOR	3.925.000	3.925.000
8	BNN KAB SUKABUMI	42.350.000	42.350.000
9	BNN KAB CIANJUR	5.900.000	5.900.000
10	BNN KAB KARAWANG	39.690.000	9.690.000
11	BNN KAB SUMEDANG	11.800.000	11.500.000
12	BNN KAB GARUT	5.000.000	5.000.000
13	BNN KAB KUNINGAN	0	0
14	BNN PROVINSI JAWA BARAT	45.050.000	39.350.000
15	BNN KOTA CIREBON	32.000.000	26.750.000
16	BNN KOTA DEPOK	19.000.000	0
17	BNN KOTA TASIKMALAYA	17.700.000	17.700.000
18	BNN KOTA CIMAHI	35.900.000	35.900.000
19	BNN KAB KENDAL	23.525.000	23.525.000
20	BNN KAB BATANG	23.975.000	23.975.000

NO	NAMA SATKER	ANGGARAN	
		ALOKASI	REALISASI (KUMULATIF)
21	BNN KAB BANYUMAS	24.825.000	13.450.000
22	BNN KAB CILACAP	5.900.000	5.894.215
23	BNN KAB PURBALINGGA	30.725.000	30.725.000
24	BNN KAB MAGELANG	12.525.000	5.769.000
25	BNN KAB TEMANGGUNG	39.250.000	39.250.000
26	BNN PROVINSI JAWA TENGAH	86.400.000	78.501.000
27	BNN KOTA TEGAL	28.400.000	24.035.000
28	BNN KOTA SURAKARTA	44.625.000	44.625.000
29	BNN KAB BANTUL	15.725.000	15.725.000
30	BNN KAB SLEMAN	33.750.000	33.266.000
31	BNN PROVINSI DI YOGYAKARTA	70.875.000	70.875.000
32	BNN KAB GRESIK	38.500.000	38.500.000
33	BNN KAB SIDOARJO	47.625.000	47.625.000
34	BNN KAB SUMENEP	23.825.000	4.090.000
35	BNN KAB MALANG	19.625.000	19.078.000
36	BNN KAB LUMAJANG	25.827.000	24.104.100
37	BNN KAB KEDIRI	53.250.000	38.794.000
38	BNN KAB TULUNGAGUNG	24.452.000	17.462.000
39	BNN KAB NGANJUK	39.250.000	37.450.000
40	BNN KAB TRENGGALEK	32.500.000	32.500.000
41	BNN KAB BLITAR	47.300.000	47.300.000
42	BNN KAB TUBAN	56.800.000	39.918.000
43	BNN PROVINSI JAWA TIMUR	471.543.000	421.114.362

NO	NAMA SATKER	ANGGARAN	
		ALOKASI	REALISASI (KUMULATIF)
44	BNN KOTA SURABAYA	19.625.000	19.625.000
45	BNN KOTA MOJOKERTO	43.840.000	43.840.000
46	BNN KOTA MALANG	19.625.000	19.078.100
47	BNN KOTA KEDIRI	62.900.000	57.166.000
48	BNN KOTA BATU	39.250.000	38.986.500
49	BNN KAB BIREUEN	26.870.000	26.870.000
50	BNN KAB PIDIE JAYA	3.925.000	3.127.000
51	BNN PROVINSI ACEH	23.550.000	22.699.000
52	BNN KAB DELI SERDANG	0	0
53	BNN KAB KARO	23.550.000	23.516.000
54	BNN KAB LANGKAT	13.636.000	8.666.000
55	BNN KAB SIMALUNGUN	31.000.000	28.600.000
56	BNN KAB LABUHANBATU UTARA	74.750.000	74.350.000
57	BNN KAB TAPANULI SELATAN	31.400.000	25.382.000
58	BNN KAB ASAHAN	45.700.000	42.755.000
59	BNN KAB MANDAILING NATAL	15.700.000	15.700.000
60	BNN KAB SERDANG BEDAGAI	7.850.000	7.850.000
61	BNN KAB BATU BARA	74.750.000	74.350.000
62	BNN PROVINSI SUMATERA UTARA	61.150.000	61.148.900
63	BNN KOTA TEBING TINGGI	20.850.000	20.400.000
64	BNN KOTA BINJAI	23.550.000	19.070.000

NO	NAMA SATKER	ANGGARAN	
		ALOKASI	REALISASI (KUMULATIF)
65	BNN KOTA PEMATANG SIANTAR	35.000.000	34.999.000
66	BNN KOTA TANJUNG BALAI	31.400.000	31.000.000
67	BNN KOTA SAWAHLUNTO	22.850.000	19.650.000
68	BNN KAB PASAMAN BARAT	53.800.000	9.110.000
69	BNN PROVINSI SUMATERA BARAT	88.150.000	83.971.850
70	BNN KOTA PAYAKUMBUH	80.900.000	70.380.000
71	BNN KAB PELALAWAN	44.350.000	43.250.000
72	BNN KAB KUANTAN SINGINGI	3.925.000	3.775.000
73	BNN KOTA TUAL	23.575.000	18.465.000
74	BNN PROVINSI RIAU	254.890.000	129.680.260
75	BNN KOTA PEKANBARU	35.325.000	34.170.000
76	BNN KAB BATANGHARI	0	0
77	BNN KAB TANJUNG JABUNG TIMUR	0	0
78	BNN PROVINSI JAMBI	55.325.000	55.325.000
79	BNN PROVINSI SUMATERA SELATAN	37.850.000	37.837.000
80	BNN KAB TANGGAMUS	3.925.000	3.425.000
81	BNN PROVINSI LAMPUNG	102.750.000	10.750.000
82	BNN KOTA METRO	26.775.000	26.775.000
83	BNN KAB BENGKAYANG	9.825.000	9.825.000
84	BNN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	11.800.000	11.350.000
85	BNN KOTA PONTIANAK	30.725.000	30.725.000

NO	NAMA SATKER	ANGGARAN	
		ALOKASI	REALISASI (KUMULATIF)
86	BNN KOTA SINGKAWANG	15.725.000	8.860.000
87	BNN KOTA PALANGKARAYA	17.500.000	11.920.000
88	BNN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	39.825.000	35.430.000
89	BNN KAB TANAH LAUT	25.900.000	21.950.000
90	BNN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	43.260.000	43.260.000
91	BNN KOTA BANJARMASIN	7.850.000	7.850.000
92	BNN KOTA BANJARBARU	24.720.000	24.530.000
93	BNN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	39.250.000	33.981.175
94	BNN KOTA SAMARINDA	23.600.000	22.400.000
95	BNN KOTA BALIKPAPAN	43.400.000	43.400.000
96	BNN KAB BOLAANG MONGONDOW	7.425.000	3.925.000
97	BNN PROVINSI SULAWESI UTARA	51.200.000	23.315.500
98	BNN KOTA MANADO	20.400.000	17.170.000
99	BNN KOTA BITUNG	1.610.000	0
100	BNN KAB POSO	13.030.000	13.030.000
101	BNN KAB DONGGALA	9.825.000	6.610.000
102	BNN KAB MOROWALI	5.900.000	4.042.000
103	BNN PROVINSI SULAWESI TENGAH	38.470.000	35.945.000
104	BNN KOTA PALU	39.250.000	36.016.000
105	BNN KAB BONE	105.440.000	105.440.000

NO	NAMA SATKER	ANGGARAN	
		ALOKASI	REALISASI (KUMULATIF)
106	BNN KAB TANA TORAJA	72.775.000	64.832.000
107	BNN PROVINSI SULAWESI SELATAN	351.660.000	346.660.000
108	BNN KOTA PALOPO	83.925.000	79.717.000
109	BNN KAB MUNA	15.750.000	15.750.000
110	BNN KAB KOLAKA	14.760.000	14.760.000
111	BNN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	74.850.000	42.932.000
112	BNN KOTA KENDARI	22.275.000	22.275.000
113	BNN KOTA BAU-BAU	15.725.000	15.275.000
114	BNN PROVINSI MALUKU	76.540.000	76.440.000
115	BNN KAB GIANJAR	36.825.000	36.823.500
116	BNN KAB BADUNG	92.250.000	54.272.000
117	BNN PROVINSI BALI	140.587.000	140.537.000
118	BNN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	60.000.000	59.850.000
119	BNN KOTA MATARAM	15.725.000	15.725.000
120	BNN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	45.525.000	26.536.000
121	BNN KAB JAYAPURA	23.550.000	18.204.000
122	BNN KAB MIMIKA	26.200.000	24.000.000
123	BNN PROVINSI PAPUA	21.750.000	16.750.000
124	BNN KOTA BENGKULU	3.925.000	3.175.000
125	BNN PROVINSI BENGKULU	32.800.000	32.800.000
126	BNN PROVINSI MALUKU UTARA	75.100.000	75.100.000

NO	NAMA SATKER	ANGGARAN	
		ALOKASI	REALISASI (KUMULATIF)
127	BNN KOTA TANGERANG	51.860.000	39.040.000
128	BNN KOTA CILEGON	8.850.000	7.525.000
129	BNN PROVINSI BANTEN	122.100.000	111.580.000
130	BNN KAB BELITUNG	7.850.000	7.830.240
131	BNN KAB BANGKA	7.850.000	7.250.000
132	BNN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	7.850.000	4.589.000
133	BNN KAB GORONTALO UTARA	9.825.000	9.825.000
134	BNN PROVINSI GORONTALO	45.725.000	43.036.000
135	BNN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	35.250.000	19.625.000
136	BNN PROVINSI PAPUA BARAT	31.400.000	26.660.000
137	BNN KAB POLEWALI MANDAR	61.075.000	39.395.000
138	BNN PROVINSI SULAWESI BARAT	89.650.000	0
139	BNN KAB NUNUKAN	24.200.000	10.210.000
140	BNN KOTA TARAKAN	5.900.000	5.900.000
TOTAL		6.282.125.000	5.363.784.224

7. Direktorat Interdiksi

Unit Eselon II	:	Direktorat Interdiksi
Kegiatan	:	Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Psikotropika dan Prekursor Narkotika
Sasaran	:	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika pada wilayah entri point udara, laut, darat, dan lintas batas wilayah Indonesia
Indikator Kinerja Kegiatan	:	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor di pintu masuk bandar udara, pelabuhan laut, perairan, dan lintas batas wilayah Indonesia yang P-21.
Target Kegiatan Awal	:	Jumlah berkas perkara tindak pidana prekursor narkotika yang (P21) = 58 Berkas Perkara
Target Kegiatan Menjadi	:	Jumlah berkas perkara tindak pidana prekursor narkotika yang (P21) = 70 Berkas Perkara
Capaian Kegiatan	:	Jumlah berkas perkara tindak pidana prekursor narkotika yang (P21) = 79 Berkas Perkara
ANGGARAN		
Pagu Anggaran	:	Rp. 10.315.536.000
Pagu Setelah AA	:	Rp. 11.786.536.000
Realisasi	:	Rp. 11.782.524.458

a. Penetapan Kinerja Direktorat Interdiksi

Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kerja/perjanjian kinerja secara berjenjang untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi dan disusun sendiri oleh pimpinan instansi pemerintah/unit kerja atau penerima amanah dan disetujui oleh pejabat atasannya. Dokumen Perjanjian Kinerja dimanfaatkan oleh setiap pimpinan instansi pemerintah untuk; a) memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, b) melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; c) menilai keberhasilan organisasi. Format pernyataan dan lampiran dokumen Perjanjian Kinerja berisikan Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, Target, Program dan Anggaran. Dapat di lihat sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel Informasi Kinerja Direktorat Interdiksi T.A. 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			SEMULA (SESUAI PK)	MENJADI (TAMBAHAN ANGGARAN)
1	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkoba pada wilayah entri point udara, laut, darat, dan lintas batas wilayah Indonesia	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba dan prekursor di pintu masuk bandar udara, pelabuhan laut, perairan, dan lintas batas wilayah Indonesia yang P-21.	58 Berkas Perkara	70 Berkas Perkara

b. Capaian Kinerja Direktorat Interdiksi

Dari sasaran tersebut dapat disimpulkan bahwa semua sasaran yang telah ditetapkan terhadap Direktorat Interdiksi telah memenuhi target dari yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) serta penjelasan hasil capaian yang diuraikan sebagai berikut :

Tabel Realisasi Kinerja Direktorat Interdiksi T.A. 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI (BERDASAR TARGET TERAKHIR)	% CAPAIAN
			SEMULA	MENJADI		
1	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika pada wilayah entri point udara, laut, darat, dan lintas batas wilayah Indonesia	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor di pintu masuk bandar udara, pelabuhan laut, perairan, dan lintas batas wilayah Indonesia yang P-21	58 Berkas Perkara	70 Berkas Perkara	79 Berkas Perkara P21	112,86

c. Evaluasi Capaian Kinerja Direktorat Interdiksi

Guna mengetahui lebih jauh tentang capaian kinerja yang telah dilakukan Direktorat Interdiksi selama kurun waktu tahun 2024, perlu dilakukan evaluasi dengan cara melakukan analisis yang berkaitan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan. Analisis dilakukan dengan menyajikan perkembangan capaian, baik dalam bentuk narasi maupun tabel atau grafik. Capaian kinerja tahun 2024 merupakan kelanjutan capaian periode tahun sebelumnya, dan capaian ini merupakan arah untuk capaian pada periode selanjutnya, sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Direktorat Interdiksi.

1.

Sasaran : Meningkatkan pengungkapan tindak pidana narkotika pada wilayah *entry point* udara, laut, darat, dan lintas batas wilayah Indonesia.

Sasaran strategis di atas, diimplementasikan melalui 1 (satu) indikator kinerja sebagai berikut :

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI (BERDASAR TARGET TERAKHIR)	% CAPAIAN
			SEMULA	MENJADI		
1	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkoba pada wilayah entri point udara, laut, darat, dan lintas batas wilayah Indonesia	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba dan prekursor di pintu masuk bandar udara, pelabuhan laut, perairan, dan lintas batas wilayah Indonesia yang P-21	58 Berkas Perkara	70 Berkas Perkara	79 Berkas Perkara P21	112,86

Dari tabel Perjanjian Kinerja Direktorat Interdiksi Tahun Anggaran 2024, dinyatakan bahwa Indikator Kinerja Direktorat Interdiksi Tahun Anggaran 2024 berdasarkan Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba dan prekursor di pintu masuk bandar udara, pelabuhan laut, perairan, dan lintas batas wilayah Indonesia yang P-21. Merupakan bagian tugas pokok dan fungsi Direktorat Interdiksi selama Tahun Anggaran 2024, telah melaksanakan kegiatan Interdiksi dan administrasi penyidikan di wilayah udara, laut/perairan, darat dan lintas batas dengan target yang ditetapkan 70 Berkas Perkara, total kasus yang ditangani sebanyak 100 Berkas Perkara, dan yang berhasil diselesaikan (P-21) sebanyak 79 Berkas Perkara. Adapun rinciannya sebagai berikut:

- ❑ *Outstanding* 2023 : 22 Berkas Perkara
- ❑ Berkas Perkara ditangani 2024 : 78 Berkas Perkara +
- ❑ Total Berkas Perkara ditangani : 100 Berkas Perkara
- ❑ Berkas Perkara yang sudah P-21 (2024) : 79 Berkas Perkara -
- ❑ Berkas Perkara dalam proses : **21 Berkas Perkara**
(*outstanding* 2025)

Formula yang digunakan untuk mengukur persentase capaian kinerja kegiatan pada indikator kinerja sebagai berikut:

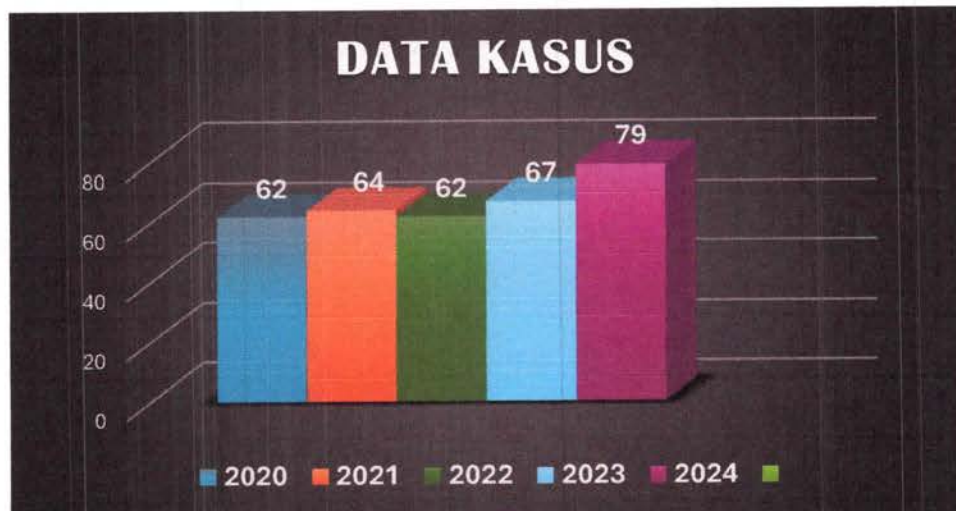
$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Maka persentase capaian berkas perkara tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba di pintu masuk bandar udara, pelabuhan laut, perairan, darat dan lintas batas wilayah Indonesia yang terselesaikan (P-21) adalah sebagai berikut :

$$\text{Pesentase penyelesaian perkara} : \frac{79 \text{ BP}}{70 \text{ BP}} \times 100\% = 112,86\%$$

Perbandingan Capaian Tahun 2020 – 2024

Grafik Capaian jumlah berkas perkara yang ditangani Direktorat Interdiksi selama periode tahun 2020 s.d. 2024



NO	TAHUN	LKN	BERKAS PERKARA P 21
1	2020	27	62
2	2021	29	64
3	2022	26	62
4	2023	31	67
5	2024	42	79

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 terjadi peningkatan dari 88 berkas perkara ditangani dengan capaian Berkas Perkara P21 sebesar 67, pada tahun 2024 menjadi 100 berkas perkara yang ditangani dengan 79 berkas perkara (P21).

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target sebagai berikut:

1. Diawali dengan rencana penyusunan kegiatan yang matang, termasuk penyusunan Rencana Operasi (Renops) terkait operasi penyelidikan dan penyidikan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan;
2. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama baik pada tingkat penyelidikan maupun penyidikan dengan instansi terkait untuk penguatan kegiatan P4GN;
3. Dukungan anggaran dan peralatan teknologi informasi yang memadai dalam pelaksanaan kegiatan penyelidikan dan penyidikan;
4. Meningkatkan kemampuan SDM melalui pendidikan dan pelatihan khususnya terkait dengan kegiatan-kegiatan teknis pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan yang lebih profesional;
5. Peningkatan kekuatan antar personel yang menjadi lebih solid.

Hambatan atau kendala, dan permasalahan yang dihadapi:

1. Pelaksanaan Interdiksi di wilayah yang belum optimal, dimana kegiatan interdiksi di wilayah masih harus mendapat pembinaan teknis dari pusat;
2. Adanya keterbatasan SDM dan anggaran yang diperlukan dalam melaksanakan kegiatan Interdiksi yang menjangkau seluruh pintu masuk di seluruh wilayah Indonesia;
3. Kurangnya ketersediaan anggaran yang dibutuhkan untuk merawat dan memelihara sarana operasi dan peralatan khusus yang dimiliki mengakibatkan kurang maksimalnya sarana operasi dan peralatan khusus dalam mendukung operasional Direktorat Interdiksi;
4. Kurangnya pemahaman tentang pelaksanaan Operasi Interdiksi;

Langkah-langkah rekomendasi dan antisipatif yang diambil:

1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja yang telah dilaksanakan;
2. Penguatan kerja sama dengan instansi penegak hukum lain yang sudah terjalin serta menginisiasi kerja sama dengan lembaga/perusahaan/ instansi lain yang terkait dengan upaya P4GN, khususnya dengan perusahaan jasa ekspedisi, logistik dan pengiriman paket serta maskapai penerbangan;
3. Pertukaran data dan informasi melalui PKS/MoU;
4. Optimalisasi pemanfaatan Sistem Informasi Interdiksi dan jaringan intelijen dalam sistem dan sarana prasarana yang sudah dimiliki;
5. Penambahan kebutuhan anggaran dalam memelihara dan merawat sarana operasi dan peralatan khusus untuk memaksimalkan pemanfaatannya, dan alangkah lebih baiknya adanya peremajaan yang disesuaikan dengan perkembangan teknologi terbaru.

Ungkap kasus menonjol Tahun 2024 :

Pengungkapan kasus peredaran gelap narkoba menonjol yang diungkap oleh Direktorat Interdiksi antara lain:

1. LKN/0038-INTD/VII/2024/BNN, 14 Juli 2024, tersangka Raju Muthukumaran, Selvadurai Dinakaran, Govindhasamy Vimalkhandan dengan BB Narkoba jenis shabu dengan berat 106.438 gram netto. Kasus terungkap berkat Kerjasama antara BNNP Kepri dengan Bea dan Cukai wilayah Batam. Kasus tersebut dianggap menonjol karena dilakukan oleh jaringan Internasional dengan menggunakan Kapal berbendera Singapura dan 3 tersangka yang berkewarganegaraan India.
2. LKN/0045-INTD/VII/2024/BNN, 27 Mei 2024, tersangka a.n. Nilam anak Marianus Muli, Andrew Benzi anak Jibeng, Oskar Lazarius, BB berupa 6 paket dalam kemasan plastic merk Guanyiwang Refined Chinese Tea warna Hjaiu yang didalamnya berisi narkoba golongan I jenis shabu dengan berat 5.994,46 gram. Kasus dianggap menonjol dikarenakan terungkap berkat Kerjasama dari Petugas Pamtas Satgas Pos Sei Saparan RI – Malaysia YonKav 12/BC Mempawah Kalbar.

3. LKN/0053-INTD/IX/2024/BNN, 20 Septemeber 2024, tersangka a.n. Rian Fauzi Bin Fahrul Roji, Wahyu Pramana Bin Royani Alias Moncos dan Jopie Teguh Budiarto Bin Gunawan dengan BB Narkotika jenis Sabu, berat netto 1.687 gram. Berawal dari penangkapan Rian kemudian dikembangkan melibatkan Warga Binaan Pemasyarakatan LP Salemba Jakarta Pusat yang bernama Wahyu Pramana Bin Royani Alias Moncos dan Jopie Teguh Budiarto Bin Gunawan yang menjadi pengendali kurir dan penghubung dengan pemasok sabu.
4. LKN/0065-INTD/XII/2023/BNN, 11 Desember 2023, tersangka yang diamankan 6 diantaranya adalah; Rio Aditia, Angga Pratama, Raden Yoga Setiawan, Rian Mahendro Putro, Gerson Indrian Kurniawan, Hamdi dengan BB narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 5.100gram. Kasus ini dianggap menonjol dikarenakan melibatkan jaringan Internasional yang diduga Jaringan **Sinaloa**, Mexico. Berdasarkan pengakuan dari tersangka yang diamankan diketahui Gregor Johann Haas adalah orang yang telah memesan dan pemilik 1 buah paket DHL yang berisikan decorative resin frame yang berisikan narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 5.100gram. Saat ini tersangka Gregor Jhann Haas telah diamankan oleh pihak Imigrasi Filipina dalam Upaya pendeportasian ke Indonesia.

d. **Akuntabilitas Keuangan Direktorat Interdiksi**

Direktorat Interdiksi Deputi Bidang Pemberantasan Tahun Anggaran 2024 pada Kegiatan 3252 mendapatkan alokasi pagu awal sebesar Rp.10.315.536.000,-, kemudian pada bulan Oktober mendapatkan alokasi tambahan anggaran sebesar Rp.1.500.000.000,- sehingga perubahan pagu anggaran menjadi Rp. 11.815.536.000,- serta terjadi perubahan volume target semula 58 Berkas Perkara menjadi 70 Berkas Perkara, dengan rincian realisasi anggaran sebagaimana tabel berikut :

Tabel Realisasi Anggaran Direktorat Interdiksi Tahun Anggaran 2024

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/O UTPUT/ SUBOUTPUT/ KOMPONEN/SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PAGU SAKTI (DIKURANGI BLOKIR AA)	REALISASI	SISA ANGGA RAN	%
3252	Pelaksanaan Interdiksi Wilayah Udara, Laut, Darat dan Lintas Darat				
3252. BCA.0 01	Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika di Pintu Masuk Bandar Udara, Pelabuhan Laut, Perairan, Darat dan Lintas Batas Wilayah Indonesia	11.786.536.0 00	11.782.524. 458	4.011.5 42	99,9 7
051	Supervisi Pelaksanaan Interdiksi	162.091.000	158.826.038	3.264.9 62	97,9 9
052	Interdiksi di Pintu Masuk Bandar Udara, Pelabuhan Laut, Perairan, Darat dan Lintas Batas Wilayah Indonesia	6.900.305.00 0	6.900.226.1 03	78.897	99.9 9
053	Penyidikan Kasus Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika di Wilayah Bandar Udara, Pelabuhan Laut, Perairan, Darat dan Lintas Batas Wilayah Indonesia	4.724.140.00 0	4.723.472.3 17	667.683	99.9 9

Berdasarkan Realisasi Anggaran sebagaimana Tabel 3 tersebut diatas, Direktorat Interdiksi pada Tahun Anggaran 2024 terdapat sisa anggaran yang tidak diserap sebesar Rp. 4.011.542,- (Empat juta sebelas ribu lima ratus empat puluh dua rupiah), dengan persentase realisasi anggaran sebesar **99,97%**.